



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN HASIL SIDANG

This publication contains the outcomes from the two phases of the World Summit on the Information Society (WSIS). The First phase, held in Geneva 19-12 December, resulted in the Geneva Declaration of Principles and Geneva Plan of Action. The Second phase, held 19-12 November 2005, produced the Tunis Commitment and Tunis Agenda for the Information Society.

Publikasi ini memuat hasil-hasil sidang dari dua tahap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS). Tahap pertama, dilaksanakan di Geneva 19-12 Desember, menghasilkan Deklarasi Prinsip-prinsip Geneva dan Rencana Aksi Geneva. Tahap Kedua, dilaksanakan 19-12 November 2005, menghasilkan Komitmen Tunis dan Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi.

DOKUMEN HASIL SIDANG

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Tel: +41 22 730 5111
Fax: +41 22 730 7068
E-mail: itumail@itu.int
www.itu.int/press



World Summit
on the Information Society
Geneva 2005
Telekomunikasi Indonesia
Divisi of Information
Jakarta 2005

**Konferensi Tingkat Tinggi Dunia
Mengenal Masyarakat Informasi**

Desember 2005



Dokumen Hasil Sidang

Konferensi Tingkat Tinggi Dunia
Mengenai Masyarakat Informasi

Geneva 2003 - Tunis 2005

Diterbitkan oleh :



Departemen Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Tim Editor/Penerjemah :

Dr. Moedjiono, M.Sc.; Arnold Ph. Djiwatampu; F.B. Moerwanto;
Sylvia D. Tulung; Shinta L. Djiwatampu

Jakarta 2006

© ITU, 2005
International Telecommunication Union (ITU), Geneva

All rights reserved. Denominations and classifications employed in this publication do not imply any opinion on the part of the International Telecommunication Union concerning the legal or other status of any territory or any endorsement or acceptance of any boundary. Where the designation "country" appears in this publication, it covers countries and territories.

© ITU, 2005
Perhimpunan Telekomunikasi Indonesia (ITU), Geneva

Semua hak cipta dilindungi. Santunan dan klasifikasi yang dipergunakan dalam publikasi ini tidak secara langsung menyatakan pendapat apapun pada pihak Perhimpunan Telekomunikasi Internasional menyangkut hukum atau status lain dari wilayah mana pun atau persetujuan atau penerimaan batas apa pun. Di mana penandaan "negara" nampak dalam publikasi ini, hal ini mencakup negara dan wilayah.



Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah, telah diselesaikan salah satu naskah penting dan strategis, yang berisi terjemahan dokumen hasil-hasil kesepakatan Sidang Puncak/Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia mengenai Masyarakat Informasi (*World Summit on the Information Society = WSIS*). Dokumen ini dibuat sesuai dengan salah satu butir kesepakatan WSIS yang harus ditindak-lanjuti yaitu multilingualism dalam segala langkah implementasi pembangunan negara masing-masing dengan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi - TIK (*Information and Communication Technology = ICT*) atau teknologi telematika, sebagai sarana pendukung dan sekaligus sebagai industri yang harus kita bangun bersama

Tujuan pembuatan naskah ini adalah untuk lebih mempermudah memahami dan mendalami inti pokok pesan-pesan yang menjiwai dan terkandung dalam kesepakatan bersama para pemimpin dunia di bidang teknologi telematika ini, agar bisa dipergunakan sebagai referensi dasar/rujukan bagi para pemangku kepentingan (*stake-holders*) di bidang teknologi telematika serta dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan khusus atau unggulan (*flagship program*) sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sesuai dengan prinsip kerjasama kemitraan (*public private partnership*) antara instansi pemerintah, sektor swasta (*private sector*), masyarakat sipil (*civil society*) dan organisasi-organisasi internasional bidang telematika.

Dengan demikian, naskah ini diharapkan bisa dipakai sebagai referensi dasar/rujukan utama dalam rangka pembuatan perencanaan strategis maupun operasional bagi pembangunan nasional Indonesia secara menyeluruh, agar hasilnya merupakan konsep yang terintegrasi dan optimal, sebagai contoh penyusunan konsep Strategi

Pembangunan Telematika Nasional Indonesia atau *National e-Strategy* untuk Indonesia yang dinamakan *Strategi e-Indonesia (e-Indonesia Strategy)*.

Ucapan terima kasih kepada tim editor/penerjemah yang telah berusaha keras untuk terwujudnya naskah yang sangat penting dan strategis ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua dalam usaha mempersembahkan pengabdian terbaik kita kepada negara tercinta ini dengan pendayagunaan teknologi telematika dalam pembangunan nasional Indonesia. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Dr. Sofyan A. Djalil

Latar Belakang dan Tindak Lanjut Hasil-Hasil Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society = WSIS)

World Summit on the Information Society (WSIS) adalah suatu forum pertemuan/ sidang puncak atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin negara-negara di dunia dalam rangka membangun masyarakat informasi yang terpusat pada manusia, yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan, didasari pemikiran pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional dan multilateralisme, serta menghormati sepenuhnya dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia, sehingga bangsa di manapun dapat menciptakan, mengakses, menggunakan dan berbagi informasi dan pengetahuan, untuk mendapatkan dan mendayagunakan kemampuan mereka sepenuhnya dalam rangka mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*). Dengan demikian, forum WSIS merupakan suatu momen penting di dunia teknologi komunikasi dan informasi atau telematika, yaitu diakuinya teknologi ini secara formal sebagai salah satu sarana utama dalam rangka memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa-bangsa di dunia.

Dalam rapatnya pada bulan Juni 2001, PBB menyetujui usulan *International Telecommunication Union (ITU)*, bahwa WSIS akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dilaksanakan di Geneva, Swiss pada tanggal 10-12 Desember 2003 dan tahap II dilaksanakan di Tunis, Tunisia pada tanggal 16-18 Nopember 2005.

Dalam kata sambutannya, Sekretaris Jenderal PBB - Kofi Annan menyampaikan pesan bahwa WSIS adalah pertemuan/sidang untuk penyelesaian masalah (*Summit of Solutions*), untuk menjembatani atau merubah masalah-masalah kesenjangan digital (*digital divide*) menjadi peluang digital (*digital opportunity*), untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan yang berkelanjutan, demokrasi, transparansi dan pengelolaan negara yang baik (*good governance*); Tugas kita adalah beranjak dari diagnosa menuju ke tindakan nyata. Dengan demikian, pesan ini merupakan cambuk bagi negara-negara di dunia untuk bisa secara bersama-sama memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal ITU - Yoshio Utsumi, mengatakan dalam sambutannya bahwa hasil-hasil yang telah dicapai oleh forum ini bukanlah merupakan hasil akhir, akan tetapi barulah merupakan tahap awal untuk ditindak-lanjuti dengan implementasinya secara riil di masa depan.

Keseriusan para pemimpin dunia untuk mewujudkan keinginan ini bisa dilihat dari diselenggarakannya berbagai persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan sidang-sidang puncak tersebut, di antaranya adalah,

1. Pertemuan-pertemuan persiapan *Preparatory Committee (PrepCom Meetings)*,
2. Konferensi-konferensi regional tingkat Menteri (*Ministerial Regional Conferences*),
3. Konferensi-konferensi regional dengan berbagai tema di bidang ICT/Media/ Internet Governance dan lain-lainnya (*Thematic Meetings*), serta

4. Pembentukan kelompok-kelompok kerja (*Working Groups*) untuk menangani beberapa isu penting, yaitu:

- a. *Task Force on Financial Mechanisms* - TFFM yang mendiskusikan tentang prosedur/mekanisme finansial,
- b. *Working Group on Internet Governance* - WGIG yang mendiskusikan tentang pengelolaan/pengendalian internet, dan
- c. *Groups of Friends of the Chair* - GFC yang mendiskusikan tentang pernyataan/ komitmen politis (*Political Cheapeau*).

WSIS menyepakati 4 (empat) hasil dokumen keluaran, yaitu 2 (dua) dokumen keluaran pada tahap I di Geneva, Swiss dan 2 (dua) dokumen keluaran pada tahap II di Tunis, Tunisia. Dokumen keluaran pada tahap I di Geneva, Swiss adalah Deklarasi Prinsip-prinsip (*Geneva Declaration of Principles*) dan Rencana Aksi (*Geneva Plan of Action*), sedangkan dokumen keluaran pada tahap II di Tunis, Tunisia adalah Pernyataan/ Komitmen Politik (*Tunis Commitment*) dan Agenda untuk Mewujudkan Masyarakat Informasi (*Tunis Agenda for the Information Society*). Isi lengkap dari masing-masing dokumen keluaran beserta terjemahannya tercantum dalam naskah ini.

Berdasarkan hasil-hasil kesepakatan sesuai dengan dokumen keluaran tersebut, diharapkan masing-masing negara segera menindak-lanjutnya dengan membuat konsep strategis pembangunan telematika nasional (*National e-Strategy*), yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake-Holders*) dan selalu melaporkan kemajuan hasilnya, yang akan dicantumkan dalam dokumen kemajuan buku emas (*Golden Book - Stocktakings*). Gambaran peran masing-masing *Stake-Holders* di bidang Telematika adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah (Nasional maupun Lokal):
 - a. Menciptakan kebijakan dan aturan yang komprehensif (transparan, pengurangan risiko dan keikutsertaan semua pemangku kepentingan);
 - b. Mengukur dan memonitor masalah-masalah kesenjangan digital;
 - c. Mengidentifikasi permasalahan dan menyelenggarakan konsultasi terbuka;
 - d. Mempromosikan e-Strategy;
 - e. Mempromosikan kompetisi;
2. Sektor Swasta (Penyedia barang/perangkat keras, penyedia jasa aplikasi perangkat lunak serta kelompok wirausaha industri telematika):
 - a. Memperkuat dan memberdayakan hubungan masyarakat;
 - b. Melatih tenaga kerja yang bersemangat tinggi;
 - c. Memperluas pasar;
 - d. Mempromosikan kesadaran tentang keuntungan pemberdayaan teknologi telematika;
 - e. Mempromosikan penggunaan jasa bidang telematika;
3. Masyarakat Madani/Sipil (individu perorangan, media, lembaga swadaya masyarakat dan institusi akademis):
 - a. Menyampaikan kebutuhan sosial masyarakat yang sangat urgen;
 - b. Responsif terhadap kebutuhan dan batasan-batasan kultural masyarakat;
 - c. Menyempurnakan legitimasi dan kepemilikan proyek-proyek yang menjadi lingkungannya;

4. Organisasi-organisasi Internasional:

- a. Mendorong terwujudnya koordinasi untuk pembuatan standar-standar kebijakan bersama;
- b. Menyediakan forum-forum untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan sumber daya;
- c. Mempromosikan kerjasama;
- d. Mempromosikan interoperabilitas;
- e. Menyediakan tenaga ahli;

Untuk meyakinkan terlaksananya hasil-hasil kesepakatan ini, Sekjen PBB akan selalu mendorong dan memantau lancarnya pelaksanaan kerjasama di bidang telematika ini lewat berbagai kegiatan dan ketentuan yang tercantum dalam agenda/arahan aksi (*Action Lines*), yang masing-masing agenda akan dimoderatori oleh berbagai pihak yang telah ditunjuk, sebagai moderator pelaksana, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kesepakatan ini.

Posisi Indonesia dalam menyikapi hasil-hasil kesepakatan forum WSIS ini adalah harus bisa mendayagunakan potensi dan peluang yang tersedia di bidang telematika baik lokal, nasional, regional maupun internasional dengan prinsip kerjasama kemitraan antar semua pemangku kepentingan (*Multi-stakeholder Public Private Partnership*), multilateral, demokratis dan transparan untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi teknologi telematika Presiden RI dalam sambutan pembukaan seminar e-Indonesia di ITB Bandung tanggal 3-4 Mei 2005, bahwa "Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini . . . Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju . . .".

Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama dalam membangun bangsa dan negara kita tercinta ini. Amin.

Demikian latar belakang dilaksanakannya forum WSIS, semoga bermanfaat bagi para pembaca dalam mengantar dan mendalami isi yang terkandung dalam dokumen hasil-hasil kesepakatan bersama ini.

Ketua Tim Persiapan WSIS
Tim Editor/Penerjemah



Dr. Moedjiono, M.Sc.

SECOND PHASE OF WSIS, 16-18 NOVEMBER, TUNIS

STATEMENT BY H. E. MR. KOFI ANNAN
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS

Tunis, 16 November 2005

AS DELIVERED

President Ben Ali,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

I commend our hosts - President Ben Ali and the Government and people of Tunisia — for all they have done to make this gathering possible. Let us remember that it was the Government of Tunisia, back in 1998, that first proposed the idea of a summit on the information society.

I also thank the International Telecommunication Union and other members of the UN family for their unrelenting efforts to ensure that this process produces concrete results.

Two years ago in Geneva, the first phase of the World Summit articulated a vision of an open and inclusive information society. Our task here in Tunis is to move from diagnosis to deeds.

Last night you spelt out this task in the Tunis Agenda for the Information Society.

This Summit must be a summit of solutions. It must push forward the outcome of the World Summit held two months ago at the United Nations in New York. It must lead to information and communications technologies being used in new ways, which will bring new benefits to all social classes. Most of all, it must generate new momentum towards developing the economies and societies of poor countries, and transforming the lives of poor people.

What do we mean by an “information society”? We mean one in which human capacity is expanded, built up, nourished and liberated, by giving people access to the tools and technologies they need, with the education and training to use them effectively. The hurdle here is more political than financial. The costs of connectivity, computers and

WSIS TAHAP KE DUA, 16-18 NOVEMBER, TUNIS

PERNYATAAN OLEH Y.M. BAPAK KOFI ANNAN
SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Tunis, 16 November 2005

SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN

Presiden Ben Ali,
Yang Terhormat,
Ibu dan Bapak sekalian,

Saya memuji tuan rumah kita - Presiden Ben Ali dan Pemerintahan serta rakyat Tunisia — untuk semua yang telah mereka lakukan agar pertemuan ini dapat terlaksana. Mari kita mengingat bahwa Pemerintah Tunisia-lah, di tahun 1998, yang pertama kali mengusulkan gagasan terhadap Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Masyarakat Informasi.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dan anggota keluarga Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk upaya mereka yang tak kunjung padam untuk memastikan bahwa proses ini memberikan hasil yang kongkrit.

Dua tahun yang lalu di Geneva, tahap pertama KTT Dunia mengungkapkan sebuah pandangan tentang masyarakat informasi yang terbuka dan inklusif. Tugas kita disini di Tunis adalah untuk beranjak dari diagnosis ke tindakan.

Kemarin malam anda menjabarkan tugas ini dalam Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi.

KTT ini harus menjadi KTT penyelesaian. KTT ini harus mendesak lebih lanjut KTT Dunia yang diadakan dua bulan lalu di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Konferensi ini harus mengarah kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara-cara baru, yang akan memberi manfaat baru kepada semua tingkat sosial masyarakat. Yang paling utama, sidang ini harus membangkitkan momentum baru yang mengarah kepada perkembangan ekonomi dan masyarakat negara miskin, dan mengubah kehidupan rakyat miskin.

Apa yang kita maksudkan dengan “masyarakat informasi”? Kami mengartikan sesuatu masyarakat di mana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun, dipupuk, dan dibebaskan, dengan memberi akses kepada orang-orang terhadap peralatan dan teknologi yang mereka perlukan, dengan pendidikan dan pelatihan untuk

mobile telephones can be brought down. These assets — these bridges to a better life — can be made universally affordable and accessible. We must summon the will to do it.

The information society also depends on networks. The Internet is the result of, and indeed functions as, a unique and grand collaboration. If its benefits are to spread around the world, we must promote the same cooperative spirit among governments, the private sector, civil society and international organizations.

And of course, the information society's very life blood is freedom. It is freedom that enables citizens everywhere to benefit from knowledge, journalists to do their essential work, and citizens to hold government accountable. Without openness, without the right to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers, the information revolution will stall, and the information society we hope to build will be stillborn.

The time has come to move beyond broad discussions of the digital divide. By now, we know what the problems are. We must now get down to the specifics of implementation, and set out ways to foster and expand digital opportunities.

Those opportunities are immense. Already, in Africa and other developing regions, the rapid spread of mobile telephones and wireless telecommunication has spurred entrepreneurship, and helped small businesses take root, particularly those run and owned by women. Doctors in remote areas have gained access to medical information on tropical diseases. Students have been able to tap into world-wide databases of books and research. Early warning of natural disasters has improved, and relief workers have been able to provide quicker, better coordinated relief. The same opportunities - and other, new ones - can be given to many more people in the developing world.

The UN system is ready to help member states and all stakeholders to implement whatever decisions are taken at this Summit, including on Internet governance. But let me be absolutely clear: The United Nations does not want to "take over", police or otherwise control the Internet. The United Nations consists of you, its Member States. It can want only what you agree on. And as I understand it, what we are all striving for is to protect and strengthen the Internet, and to ensure that its benefits are available to all.

The United States deserves our thanks for having developed the Internet and making it available to the world. It has exercised its oversight responsibilities fairly and honourably. I believe all of you agree that day-to-day management of the Internet must be left to technical institutions, not least to shield it from the heat of day-to-day politics. But I

menggunakannya secara efektif. Rintangannya di sini adalah lebih kepada politik daripada keuangan. Biaya ketersambungan, komputer, dan telepon bergerak dapat diturunkan. Aset tersebut -jembatan kepada kehidupan yang lebih baik- dapat dibuat terjangkau dan terakses secara universal. Kita harus bertekad teguh untuk melakukannya.

Masyarakat Informasi juga tergantung kepada jaringan. Internet adalah hasil dari, dan tentunya berfungsi sebagai, sarana kolaborasi yang unik dan besar. Jika manfaatnya adalah untuk disebarluaskan ke seluruh dunia, kita harus mempromosikan semangat kerjasama yang sama antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

Dan tentunya, urat nadi masyarakat informasi adalah kebebasan. Kebebasanlah yang memungkinkan penduduk di mana pun untuk mengambil manfaat dari pengetahuan, para jurnalis untuk melakukan kerja penting mereka, dan penduduk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Tanpa keterbukaan, tanpa hak asasi untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan gagasan melalui media manapun serta tanpa menghiraukan garis batasan, revolusi informasi akan terhenti, dan masyarakat informasi yang dibangun seperti yang kita harapkan akan gagal.

Sudah tiba saatnya untuk beranjak melebihi diskusi luas tentang kesenjangan digital. Pada saat ini, kita sudah mengetahui apa permasalahannya. Sekarang kita harus terjun ke seluk beluk implementasi, dan menyusun cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan peluang digital.

Peluang-peluang ini adalah sangat luas. Sudah terlaksana, di Afrika dan wilayah berkembang lainnya, penyebaran secara cepat telepon bergerak dan telekomunikasi nirkabel telah memacu jiwa kewirausahaan, dan membantu bisnis kecil tumbuh, khususnya yang dijalankan dan dimiliki oleh perempuan. Dokter di daerah terpencil telah mendapatkan akses terhadap informasi medis tentang penyakit tropis. Para pelajar telah dapat menimba dari pusat informasi di seluruh dunia tentang buku-buku dan penelitian. Peringatan awal bencana alam telah membaik, dan petugas penolong telah dapat menyediakan pertolongan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi dengan baik. Peluang yang sama -dan lainnya, serta yang baru- dapat diberikan kepada lebih banyak orang di dunia (negara) berkembang.

Sistem PBB siap untuk membantu negara anggota dan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan apapun keputusan yang diambil pada KTT ini, termasuk terhadap pengelolaan Internet. Tetapi izinkan saya untuk memperjelas sepenuhnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menginginkan untuk "mengambil alih", menjadi polisi, atau mengontrol Internet. Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari Anda, Negara-negara Anggota. PBB hanya dapat menginginkan apa yang telah Anda sepakati. Dan sepengetahuan saya, apa yang masih kita perjuangkan adalah untuk melindungi dan memperkuat Internet, dan untuk memastikan bahwa manfaatnya tersedia untuk semua.

Amerika Serikat sepatutnya mendapatkan ucapan terimakasih dari kita karena telah mengembangkan Internet dan membuatnya tersedia di dunia. Amerika Serikat telah menjalankan tanggungjawabnya secara adil dan terhormat. Saya percaya kalian semua setuju bahwa manajemen Internet sehari-hari harus diserahkan kepada institusi teknis,

think you also all acknowledge the need for more international participation in discussions of Internet governance issues. The question is how to achieve this. So let those discussions continue.

This is envisaged in the agreements you reached last night and we in the United Nations will support this process in every way we can.

Mr. President,

The experiences of recent years - in this Summit process, the ICT Task Force, the Working Group on Internet Governance, the Digital Solidarity Fund, UNFIP — the UN Office for International Partnerships, the Global Compact corporate citizenship initiative and other efforts — have given us new insights into what it takes to build effective partnerships and platforms. UN agencies and departments continue to work hard to build capacity, and to use information technologies to boost our efforts to achieve the Millennium Development Goals.

These efforts are bearing fruit. But for far too many people, the gains remain out of reach. There is a tremendous yearning, not for technology per se, but for what technology can make possible. I urge you to respond to that thirst, and to take the tangible steps that will enable this Summit to be remembered as an event which advanced the causes of development, of dignity and of peace.

Thank you very much.

setidaknya untuk melindungi dari panasnya politik sehari-hari. Tetapi saya berpendapat bahwa anda juga mengakui kebutuhan akan lebih banyak partisipasi internasional dalam diskusi soal pengelolaan Internet. Pertanyaannya adalah bagaimana mencapai hal ini. Jadi biarkan diskusi tersebut berlanjut.

Hal ini digambarkan dalam persetujuan yang anda capai kemarin malam dan kami di Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mendukung proses ini melalui semua cara yang dapat kami lakukan.

Bapak Presiden,

Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya -dalam proses KTT ini, Satuan Kerja TIK, Kelompok Kerja Pengelolaan Internet, Dana Solidaritas Digital -Kantor PBB untuk Kemitraan Internasional, inisiatif kependudukan korporasi Padat Global dan usaha lainnya- telah memberi kita pandangan baru terhadap apa yang dibutuhkan untuk membangun kemitraan dan landasan pijak yang efektif. Perwakilan dan kantor-kantor PBB terus melanjutkan kerja keras untuk membangun kemampuan, dan untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendorong usaha kita mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Usaha-usaha itu sedang membuahkan hasil. Tetapi untuk jauh lebih banyak orang, hasil-hasil ini tetap tidak terjangkau. Ada hasrat yang sangat besar, bukan untuk pengembangan teknologi itu sendiri, tetapi untuk apa yang dimungkinkan oleh teknologi. Saya mendesak Anda untuk menanggapi kehausan tersebut, dan untuk mengambil langkah nyata yang memungkinkan KTT ini dikenang sebagai peristiwa yang menyebabkan mendorong kemajuan pembangunan, martabat, dan perdamaian.

Terima kasih banyak.

SECOND PHASE OF WSIS, 16-18 NOVEMBER, TUNIS

**STATEMENT BY H.E. DR. SOFYANA. DJALIL,
MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY**

REPUBLIC OF INDONESIA

Mr. President,

Liberalization of regulations on the information and communication sector can become an effective mechanism in any country for enhancing competition and providing the best services to the people utilizing the services. However, we have also to acknowledge that the same mechanism of liberalization can become detrimental if it is implemented unwisely without the necessary preparatory measure of building entities with equal or similar strengths.

Many developing countries, including Indonesia, have been successful in creating a competitive environment for developing second generation mobile cellular networks and services. However, we still face the challenge of liberalizing the fixed [] networks without hindering the future development of the information and communication network. This is a problem not only of developing countries but also of developed ones, particularly those committed to a fair and healthy competition in the provision of local fixed network services.

Moreover, Mr. President, most private companies and new entrants, both [] and foreign, tend to invest in new technologies for the urban areas, leaving the rural areas behind, widening the existing digital divide between the urban centres and the rural areas where most of the population live.

Mr. President,

I hope that in this second summit we will be able to set for ourselves the worthy goal of giving fifty percent of the villages access to internet or ICT services within the next 10 years. It is a very ambitious goal as most of the village people have not acquired the knowledge and capability to use these services. It is not just a matter of putting the facilities in place. The village people have to be educated and thereby prepared to benefit and create demand for ICT services in their rural communities.

As part of Indonesia's effort to increase the level of ICT penetration in schools and community access points, Indonesia has had substantial progress. For example, we

WSIS TAHAP KE DUA, 16-18 NOVEMBER, TUNIS

**PERNYATAAN OLEH Y.M. DR. SOFYANA. DJALIL,
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

REPUBLIK INDONESIA

Bapak Presiden,

Liberalisasi peraturan sektor informasi dan komunikasi dapat menjadi mekanisme efektif di negara manapun untuk memajukan kompetisi dan menyediakan layanan terbaik kepada orang yang menggunakan jasa tersebut. Namun, kita juga harus menyadari bahwa mekanisme pembebasan yang sama dapat merugikan bila dilaksanakan secara tidak bijaksana tanpa langkah persiapan yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan atau organisasi dengan kekuatan seimbang atau sama.

Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, telah berhasil dalam menciptakan lingkungan kompetisi untuk mengembangkan jaringan dan pelayanan selular bergerak generasi ke dua. Namun, kita masih menghadapi tantangan liberalisasi jaringan lokal tetap tanpa menghalangi perkembangan masa depan jaringan informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi masalah tak hanya di negara-negara berkembang tapi juga di negara-negara maju, khususnya yang berkomitmen terhadap kompetisi yang adil dan sehat dalam penyediaan pelayanan jaringan tetap lokal.

Lebih jauh, Bapak Presiden, sebagian besar perusahaan swasta dan semua peserta baru, baik lokal maupun asing, cenderung untuk menanamkan modal pada teknologi baru di daerah perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan, memperlebar kesenjangan digital yang ada antara pusat perkotaan dan daerah pedesaan di mana sebagian besar rakyat bermukim.

Bapak Presiden,

Saya berharap bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahap ke dua ini kita dapat menyusun bagi kita sendiri tujuan yang berharga untuk memberi akses terhadap internet atau pelayanan TIK kepada limapuluh persen dari desa-desa dalam kurun waktu 10 tahun. Ini adalah suatu tujuan yang sangat ambisius mengingat bahwa sebagian besar penduduk desa belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan jasa tersebut. Ini bukan hanya persoalan menggelar fasilitas. Penduduk desa harus dididik, dan oleh karena itu dipersiapkan untuk memperoleh manfaat dan menciptakan kebutuhan terhadap pelayanan TIK di masyarakat pedesaan mereka.

Sebagai bagian dari usaha Indonesia untuk meningkatkan tingkat penetrasi TIK di sekolah-sekolah dan pusat-pusat akses komunitas, Indonesia telah mencapai kemajuan

have been able to provide basic telephony services to more than 5.000 unserved villages under the Universal Service Obligation or USO programme. In light of the convergence of technology, we are also including Community Access Points or Internet Kiosks as part of our USO programme through the promotion of public-private partnership models. We are also vigorously promoting and supporting the one-school-one-laboratory programme and e-learning programme. Our key objective is to rapidly reaching a critical mass of Information Society members. To increase capacity, our government is preparing a national-wide high capacity backbone using submarine optical fibre around the Indonesian archipelago, stretching around 40.000 kilometres.

Mr. President,

In relation to our deliberations in this Summit, my delegation reaffirms our recognition that building an inclusive Information Society and bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable development for all requires new forms of solidarity, partnership and cooperation among governments and other stakeholders. It also requires a strong commitment by all of us.

My delegation would also like to lend its full support to the continuous role of the ITU, the UNDP, the UNESCO and other UN related organizations that have tremendously contributed to the growth of ICT in developing countries.

Mr. President,

I was gratified indeed to learn that this Tunis Summit was finally able to reach an agreement to mark the historic achievement of the WSIS process. This means, we could be certain about a brighter future development of the ICTs. Therefore, I must not fail to give high commend to all parties who have graciously shown their wisdom, hard works, and tolerant approach to make this Summit successful.

I sincerely wish that the second phase of WSIS will provide a strong basis for the smooth implementation of all political commitments to the Geneva Declaration. Furthermore, it is only realistic to expect that this Summit will also be able to lay down a monitoring mechanism for both the Geneva and Tunis Plans of Action, which will also serve to provide overall guidance in coordinating international and regional activities.

Finally, I join previous speakers in citing this Summit as an important stepping-stone to the achievement of the Millennium Development Goals.

I thank you.

besar. Sebagai contoh, kami telah dapat menyediakan pelayanan telepon dasar kepada lebih dari 5.000 desa tidak terjangkau pelayanan di bawah program Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) atau program USO. Dalam rangka konvergensi teknologi, kami juga memasukkan Pusat Akses Komunitas atau Warung Internet sebagai bagian dari program USO kami melalui pengenalan model kemitraan publik-swasta. Kami juga dengan gencar mempromosikan dan mendukung program satu sekolah - satu laboratorium dan program e-pembelajaran (e-learning). Maksud utama kami adalah untuk secara cepat mencapai massa kritis anggota Masyarakat Informasi. Untuk meningkatkan kapasitas, pemerintah kami sedang mempersiapkan tulang punggung komunikasi nasional berkapasitas tinggi dengan menggunakan kabel laut serat optik mengitari kepulauan Indonesia, terentang sekitar 40.000 kilometer.

Bapak Presiden,

Sehubungan dengan pembicaraan yang mendalam dalam KTT ini, perwakilan saya kembali menegaskan keyakinan kami bahwa membangun sebuah Masyarakat Informasi yang inklusif dan menjembatani kesenjangan digital serta memastikan pembangunan untuk semua yang selaras, adil, dan sederhana, membutuhkan bentuk solidaritas, kemitraan, dan kerjasama yang baru antar pemerintahan dan pihak berkepentingan lainnya. Hal ini juga membutuhkan komitmen kuat dari kita semua.

Perwakilan kami juga ingin memberi dukungan penuh terhadap peran yang berkesinambungan dari ITU, UNDP, UNESCO, dan organisasi PBB terkait lainnya yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan TIK di negara-negara berkembang.

Bapak Presiden,

Saya sangat bersyukur setelah mengetahui bahwa KTT Tunis akhirnya dapat mencapai persetujuan yang menandai sejarah keberhasilan proses WSIS. Ini berarti, kita dapat yakin mengenai masa depan perkembangan TIK yang lebih cerah. Oleh karena itu, saya tidak boleh gagal untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah sangat ramah menunjukkan kebijakan, kerja keras, dan pendekatan toleran untuk membuat KTT ini berhasil.

Saya secara tulus berharap bahwa WSIS tahap ke dua dapat menyediakan basis kuat bagi pelaksanaan yang mulus dari semua komitmen politik terhadap Deklarasi Geneva. Lebih lanjut lagi, adalah realistis untuk mengharapkan bahwa KTT ini akan dapat juga meletakkan mekanisme monitoring Rencana Aksi Geneva maupun Tunis, yang juga akan menyediakan pedoman menyeluruh dalam mengkoordinasikan kegiatan internasional dan regional.

Akhirnya, saya bergabung bersama para pembicara sebelumnya dalam menyatakan bahwa KTT ini adalah suatu batu-loncatan penting terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

Saya ucapkan terima kasih.

Table of Contents

Foreword	15
Geneva Declaration of Principles	16
A. Our Common Vision of the Information Society	17
B. An information Society for All: Key Principles	21
C. Towards an Information Society for All Based on Shared Knowledge	30
Geneva Plan of Action	32
A. Introduction	33
B. Objectives, goals and targets	34
C. Action Lines	36
D. Digital Solidarity Agenda	55
E. Follow-up and Evaluation	57
F. Towards WSIS Phase 2 (Tunis)	58
Tunis Commitment	60
Tunis Agenda for the Information Society	70
A. Introduction	71
B. Financial Mechanisms for Meeting the Challenges of ICTs for Development	71
C. Internet Governance	78
D. Implementation and follow-up	99
Annex	100

DAFTAR ISI

Prakata	15
Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva	16
A. Pandangan Bersama Kita Mengenai Masyarakat Informasi	17
B. Masyarakat Informasi untuk Semua Orang: Prinsip-Prinsip Utama	21
C. Menuju Masyarakat Informasi untuk Semua Orang Berdasarkan Pengetahuan yang Dibagi-pakai Bersama	30
Rencana Aksi Geneva	32
A. Pendahuluan.	33
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran	34
C. Arahkan Aksi	36
D. Agenda Solidaritas Digital	55
E. Tindak Lanjut dan Evaluasi	57
F. Menuju WSIS Tahap 2 (Tunis)	58
Komitmen Tunis	60
Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi	70
A. Pendahuluan	71
B. Mekanisme Keuangan untuk Memenuhi Tantangan-tantangan TIK dalam Pembangunan	71
C. Pengelolaan Internet	78
D. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut	89
Lampiran	100

FOREWORD

It is my great privilege to present the outcome documents from the World Summit on the Information Society (WSIS), which was held in two phases in Geneva, 10-12 December 2003 and in Tunis, 16-18 November 2005. This Summit represents a milestone, not only for the United Nations and the International Telecommunication Union, which played the leading managerial role in the Summit, but for all stakeholders involved. WSIS is a bold attempt to address the issues raised by information and communication technologies (ICTs) through a structured and inclusive approach.

Our society is changing radically as ICTs become a bigger part of our lives. It is changing in ways unimaginable seven years ago, when the Summit was first proposed by Tunisia at the 1998 ITU Plenipotentiary Conference. During those seven years, the Internet has increased in size ten-fold, while the number of mobile phone users has now grown to over two billion. I am proud to say that we are now in a better position to address these changes as a result of this agenda-setting Summit.

The Summit has achieved a common understanding of the key principles that will determine our ability to harness the potential of ICTs. In Geneva in 2003, world leaders shared the vision of a people-centred, development-oriented and inclusive Information Society, and committed to the Plan of Action setting out targets to be achieved from 2003. More than 1500 projects have been launched in the framework of the Summit, and these are recorded in the WSIS Stocktaking database and report, which will continue to be maintained by ITU.

In 2005, governments reaffirmed their dedication to the foundations of the Information Society in the *Tunis Commitment* and outlined the basis for implementation and follow-up in the *Tunis Agenda* for the Information Society. In particular, the *Tunis Agenda* addresses the issues of financing of ICTs for development and Internet governance that could not be resolved in the first phase. On Internet governance, the *Tunis Agenda* foresees the creation of a new Internet Governance Forum, which will carry the work forward.

The Summit has been notable in its adoption of a multi-stakeholder approach, and this is now carried forward in the implementation phase with the direct involvement of civil society and the private sector alongside governments and international organizations. The ITU-led Connect the World initiative is a good example of the role of multi-stakeholder partnerships in bridging the digital divide.

It is my hope that the lasting legacy of the World Summit on the Information Society will be the vision of an inclusive Information Society, in which everyone has the means to express their ideas, and be heard. For then, we will know that WSIS has truly succeeded in what it set out to achieve.

Yoshio UTSUMI



Secretary-General of the World Summit on the Information Society (WSIS)
Secretary-General of the International Telecommunication Union (ITU)

www.itu.int/wsif/

PRAKATA

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mempersembahkan dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia mengenai Masyarakat Informasi (*World Summit on the Information Society = WSIS*) yang diadakan dalam 2 tahap, di Geneva 10-12 Desember 2003, dan di Tunis 16-18 November 2005. KTT ini mewakili suatu kejadian penting, tidak hanya bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Union = ITU*), yang berperan utama sebagai pemimpin sidang, tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. WSIS adalah suatu usaha yang berani untuk menempatkan masalah-masalah yang timbul dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - (*information and communication technologies = ICTs*) melalui pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh.

Masyarakat kita berubah secara drastis sejak TIK menjadi bagian yang lebih besar dalam hidup kita. Kehidupan masyarakat berubah melalui cara-cara yang tidak pernah terbayangkan tujuh tahun yang lalu, ketika rencana KTT ini pertama kali diajukan oleh Tunisia pada KTT ITU (ITU Plenipotentiary Conference) tahun 1998. Selama tujuh tahun tersebut, penggunaan internet telah meningkat skalanya hingga sepuluh kali, sementara pengguna telepon bergerak juga telah tumbuh hingga lebih dari dua miliar. Dengan bangga saya katakan bahwa kita sekarang berada dalam posisi yang lebih baik untuk membahas perubahan-perubahan tersebut, berkat hasil penempatan agenda KTT ini.

KTT ini telah mencapai kesepakatan bersama terhadap prinsip-prinsip utama yang akan menentukan kemampuan kita untuk mengendalikan potensi TIK. Di Geneva tahun 2003, para pemimpin dunia telah berbagi visi mengenai Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, inklusif dan berorientasi pada perkembangan, serta berkomitmen pada *Rencana Aksi* untuk menyusun sasaran pencapaian sejak tahun 2003. Lebih dari 2500 proyek telah diluncurkan di dalam kerangka kerja sidang, dan semuanya telah dimasukkan ke dalam data dan laporan *WSIS Stocktaking*, yang akan terus dipelihara oleh ITU.

Pada tahun 2005, para pemerintah kembali menegaskan dedikasi mereka kepada fondasi Masyarakat Informasi di *Komitmen Tunis* dan menetapkan arahan dasar untuk implementasi dan tindak lanjut dalam *Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi*. Secara khusus, *Agenda Tunis* mengangkat isu-isu dalam pembiayaan pengembangan TIK dan pengelolaan internet yang belum dapat diselesaikan di tahap pertama. Untuk pengelolaan internet, *Agenda Tunis* melihat akan adanya pendirian suatu Forum Pengelolaan Internet (Internet Governance Forum = IGF), yang akan meluncurkan pekerjaan ini di masa mendatang.

KTT ini telah mengambil langkah yang berarti dalam melakukan pendekatan bagi para pemangku kepentingan, dan mulai saat ini tahap implementasinya mulai dijalankan ke depan dengan melibatkan langsung masyarakat umum dan sektor swasta, dan berjalan bersama pemerintah negara dan organisasi-organisasi internasional. Prakarsa Menghubungkan Seluruh Dunia (Connect the World) yang diketuai oleh ITU adalah suatu contoh baik dimana para pemangku kepentingan melakukan kerjasama kemitraan dalam peran menjembatani kesenjangan digital.

Harapan saya adalah bahwa warisan abadi KTT Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) akan menjadi visi Masyarakat Informasi yang inklusif, dimana semua orang memiliki sarana untuk mengungkapkan ide mereka, dan didengar. Pada saat tersebut, kita akan mengetahui bahwa WSIS telah mencapai keberhasilan dalam tujuannya.

Yoshio UTSUMI



Sekretaris Jenderal KTT Dunia Mengenai Masyarakat Informasi (WSIS)
Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU)

www.itu.int/wsif/
Deklarasi Prinsip

GENEVA
DECLARATION PRINCIPLES

GENEVA
DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP

Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium

A. Our Common Vision of the Information Society

1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10-12 December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the *Charter of the United Nations* and respecting fully and upholding the *Universal Declaration of Human Rights*.

2. Our challenge is to harness the potential of information and communication technology to promote the development goals of the *Millennium Declaration*, namely the eradication of extreme poverty and hunger; achievement of universal primary education; promotion of gender equality and empowerment of women; reduction of child mortality; improvement of maternal health; to combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; ensuring environmental sustainability; and development of global partnerships for development for the attainment of a more peaceful, just and prosperous world. **We also reiterate** our commitment to the achievement of sustainable development and agreed development goals, as contained in the *Johannesburg Declaration* and *Plan of Implementation* and the *Monterrey Consensus*, and other outcomes of relevant United Nations Summits.

3. We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the *Vienna Declaration*. **We also reaffirm** that democracy, sustainable development, and respect for human rights and fundamental freedoms as well as good

Membangun Masyarakat Informasi: suatu tantangan global dalam Milenium baru

A. Pandangan Bersama Kita mengenai Masyarakat Informasi

1. Kita, wakil dari bangsa-bangsa di dunia, yang berkumpul di Geneva dari tanggal 10-12 Desember 2003 untuk melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia mengenai Masyarakat Informasi tahap pertama, menyatakan keinginan dan komitmen untuk membangun sebuah Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, inklusif dan berorientasi pada pengembangan, di mana semua orang dapat menciptakan, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi dan pengetahuan, yang memungkinkan individu-individu, komunitas-komunitas, dan bangsa-bangsa untuk mencapai kemampuan penuh mereka dalam rangka mempromosikan pembangunan yang berkesinambungan dan memperbaiki kualitas hidup mereka, dengan mendasarkan pemikiran kepada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* serta sepenuhnya menghormati dan menjunjung tinggi *Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia*.

2. Tantangan kita adalah untuk mengendalikan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan tujuan-tujuan pembangunan sesuai dengan *Deklarasi Milenium*, yaitu mengurangi masalah kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; pencapaian pendidikan dasar yang universal; mengangkat kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan; penurunan kematian anak; perbaikan kesehatan keibuan; memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya; membina kesinambungan lingkungan; dan pengembangan kerjasama global untuk mencapai dunia yang lebih damai, adil, dan makmur. **Kita juga menyatakan kembali** komitmen terhadap pencapaian pembangunan yang berkesinambungan dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama, seperti yang tercantum di dalam *Deklarasi dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg* dan *Konsensus Monterrey*, serta hasil-hasil lain dari KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.

3. Kita menegaskan kembali keuniversalan, keutuhan, saling ketergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia serta kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkembang, seperti yang tertulis di dalam *Deklarasi Vienna*. **Kita juga menegaskan kembali** bahwa baik demokrasi, pengembangan yang berkesinambungan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan

governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing. **We further resolve** to strengthen respect for the rule of law in international as in national affairs.

4. We reaffirm, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in *Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights*, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Communication is a fundamental social process, a basic human need and the foundation of all social organization. It is central to the Information Society. Everyone, everywhere should have the opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society offers.

5. We further reaffirm our commitment to the provisions of *Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights*, that everyone has duties to the community in which alone the free and full development of their personality is possible, and that, in the exercise of their rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. In this way, **we shall promote** an Information Society where human dignity is respected.

6. In keeping with the spirit of this declaration, **we rededicate ourselves** to upholding the principle of the sovereign equality of all States.

7. We recognize that science has a central role in the development of the Information Society. Many of the building blocks of the Information Society are the result of scientific and technical advances made possible by the sharing of research results.

8. We recognize that education, knowledge, information and communication are at the core of human progress, endeavour and well-being. Further, Information and Communication Technologies (ICTs) have an immense impact on virtually all aspects of our lives. The rapid progress of these technologies opens completely new opportunities to attain higher levels of development. The capacity of these technologies to reduce many traditional obstacles, especially those of time and distance, for the first time in history makes it possible to use the potential of these technologies for the benefit of millions of people in all corners of the world.

fundamental serta sistem pengelolaan yang baik pada semua tingkatan adalah saling tergantung dan saling menguatkan. **Kita selanjutnya berketetapan** untuk lebih menghormati peraturan perundang-undangan dalam masalah-masalah internasional maupun nasional.

4. Kita menegaskan kembali, landasan pokok Masyarakat Informasi, dan seperti yang tertulis dalam *Artikel 19 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia*, bahwa semua orang memiliki hak kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berbicara; bahwa hak ini mencakup pula kebebasan berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa batasan apapun. Komunikasi adalah proses sosial yang fundamental, suatu kebutuhan dasar manusia, dan dasar semua organisasi sosial. Komunikasi merupakan inti Masyarakat Informasi. Setiap orang, di mana pun harus mendapatkan peluang untuk turut serta dan tidak satu pun boleh dikecualikan dari manfaat yang ditawarkan oleh Masyarakat Informasi.

5. Kita selanjutnya menegaskan kembali komitmen terhadap ketetapan *Artikel 29 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia*, bahwa tiap orang memiliki kewajiban terhadap komunitas di mana pengembangan pribadi mereka secara penuh dan bebas dimungkinkan, dan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan mereka, setiap orang hanya dibatasi oleh hukum yang khusus telah ditetapkan dengan maksud untuk menjamin penghargaan dan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketentuan yang adil bagi moral, ketertiban dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sama sekali tidak boleh digunakan bertentangan dengan maksud dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan cara ini, **kita akan mempromosikan** terbentuknya Masyarakat Informasi di mana martabat manusia dihormati.

6. Dalam mempertahankan semangat deklarasi ini, **kita mendedikasikan diri kembali** untuk menegakkan prinsip persamaan kedaulatan semua negara.

7. Kita mengakui bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran utama dalam pembangunan Masyarakat Informasi. Banyak dari segi-segi bangunan Masyarakat Informasi adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimungkinkan melalui pertukaran hasil-hasil riset.

8. Kita mengakui bahwa pendidikan, pengetahuan, informasi, dan komunikasi, adalah inti kemajuan, usaha, dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan kita. Cepatnya kemajuan teknologi-teknologi ini sepenuhnya membuka kesempatan-kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Kemampuan teknologi-teknologi ini untuk mengurangi banyaknya kendala tradisional, khususnya kendala waktu dan jarak, untuk pertama kalinya dalam sejarah memungkinkan penggunaan potensi teknologi tersebut bagi manfaat jutaan manusia di seluruh penjuru dunia.

9. We are aware that ICTs should be regarded as tools and not as an end in themselves. Under favourable conditions, these technologies can be a powerful instrument, increasing productivity, generating economic growth, job creation and employability and improving the quality of life of all. They can also promote dialogue among people, nations and civilizations.

10. We are also fully aware that the benefits of the information technology revolution are today unevenly distributed between the developed and developing countries and within societies. **We are fully committed** to turning this digital divide into a digital opportunity for all, particularly for those who risk being left behind and being further marginalized.

11. We are committed to realizing our common vision of the Information Society for ourselves and for future generations. **We recognize** that young people are the future workforce and leading creators and earliest adopters of ICTs. They must therefore be empowered as learners, developers, contributors, entrepreneurs and decision-makers. **We must focus** especially on young people who have not yet been able to benefit fully from the opportunities provided by ICTs. **We are also committed** to ensuring that the development of ICT applications and operation of services respects the rights of children as well as their protection and well-being.

12. We affirm that development of ICTs provides enormous opportunities for women, who should be an integral part of, and key actors, in the Information Society. **We are committed** to ensuring that the Information Society enables women's empowerment and their full participation on the basis of equality in all spheres of society and in all decision-making processes. To this end, **we should mainstream** a gender equality perspective and use ICTs as a tool to that end.

13. In building the Information Society, **we shall pay particular attention** to the special needs of marginalized and vulnerable groups of society, including migrants, internally displaced persons and refugees, unemployed and underprivileged people, minorities and nomadic people. **We shall also recognize** the special needs of older persons and persons with disabilities.

14. We are resolute to empower the poor, particularly those living in remote, rural and marginalized urban areas, to access information and to use ICTs as a tool to support their efforts to lift themselves out of poverty.

9. Kita menyadari bahwa TIK selayaknya dianggap sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Dalam keadaan yang menguntungkan, teknologi-teknologi tersebut dapat menjadi perangkat yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup semua orang. Teknologi ini juga dapat mempromosikan dialog antar sesama manusia, negara, dan kebudayaan.

10. Kita juga menyadari sepenuhnya bahwa manfaat dari revolusi teknologi informasi pada saat ini telah didistribusi tidak merata antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang serta di antara lingkungan masyarakat. **Kita berkomitmen sepenuhnya** untuk mengubah kesenjangan digital ini menjadi suatu peluang digital untuk semua orang, khususnya bagi mereka yang berisiko tertinggal dan semakin terpinggirkan.

11. Kita memiliki komitmen untuk merealisasikan visi bersama terhadap Masyarakat Informasi untuk kita sendiri dan untuk generasi mendatang. **Kita mengakui** bahwa generasi muda adalah tenaga kerja di masa mendatang dan pencipta utama serta pemakai awal TIK. Oleh karena itu mereka harus diberdayakan sebagai pembelajar, pengembang, penyumbang karya, pengusaha, dan pembuat keputusan. **Kita harus memusatkan perhatian** khusus pada generasi muda yang belum dapat sepenuhnya memperoleh manfaat dari peluang yang disediakan TIK. **Kita juga berkomitmen** untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi dan penyelenggaraan jasa TIK menghormati hak-hak anak serta perlindungan dan kesejahteraan mereka

12. Kita menegaskan bahwa perkembangan TIK akan menyediakan peluang sangat besar untuk perempuan, yang seharusnya menjadi bagian integral, dan pemeran kunci di dalam Masyarakat Informasi. **Kita memiliki komitmen** untuk memastikan bahwa Masyarakat Informasi mampu memberdayakan perempuan dan peranserta penuh mereka yang didasari oleh persamaan hak di dalam semua lingkungan masyarakat dan di dalam semua proses pengambilan keputusan. Untuk tujuan ini, **kita harus mengarus-utamakan** perspektif persamaan hak antar gender dan mempergunakan TIK sebagai perangkat untuk mencapai tujuan tersebut.

13. Dalam membangun Masyarakat Informasi, **kita akan memberikan perhatian khusus** kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan lemah, termasuk juga para imigran, para pelarian yang dalam pengasingan, para pengungsi, pengangguran dan orang-orang yang berkekurangan, minoritas, dan para pengembara. **Kita juga harus memperhatikan** kebutuhan-kebutuhan khusus bagi para lanjut usia dan orang-orang cacat.

14. Kita berketetapan untuk memberdayakan orang miskin, terutama yang tinggal di daerah terpencil, di pedesaan, dan di pinggir kota, untuk mengakses informasi dan menggunakan TIK sebagai sarana untuk mendukung usaha-usaha dalam mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan.

15. In the evolution of the Information Society, particular attention must be given to the special situation of indigenous peoples, as well as to the preservation of their heritage and their cultural legacy.

16. We continue to pay special attention to the particular needs of people of developing countries, countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under occupation, countries recovering from conflict and countries and regions with special needs as well as to conditions that pose severe threats to development, such as natural disasters.

17. We recognize that building an inclusive Information Society requires new forms of solidarity, partnership and cooperation among governments and other stakeholders, i.e. the private sector, civil society and international organizations. Realizing that the ambitious goal of this Declaration-bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable development for all-will require strong commitment by all stakeholders, **we call for** digital solidarity, both at national and international levels.

18. Nothing in this Declaration shall be construed as impairing, contradicting, restricting or derogating from the provisions of the *Charter of the United Nations* and the *Universal Declaration of Human Rights*, any other international instrument or national laws adopted in furtherance of these instruments.

15. Di dalam evolusi Masyarakat Informasi, harus diberikan perhatian khusus kepada penduduk pribumi, serta terhadap pelestarian pusaka dan warisan budaya mereka.

16. Kita akan terus memberikan perhatian istimewa pada kebutuhan khusus penduduk negara-negara berkembang, negara dengan perekonomian dalam transisi, negara terbelakang, negara berkembang kepulauan kecil, negara berkembang tanpa pantai, negara miskin yang terbelit banyak hutang, negara dan wilayah yang diduduki, negara yang sedang dalam pemulihan akibat konflik, dan negara serta wilayah dengan kebutuhan khusus serta pada kondisi yang memiliki ancaman berat terhadap pembangunan seperti bencana alam.

17. Kita mengakui bahwa untuk membangun Masyarakat Informasi yang inklusif memerlukan bentuk solidaritas yang baru, kemitraan dan kerjasama antar pemerintah dan semua yang berkepentingan, seperti pihak swasta, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional. Menyadari bahwa tujuan besar Deklarasi ini - menjembatani kesenjangan digital dan memastikan pembangunan yang selaras, adil, dan merata untuk semua - akan membutuhkan komitmen yang kuat bagi semua yang berkepentingan, **kita menyerukan adanya** solidaritas digital, baik di tingkat nasional maupun internasional.

18. Tiada satupun dalam Deklarasi ini yang harus ditafsirkan sebagai mengganggu, menentang, melarang, atau menghina ketentuan *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan *Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia*, perangkat hukum internasional lainnya, atau hukum nasional yang didasari perangkat hukum tersebut.

B. An Information Society for All: Key Principles

19. We are resolute in our quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that ICTs can offer. **We agree** that to meet these challenges, all stakeholders should work together to: improve access to information and communication infrastructure and technologies as well as to information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information Society; and encourage international and regional cooperation. **We agree** that these are the key principles for building an inclusive Information Society.

1) The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development

20. Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other international organizations have an important role and responsibility in the development of the Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centred Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all stakeholders.

2) Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society

21. Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. Universal, ubiquitous, equitable and affordable access to ICT infrastructure and services, constitutes one of the challenges of the Information Society and should be an objective of all stakeholders involved in building it. Connectivity also involves access to energy and postal services, which should be assured in conformity with the domestic legislation of each country.

22. A well-developed information and communication network infrastructure and applications, adapted to regional, national and local conditions, easily-accessible and affordable, and making greater use of broadband and other innovative technologies where possible, can accelerate the social and economic progress of countries, and the well-being of all individuals, communities and peoples.

23. Policies that create a favourable climate for stability, predictability and fair competition at all levels should be developed and implemented in a manner that not only

B. Satu Masyarakat Informasi untuk Semua Orang: Prinsip-Prinsip Utama

19. Kita bersikap teguh dalam usaha untuk memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaat dari kesempatan yang dapat diperoleh dari TIK. **Kita setuju** bahwa untuk memenuhi tantangan ini, semua pemangku kepentingan harus bekerjasama untuk: memperbaiki akses pada infrastruktur informasi dan komunikasi serta teknologi, serta pada informasi dan pengetahuan; mengembangkan kemampuan; meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK; menciptakan lingkungan yang mendukung di semua tingkatan; mengembangkan dan memperluas penggunaan TIK; memelihara dan menghormati keragaman budaya; mengakui peran media; menangani dimensi etika Masyarakat Informasi; dan mendorong kerjasama internasional dan regional. **Kita setuju** bahwa ini adalah prinsip-prinsip utama dalam membangun Masyarakat Informasi yang inklusif.

1) Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan

20. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya memiliki peran dan tanggung jawab utama dalam pengembangan Masyarakat Informasi, dan dalam proses pengambilan keputusan sesuai kebutuhan. Membangun Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia merupakan suatu usaha bersama yang membutuhkan kerjasama dan kemitraan antar semua pemangku kepentingan.

2) Infrastruktur informasi dan komunikasi: suatu fondasi esensial untuk Masyarakat Informasi yang inklusif

21. Konektivitas merupakan sarana pemberdaya utama yang memungkinkan pembangunan Masyarakat Informasi. Akses untuk infrastruktur dan jasa TIK yang universal, merata, adil, serta terjangkau, merupakan salah satu tantangan untuk Masyarakat Informasi dan harus menjadi tujuan semua pemangku kepentingan untuk membangunnya. Konektivitas juga melibatkan akses untuk jasa energi dan pos, yang harus terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik setiap negara.

22. Jaringan infrastruktur serta aplikasi informasi dan komunikasi yang telah berkembang dengan baik, disesuaikan dengan kondisi regional, nasional, dan kondisi lokal, mudah diakses serta terjangkau, dan menggunakan lebih banyak pita lebar dan teknologi inovatif lainnya di mana mungkin, dapat mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi negara-negara, dan kesejahteraan semua individu, komunitas, dan rakyat.

23. Kebijakan yang menciptakan iklim yang menguntungkan untuk stabilitas, kepastian, dan persaingan sehat pada semua tingkatan harus dikembangkan dan dijalankan

attracts more private investment for ICT infrastructure development but also enables universal service obligations to be met in areas where traditional market conditions fail to work. In disadvantaged areas, the establishment of ICT public access points in places such as post offices, schools, libraries and archives, can provide effective means for ensuring universal access to the infrastructure and services of the Information Society.

3) Access to information and knowledge

24. The ability for all to access and contribute information, ideas and knowledge is essential in an inclusive Information Society.

25. The sharing and strengthening of global knowledge for development can be enhanced by removing barriers to equitable access to information for economic, social, political, health, cultural, educational, and scientific activities and by facilitating access to public domain information, including by universal design and the use of assistive technologies.

26. A rich public domain is an essential element for the growth of the Information Society, creating multiple benefits such as an educated public, new jobs, innovation, business opportunities, and the advancement of sciences. Information in the public domain should be easily accessible to support the Information Society, and protected from misappropriation. Public institutions such as libraries and archives, museums, cultural collections and other community-based access points should be strengthened so as to promote the preservation of documentary records and free and equitable access to information.

27. Access to information and knowledge can be promoted by increasing awareness among all stakeholders of the possibilities offered by different software models, including proprietary, open-source and free software, in order to increase competition, access by users, diversity of choice, and to enable all users to develop solutions which best meet their requirements. Affordable access to software should be considered as an important component of a truly inclusive Information Society.

28. We strive to promote universal access with equal opportunities for all to scientific knowledge and the creation and dissemination of scientific and technical information, including open access initiatives for scientific publishing.

dengan cara yang tidak hanya akan menarik lebih banyak investasi swasta bagi pengembangan infrastruktur TIK, tetapi juga memungkinkan kewajiban pelayanan universal untuk memenuhi kebutuhan di daerah-daerah di mana kondisi pasar tradisional gagal berfungsi. Di daerah-daerah yang tidak menguntungkan, pendirian pusat-pusat akses TIK untuk umum di tempat-tempat seperti kantor pos, sekolah, perpustakaan dan arsip, dapat menyediakan sarana efektif untuk menjamin akses universal pada infrastruktur dan jasa untuk Masyarakat Informasi.

3) Akses ke Informasi dan Pengetahuan

24. Kemampuan semua orang untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan, adalah sangat penting dalam suatu Masyarakat Informasi yang inklusif.

25. Berbagi dan memperkuat pengetahuan global untuk pengembangan dapat ditingkatkan dengan menyingkirkan rintangan terhadap akses ke informasi yang sederhana untuk kegiatan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, serta kegiatan ilmiah, dan dengan memudahkan akses ke informasi ranah publik, termasuk melalui desain universal dan penggunaan teknologi pendukung.

26. Ranah publik yang beragam merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan Masyarakat Informasi, dengan menciptakan manfaat ganda seperti masyarakat terdidik, lapangan kerja baru, inovasi, peluang bisnis, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Informasi di dalam ranah publik harus mudah diakses untuk mendukung Masyarakat Informasi, dan dilindungi dari penyalahgunaannya. Institusi umum seperti perpustakaan dan arsip, museum, koleksi kebudayaan, dan titik akses komunitas umum lainnya, harus diperkuat untuk mempromosikan pemeliharaan pencatatan dokumentasi serta akses informasi yang bebas dan adil.

27. Akses ke informasi dan pengetahuan dapat dipromosikan dengan meningkatkan kesadaran antar sesama pemangku kepentingan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh berbagai model perangkat lunak yang berbeda-beda, termasuk perangkat kepemilikan intelektual, sumber/kode terbuka, dan bebas, dalam rangka meningkatkan persaingan, akses bagi pemakai, keragaman pilihan, dan untuk memungkinkan semua pemakai mengembangkan solusi terbaik dalam mencapai kebutuhan mereka. Akses perangkat lunak yang terjangkau juga harus dipertimbangkan sebagai komponen penting dalam Masyarakat Informasi yang inklusif.

28. Kita berjuang untuk mempromosikan akses universal dengan peluang yang sama untuk semua ke arah pengetahuan ilmiah dan penciptaan serta penyebaran informasi ilmiah dan teknis, termasuk inisiatif akses terbuka untuk penerbitan ilmiah.

4) Capacity building

29. Each person should have the opportunity to acquire the necessary skills and knowledge in order to understand, participate actively in, and benefit fully from, the Information Society and the knowledge economy. Literacy and universal primary education are key factors for building a fully inclusive information society, paying particular attention to the special needs of girls and women. Given the wide range of ICT and information specialists required at all levels, building institutional capacity deserves special attention.

30. The use of ICTs in all stages of education, training and human resource development should be promoted, taking into account the special needs of persons with disabilities and disadvantaged and vulnerable groups.

31. Continuous and adult education, re-training, life-long learning, distance-learning and other special services, such as telemedicine, can make an essential contribution to employability and help people benefit from the new opportunities offered by ICTs for traditional jobs, self-employment and new professions. Awareness and literacy in ICTs are an essential foundation in this regard.

32. Content creators, publishers, and producers, as well as teachers, trainers, archivists, librarians and learners, should play an active role in promoting the Information Society, particularly in the Least Developed Countries.

33. To achieve a sustainable development of the Information Society, national capability in ICT research and development should be enhanced. Furthermore, partnerships, in particular between and among developed and developing countries, including countries with economies in transition, in research and development, technology transfer, manufacturing and utilization of ICT products and services are crucial for promoting capacity building and global participation in the Information Society. The manufacture of ICTs presents a significant opportunity for creation of wealth.

34. The attainment of our shared aspirations, in particular for developing countries and countries with economies in transition, to become fully-fledged members of the Information Society, and their positive integration into the knowledge economy, depends largely on increased capacity building in the areas of education, technology know-how and access to information, which are major factors in determining development and competitiveness.

4) Pembangunan Kemampuan

29. Setiap orang harus mempunyai peluang untuk memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi aktif, dan mendapatkan manfaat sepenuhnya, dari Masyarakat Informasi dan Masyarakat/Ekonomi yang Berpengetahuan. Melek huruf dan pendidikan dasar universal adalah faktor kunci untuk membangun Masyarakat Informasi yang inklusif sepenuhnya, dengan memberikan perhatian istimewa terhadap kebutuhan anak-anak gadis dan perempuan dewasa. Dengan luasnya cakupan bidang TIK dan ahli-ahli informasi yang diperlukan di semua tingkatan, maka pengembangan kemampuan institusional memerlukan perhatian istimewa.

30. Penggunaan TIK di semua tingkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia harus didorong, dengan memperhitungkan pula kebutuhan khusus kelompok orang-orang cacat dan berkekurangan, serta rapuh.

31. Pendidikan untuk orang dewasa dan yang berkesinambungan, pelatihan ulang, pembelajaran seumur hidup, belajar jarak jauh, dan pelayanan khusus lainnya, seperti telemedicine, dapat memberikan kontribusi penting terhadap ketenagakerjaan serta membantu orang mendapatkan manfaat dari peluang-peluang baru yang ditawarkan oleh TIK untuk berbagai pekerjaan tradisional, swakarya dan profesi-profesi baru. Sadar akan TIK dan melek huruf adalah fondasi penting dalam masalah ini.

32. Pencipta konten, penerbit, produser, serta para guru, pelatih, juru arsip, pustakawan, dan pelajar, harus berperan aktif dalam memajukan Masyarakat Informasi, khususnya di negara-negara yang terbelakang.

33. Untuk mencapai pengembangan Masyarakat Informasi yang berkesinambungan, kemampuan nasional di bidang penelitian dan pengembangan TIK harus ditingkatkan. Selanjutnya, kemitraan, khususnya antar negara-negara maju dan berkembang, termasuk negara-negara dengan Masyarakat/Ekonomi dalam transisi, dalam penelitian dan pengembangan, alih teknologi, pembuatan dan penggunaan produk-produk serta jasa TIK sangatlah penting untuk mendorong pengembangan kemampuan dan partisipasi global dalam Masyarakat Informasi. Pembuatan peralatan TIK memberikan peluang yang berarti dalam menciptakan kemakmuran.

34. Pencapaian aspirasi bersama, khususnya untuk negara-negara berkembang dan negara-negara dengan Masyarakat/Ekonomi yang masih dalam transisi, untuk menjadi anggota Masyarakat Informasi sepenuhnya, dan integrasi positif mereka dalam Masyarakat/Ekonomi yang berpengetahuan, sebagian besar bergantung pada peningkatan pengembangan kemampuan di sektor pendidikan, pengetahuan teknologi, dan akses informasi, yang merupakan faktor-faktor utama dalam menentukan pembangunan dan daya saing.

5) Building confidence and security in the use of ICTs

35. Strengthening the trust framework, including information security and network security, authentication, privacy and consumer protection, is a prerequisite for the development of the Information Society and for building confidence among users of ICTs. A global culture of cyber-security needs to be promoted, developed and implemented in cooperation with all stakeholders and international expert bodies. These efforts should be supported by increased international cooperation. Within this global culture of cyber-security, it is important to enhance security and to ensure the protection of data and privacy, while enhancing access and trade. In addition, it must take into account the level of social and economic development of each country and respect the development-oriented aspects of the Information Society.

36. While recognizing the principles of universal and non-discriminatory access to ICTs for all nations, **we support** the activities of the United Nations to prevent the potential use of ICTs for purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security, and may adversely affect the integrity of the infrastructure within States, to the detriment of their security. It is necessary to prevent the use of information resources and technologies for criminal and terrorist purposes, while respecting human rights.

37. Spam is a significant and growing problem for users, networks and the Internet as a whole. Spam and cyber-security should be dealt with at appropriate national and international levels.

6) Enabling environment

38. An enabling environment at national and international levels is essential for the Information Society. ICTs should be used as an important tool for good governance.

39. The rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologically neutral and predictable policy and regulatory framework reflecting national realities, is essential for building a people-centred Information Society. Governments should intervene, as appropriate, to correct market failures, to maintain fair competition, to attract investment, to enhance the development of the ICT infrastructure and applications, to maximize economic and social benefits, and to serve national priorities.

40. A dynamic and enabling international environment, supportive of foreign direct investment, transfer of technology, and international cooperation, particularly in the areas of finance, debt and trade, as well as full and effective participation of developing countries in global decision-making, are vital complements to national development efforts related to ICTs. Improving global affordable connectivity would contribute signifi-

5) Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK

35. Memperkuat pola kepercayaan, termasuk keamanan informasi dan keamanan jaringan, otentikasi, perlindungan privasi dan konsumen, adalah persyaratan dalam pengembangan Masyarakat Informasi dan untuk membangun kepercayaan antar pengguna TIK. Budaya global untuk keamanan dunia maya perlu ditingkatkan, dikembangkan, dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dan badan-badan ahli internasional. Usaha-usaha ini harus didukung dengan peningkatan kerjasama internasional. Di dalam budaya global untuk keamanan dunia maya, penting untuk meningkatkan pengamanan dan menjamin perlindungan data dan privasi, sambil meningkatkan akses dan perdagangan. Ditambah lagi, harus diperhitungkan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi setiap negara serta menghormati aspek yang berorientasi pembangunan Masyarakat Informasi.

36. Dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal dan akses non diskriminatif TIK untuk semua negara, **kita mendukung** kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah adanya penggunaan potensi TIK yang tidak konsisten dengan maksud pemeliharaan kestabilan dan keamanan internasional, serta mempunyai pengaruh yang merugikan integritas infrastruktur dalam negeri, hingga menyebabkan gangguan keamanan. Adalah perlu untuk mencegah penggunaan sumber daya dan teknologi informasi untuk keperluan maksud-maksud kriminal dan teroris, sambil menghormati hak asasi manusia.

37. Spam adalah masalah yang berarti dan terus meningkat bagi para pengguna, jaringan dan Internet secara keseluruhan. Spam dan keamanan dunia maya harus ditangani dengan tepat di tingkat nasional dan internasional.

6) Lingkungan yang memberdayakan

38. Lingkungan yang memberdayakan di tingkat nasional dan internasional sangatlah penting bagi Masyarakat Informasi. TIK harus dipergunakan sebagai alat penting untuk pengelolaan yang baik.

39. Peraturan perundangan, disertai dengan kebijakan yang mendukung, transparan, pro kompetitif, netral secara teknologi dan dapat diperkirakan, serta pola pengaturan mencerminkan realitas nasional, adalah penting dalam membangun Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia. Pemerintah harus campur tangan, sesuai kebutuhan, untuk memperbaiki kegagalan pasar, menjaga persaingan yang adil, menarik investasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aplikasi TIK, memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial, serta untuk melayani prioritas nasional.

40. Lingkungan internasional yang dinamis dan memberdayakan, mendukung investasi asing langsung, alih teknologi, serta kerjasama internasional, khususnya di bidang keuangan, hutang dan perdagangan, serta partisipasi penuh dan efektif dari negara-negara berkembang dalam membuat keputusan global, adalah pelengkap vital dalam usaha pembangunan nasional yang berhubungan dengan TIK. Meningkatkan

cantly to the effectiveness of these development efforts.

41. ICTs are an important enabler of growth through efficiency gains and increased productivity, in particular by small and medium sized enterprises (SMEs). In this regard, the development of the Information Society is important for broadly-based economic growth in both developed and developing economies. ICT-supported productivity gains and applied innovations across economic sectors should be fostered. Equitable distribution of the benefits contributes to poverty eradication and social development. Policies that foster productive investment and enable firms, notably SMEs, to make the changes needed to seize the benefits from ICTs, are likely to be the most beneficial.

42. Intellectual Property protection is important to encourage innovation and creativity in the Information Society; similarly, the wide dissemination, diffusion, and sharing of knowledge is important to encourage innovation and creativity. Facilitating meaningful participation by all in intellectual property issues and knowledge sharing through full awareness and capacity building is a fundamental part of an inclusive Information Society.

43. Sustainable development can best be advanced in the Information Society when ICT-related efforts and programmes are fully integrated in national and regional development strategies. **We welcome the New Partnership for Africa's Development (NEPAD)** and encourage the international community to support the ICT-related measures of this initiative as well as those belonging to similar efforts in other regions. Distribution of the benefits of ICT-driven growth contributes to poverty eradication and sustainable development.

44. Standardization is one of the essential building blocks of the Information Society. There should be particular emphasis on the development and adoption of international standards. The development and use of open, interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards that take into account needs of users and consumers is a basic element for the development and greater diffusion of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing countries. International standards aim to create an environment where consumers can access services worldwide regardless of underlying technology.

45. The radio frequency spectrum should be managed in the public interest and in accordance with principle of legality, with full observance of national laws and regulation as well as relevant international agreements.

konektivitas global yang terjangkau akan memberikan kontribusi secara berarti terhadap keefektifan usaha-usaha pembangunan tersebut.

41. TIK adalah sarana penting yang memungkinkan pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas, khususnya pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini, pembangunan Masyarakat Informasi penting bagi perkembangan ekonomi yang berbasis luas, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Peningkatan produktivitas yang didukung oleh TIK dan pembaharuan yang dipergunakan pada sektor-sektor ekonomi harus dibantu. Pemerataan memperoleh manfaat memberi kontribusi terhadap pemberantasan kemiskinan dan perkembangan sosial. Kebijakan yang mendorong investasi produktif dan memberdayakan perusahaan-perusahaan, khususnya UKM, untuk membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk meraih manfaat dari TIK, yang mungkin paling menguntungkan.

42. Perlindungan atas Karya Intelektual (HAKI) penting untuk mendorong inovasi dan kreatifitas dalam Masyarakat Informasi; demikian juga diseminasi luas, difusi, dan berbagi pengetahuan, penting untuk mendorong inovasi dan kreatifitas. Memudahkan partisipasi yang berharga bagi semua orang dalam persoalan karya intelektual dan berbagi pengetahuan melalui kesadaran penuh dan pemberdayaan merupakan bagian fundamental dalam Masyarakat Informasi yang inklusif.

43. Pembangunan yang berkesinambungan dalam Masyarakat Informasi dapat dimajukan dengan sebaik-baiknya bila usaha-usaha dan program-program yang berkaitan dengan TIK diintegrasikan sepenuhnya di dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. **Kita menyambut baik Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD)** dan mendorong komunitas internasional untuk mendukung langkah-langkah yang berhubungan dengan TIK dalam prakarsa ini, serta pada usaha-usaha serupa di daerah-daerah lain. Distribusi manfaat dari perkembangan yang digerakkan TIK bermanfaat terhadap penghapusan kemiskinan serta pengembangan yang berkesinambungan.

44. Standardisasi adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan Masyarakat Informasi. Selayaknya diberikan perhatian khusus kepada perkembangan dan penggunaan standar internasional. Pengembangan dan penggunaan standar-standar yang terbuka, dapat tersambung secara operasional, non diskriminatif, serta berdasarkan tuntutan kebutuhan, yang memperhitungkan kebutuhan pengguna dan konsumen, adalah unsur pokok untuk pengembangan dan pemerataan TIK serta akses yang lebih terjangkau bagi mereka, khususnya di negara-negara berkembang. Standar internasional bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana konsumen dapat mengakses jasa di seluruh dunia tanpa memperlumahkan teknologi yang mendasarinya.

45. Spektrum frekwensi radio harus diatur demi kepentingan umum serta sesuai dengan prinsip legalitas, dengan ketaatan penuh pada hukum dan regulasi nasional, serta pada kesepakatan internasional yang relevan.

46. In building the Information Society, States are strongly urged to take steps with a view to the avoidance of, and refrain from, any unilateral measure not in accordance with international law and the *Charter of the United Nations* that impedes the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of their population.

47. Recognizing that ICTs are progressively changing our working practices, the creation of a secure, safe and healthy working environment, appropriate to the utilisation of ICTs, respecting all relevant international norms, is fundamental.

48. The Internet has evolved into a global facility available to the public and its governance should constitute a core issue of the Information Society agenda. The international management of the Internet should be multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of governments, the private sector, civil society and international organizations. It should ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure functioning of the Internet, taking into account multilingualism.

49. The management of the Internet encompasses both technical and public policy issues and should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and international organizations. In this respect it is recognized that:

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of States. They have rights and responsibilities for international Internet-related public policy issues;

b) The private sector has had and should continue to have an important role in the development of the Internet, both in the technical and economic fields;

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at community level, and should continue to play such a role;

d) Intergovernmental organizations have had and should continue to have a facilitating role in the coordination of Internet-related public policy issues;

e) International organizations have also had and should continue to have an important role in the development of Internet-related technical standards and relevant policies.

50. International Internet governance issues should be addressed in a coordinated manner. **We ask** the Secretary-General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in an open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of governments, the private sector and civil society

46. Dalam membangun Masyarakat Informasi, negara-negara sangat disarankan untuk mengambil langkah dengan maksud untuk menghindari, serta menjauhi peraturan-peraturan unilateral yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, yang akan menghambat pencapaian penuh dari pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh rakyat negara-negara yang bersangkutan, dan yang menghalangi kesejahteraan rakyat mereka.

47. Mengakui bahwa TIK mengubah cara kerja kita secara progresif, maka penciptaan lingkungan kerja yang terjamin, aman, sehat, sesuai dengan penggunaan TIK, serta menghormati semua norma internasional yang relevan, adalah fundamental.

48. Internet telah berkembang menjadi fasilitas global yang tersedia bagi publik, dan pengelolaannya harus menjadi masalah utama dalam menetapkan agenda Masyarakat Informasi. Manajemen internasional terhadap internet harus multilateral, transparan dan demokratis, dengan keterlibatan penuh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Pengelolaannya harus menjamin kesederajatan pendistribusian sumber daya, memudahkan akses untuk semua orang, serta menjamin keamanan dan kehandalan operasional internet, dengan memperhitungkan multilingualisme.

49. Pengelolaan internet mencakup baik kebijakan teknik maupun kebijakan umum dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan serta organisasi-organisasi antar negara dan organisasi internasional. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa:

a) Kewenangan kebijakan untuk permasalahan kebijakan umum yang berkaitan dengan internet adalah hak tiap negara. Mereka mempunyai hak dan kewajiban atas masalah kebijakan umum internasional yang berkaitan dengan internet.

b) Sektor swasta telah memiliki, dan harus terus memiliki, peran penting dalam pengembangan internet, baik dalam bidang teknik maupun ekonomi.

c) Masyarakat umum juga telah memainkan peran penting dalam permasalahan internet, khususnya di tingkat komunitas, dan harus terus menjalankan peran tersebut.

d) Organisasi antar pemerintah juga telah memiliki dan harus terus memiliki peran yang memudahkan dalam koordinasi permasalahan kebijakan umum yang berkaitan dengan internet.

e) Organisasi-organisasi internasional juga telah memiliki, dan harus terus memiliki, peran penting dalam pengembangan standar teknis yang berkaitan dengan internet serta kebijakan-kebijakan yang relevan.

50. Pengelolaan Internet Internasional harus ditangani dengan cara terkoordinasi. **Kita meminta** kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk suatu kelompok kerja tentang Pengelolaan Internet, dalam suatu proses yang terbuka dan inklusif yang menjamin mekanisme keikutsertaan penuh dan aktif dari pemerintah,

from both developing and developed countries, involving relevant intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and make proposals for action, as appropriate, on the governance of Internet by 2005.

7) ICT applications: benefits in all aspects of life

51. The usage and deployment of ICTs should seek to create benefits in all aspects of our daily life. ICT applications are potentially important in government operations and services, health care and health information, education and training, employment, job creation, business, agriculture, transport, protection of environment and management of natural resources, disaster prevention, and culture, and to promote eradication of poverty and other agreed development goals. ICTs should also contribute to sustainable production and consumption patterns and reduce traditional barriers, providing an opportunity for all to access local and global markets in a more equitable manner. Applications should be user-friendly, accessible to all, affordable, adapted to local needs in languages and cultures, and support sustainable development. To this effect, local authorities should play a major role in the provision of ICT services for the benefit of their populations.

8) Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content

52. Cultural diversity is the common heritage of humankind. The Information Society should be founded on and stimulate respect for cultural identity, cultural and linguistic diversity, traditions and religions, and foster dialogue among cultures and civilizations. The promotion, affirmation and preservation of diverse cultural identities and languages as reflected in relevant agreed United Nations documents including UNESCO's *Universal Declaration on Cultural Diversity*, will further enrich the Information Society.

53. The creation, dissemination and preservation of content in diverse languages and formats must be accorded high priority in building an inclusive Information Society, paying particular attention to the diversity of supply of creative work and due recognition of the rights of authors and artists. It is essential to promote the production of and accessibility to all content-educational, scientific, cultural or recreational-in diverse languages and formats. The development of local content suited to domestic or regional needs will encourage social and economic development and will stimulate participation of all stakeholders, including people living in rural, remote and marginal areas.

54. The preservation of cultural heritage is a crucial component of identity and self-understanding of individuals that links a community to its past. The Information Society

sektor swasta dan masyarakat sipil, baik dari negara maju maupun berkembang, yang melibatkan organisasi antar pemerintahan serta organisasi internasional yang terkait dan forum-forum, untuk melakukan penelitian dan mengajukan usul tindakan, yang tepat, pada pengelolaan Internet menjelang 2005.

7) Penerapan TIK: manfaat-manfaat di dalam semua aspek kehidupan.

51. Penggunaan dan penggelaran TIK harus menciptakan manfaat dalam semua aspek kehidupan keseharian kita. Penerapan TIK berpotensi penting dalam operasi dan jasa-jasa pemerintahan, perawatan kesehatan dan informasi kesehatan, pendidikan dan pelatihan, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, bisnis, pertanian, transportasi, perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, pencegahan bencana, serta kebudayaan, serta untuk mendorong pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lain yang telah disepakati. TIK juga harus memberikan kontribusi untuk pola produksi dan konsumsi yang berkesinambungan serta mengurangi hambatan tradisional, menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk mengakses pasar lokal dan global secara lebih adil. Aplikasi-aplikasi haruslah ramah disesuaikan dengan kebutuhan lokal dalam bahasa dan budaya, dan mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Untuk tujuan tersebut, pihak otoritas lokal harus memainkan peran utama dalam penyediaan jasa TIK demi memberikan manfaat kepada masyarakatnya.

8) Keragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan konten lokal

52. Keragaman budaya adalah warisan umum umat manusia. Masyarakat Informasi harus didirikan atas dan membangkitkan rasa hormat terhadap identitas budaya, keragaman budaya dan bahasa, tradisi dan agama, dan menumbuhkembangkan dialog antar kebudayaan dan peradaban. Promosi, penghargaan dan pelestarian keragaman identitas kebudayaan dan bahasa seperti yang tercermin dalam dokumen-dokumen relevan Perserikataangsa-Bangsa yang telah disepakati, termasuk *Deklarasi untuk Keragaman Budaya Sedunia (Universal Declaration on Cultural Diversity)* dari UNESCO, akan lebih lanjut memperkaya Masyarakat Informasi.

53. Penciptaan, penyebaran, serta pemeliharaan isi dalam keragaman bahasa dan format harus diberi prioritas tinggi dalam membangun sebuah Masyarakat Informasi yang inklusif, dengan memberikan perhatian khusus kepada keragaman penyediaan hasil kerja kreatif dan hak pengakuan dari hak cipta pengarang dan seniman. Adalah penting untuk mendorong produksi dan aksesibilitas terhadap semua isi - pendidikan, ilmiah, kultural atau rekreasi - dalam keragaman bahasa dan format. Pengembangan isi lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik atau daerah akan mendorong perkembangan sosial dan ekonomi dan akan membangkitkan partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman, terpencil, dan terpinggirkan.

54. Pemeliharaan warisan kebudayaan adalah komponen yang sangat penting untuk identitas dan pengenalan diri para individual yang terkait dengan sebuah komunitas

should harness and preserve cultural heritage for the future by all appropriate methods, including digitisation.

9) Media

55. We reaffirm our commitment to the principles of freedom of the press and freedom of information, as well as those of the independence, pluralism and diversity of media, which are essential to the Information Society. Freedom to seek, receive, impart and use information for the creation, accumulation and dissemination of knowledge are important to the Information Society. **We call for** the responsible use and treatment of information by the media in accordance with the highest ethical and professional standards. Traditional media in all their forms have an important role in the Information Society and ICTs should play a supportive role in this regard. Diversity of media ownership should be encouraged, in conformity with national law, and taking into account relevant international conventions. **We reaffirm** the necessity of reducing international imbalances affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development of human skills.

10) Ethical dimensions of the Information Society

56. The Information Society should respect peace and uphold the fundamental values of freedom, equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature.

57. We acknowledge the importance of ethics for the Information Society, which should foster justice, and the dignity and worth of the human person. The widest possible protection should be accorded to the family and to enable it to play its crucial role in society.

58. The use of ICTs and content creation should respect human rights and fundamental freedoms of others, including personal privacy, and the right to freedom of thought, conscience, and religion in conformity with relevant international instruments.

59. All actors in the Information Society should take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs, such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, human beings.

pada masa lalunya. Masyarakat Informasi harus menjaga dan memelihara warisan kebudayaan demi masa depan dengan segala metode yang layak, termasuk digitasi.

9) Media

55. Kita menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi, serta terhadap kemerdekaan, pluralisme, dan keragaman media, yang sangat penting untuk Masyarakat Informasi. Kebebasan untuk mencari, menerima, berbagi, serta menggunakan informasi untuk penciptaan, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan adalah penting untuk Masyarakat Informasi. **Kita menyerukan** penggunaan dan perlakuan informasi secara bertanggung jawab oleh media sesuai dengan etika tertinggi dan standar profesional. Media tradisional dalam segala bentuknya memiliki peran penting dalam Masyarakat Informasi dan TIK dalam hal ini harus menjalankan peran pendukung. Keaneka ragaman kepemilikan media harus didorong, disesuaikan dengan hukum nasional, serta dengan memperhitungkan konvensi-konvensi internasional yang relevan. **Kita menegaskan kembali** keharusan mengurangi ketidakseimbangan internasional yang mempengaruhi media, khususnya yang berkenaan dengan infrastruktur, sumber daya teknis, dan pengembangan ketrampilan perorangan.

10) Dimensi etika Masyarakat Informasi

56. Masyarakat Informasi harus menghormati perdamaian dan menegakkan nilai-nilai fundamental dari kebebasan, persamaan hak, solidaritas, toleransi, pembagian tanggung jawab, dan hormat terhadap alam.

57. Kita mengakui pentingnya etika untuk Masyarakat Informasi, yang harus memelihara keadilan serta martabat dan nilai manusia. Perlindungan perlu diberikan bagi keluarga sehingga memungkinkan mereka memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat.

58. Penggunaan TIK dan penciptaan isinya harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lain, termasuk kebebasan pribadi, serta hak kebebasan untuk berpikir, berhati nurani, dan keselarasan agama dengan instrumen internasional yang relevan.

59. Seluruh pelaku dalam Masyarakat Informasi harus mengambil tindakan yang sesuai serta langkah pencegahan, seperti yang ditetapkan dalam hukum, untuk melawan penyalahgunaan TIK, seperti pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang dimotivasi oleh rasisme, diskriminasi ras, xenophobia, hal-hal yang berkaitan dengan tiadanya toleransi, dendam, kekerasan, segala bentuk kekejaman terhadap anak, termasuk paedophilia dan pornografi anak, serta perdagangan dan eksploitasi terhadap kemanusiaan.

11) International and regional cooperation

60. We aim at making full use of the opportunities offered by ICTs in our efforts to reach the internationally agreed development goals, including those contained in the *Millennium Declaration*, and to uphold the key principles set forth in this Declaration. The Information Society is intrinsically global in nature and national efforts need to be supported by effective international and regional cooperation among governments, the private sector, civil society and other stakeholders, including the international financial institutions.

61. In order to build an inclusive global Information Society, **we will seek** and **effectively implement** concrete international approaches and mechanisms, including financial and technical assistance. Therefore, while appreciating ongoing ICT cooperation through various mechanisms, **we invite** all stakeholders to commit to the *Digital Solidarity Agenda* set forth in the *Plan of Action*. **We are convinced** that the worldwide agreed objective is to contribute to bridge the digital divide, promote access to ICTs, create digital opportunities, and benefit from the potential offered by ICTs for development. **We recognize** the will expressed by some to create an international voluntary "Digital Solidarity Fund", and by others to undertake studies concerning existing mechanisms and the efficiency and feasibility of such a Fund.

62. Regional integration contributes to the development of the global Information Society and makes strong cooperation within and among regions indispensable. Regional dialogue should contribute to national capacity building and to the alignment of national strategies with the goals of this *Declaration of Principles* in a compatible way, while respecting national and regional particularities. In this context, **we welcome and encourage** the international community to support the ICT-related measures of such initiatives.

63. We resolve to assist developing countries, LDCs and countries with economies in transition through the mobilization from all sources of financing, the provision of financial and technical assistance and by creating an environment conducive to technology transfer, consistent with the purposes of this *Declaration* and the *Plan of Action*.

64. The core competences of the International Telecommunication Union (ITU) in the fields of ICTs-assistance in bridging the digital divide, international and regional cooperation, radio spectrum management, standards development and the dissemination of information are of crucial importance for building the Information Society.

11) Kerjasama internasional dan regional

60. Kita bertujuan untuk menggunakan secara penuh kesempatan yang ditawarkan oleh TIK dalam usaha kita untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk yang tertera dalam *Deklarasi Milenium*, dan untuk menjunjung prinsip-prinsip utama yang dinyatakan dalam Deklarasi ini. Masyarakat Informasi pada hakekatnya adalah global secara alamiah, dan usaha nasional perlu didukung oleh kerjasama internasional dan regional yang efektif antar pemerintahan, sektor swasta, masyarakat umum serta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk institusi keuangan internasional.

61. Dalam rangka membangun Masyarakat Informasi global yang inklusif, **kita akan mencari** serta **menerapkan secara efektif** pendekatan dan mekanisme internasional yang kongkrit, termasuk bantuan keuangan dan bantuan teknis. Oleh karena itu, sambil menghargai kerjasama TIK melalui berbagai mekanisme, **kita mengundang** semua pemangku kepentingan untuk memberikan komitmen terhadap *Agenda Solidaritas Digital* yang dinyatakan dalam *Rencana Tindakan*. **Kita berkeyakinan** bahwa tujuan yang telah dimufakati seluruh dunia adalah untuk memberi kontribusi untuk menjembatani kesenjangan digital, mendorong akses terhadap TIK, menciptakan kesempatan-kesempatan digital, dan meraih manfaat dari potensi-potensi yang ditawarkan oleh TIK untuk pembangunan. **Kita mengakui** keinginan yang dinyatakan oleh beberapa orang untuk menciptakan suatu "Dana Solidaritas Digital" sukarela internasional, dan oleh pihak-pihak lainnya untuk menyelenggarakan studi mengenai mekanisme yang ada, dan efisiensi serta kelayakan dari Dana tersebut.

62. Integrasi regional memberikan kontribusi terhadap pembangunan Masyarakat Informasi global dan sangat memerlukan kerjasama kuat di dalam dan antar daerah. Dialog regional harus memberi kontribusi kepada pengembangan kemampuan nasional dan kepada penyesuaian strategi nasional terhadap tujuan-tujuan *Deklarasi Prinsip-Prinsip* ini secara harmonis, juga menghormati ciri nasional dan daerah. Dalam konteks ini, **kita menyambut dan mendorong** komunitas internasional untuk mendukung tindakan-tindakan yang terkait dengan TIK dari prakarsa tersebut.

63. Kita berketetapan untuk membantu negara-negara berkembang, negara terbelakang, dan negara dengan Masyarakat/Ekonomi yang masih dalam transisi melalui pengalihan seluruh sumber daya keuangan, penyediaan bantuan keuangan dan teknis, dan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap alih teknologi, konsisten dengan tujuan-tujuan *Deklarasi* ini dan *Rencana Tindakan*.

64. Kompetensi inti Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) dalam bidang-bidang TIK - membantu menjembatani kesenjangan digital, kerjasama internasional dan regional, pengaturan spektrum radio, pembangunan standar-standar dan penyebaran informasi - adalah merupakan perihal yang sangat krusial untuk membangun Masyarakat Informasi.

C. Towards an Information Society for All Based on Shared Knowledge

65. We commit ourselves to strengthening cooperation to seek common responses to the challenges and to the implementation of the *Plan of Action*, which will realize the vision of an inclusive Information Society based on the Key Principles incorporated in this Declaration.

66. We further commit ourselves to evaluate and follow-up progress in bridging the digital divide, taking into account different levels of development, so as to reach internationally agreed development goals, including those contained in the *Millennium Declaration*, and to assess the effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information Society.

67. We are firmly convinced that we are collectively entering a new era of enormous potential, that of the Information Society and expanded human communication. In this emerging society, information and knowledge can be produced, exchanged, shared and communicated through all the networks of the world. All individuals can soon, if we take the necessary actions, together build a new Information Society based on shared knowledge and founded on global solidarity and a better mutual understanding between peoples and nations. **We trust** that these measures will open the way to the future development of a true knowledge society.

Geneva, 12 December 2003

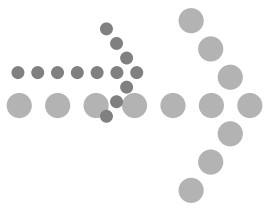
C. Menuju Masyarakat Informasi untuk Semua Orang Berdasarkan Pengetahuan Yang Dipakai Bersama

65. Kita berkomitmen diri dalam memperkuat kerjasama untuk mendapatkan respons bersama terhadap tantangan-tantangan, dan implementasi dari *Rencana Tindakan*, untuk mewujudkan visi Masyarakat Informasi yang inklusif, berdasarkan Prinsip-Prinsip Utama yang terkandung dalam Deklarasi ini.

66. Kita selanjutnya berkomitmen diri untuk mengevaluasi dan mengikuti kemajuan pelaksanaan lanjut dalam menjembatani kesenjangan digital, dengan memperhitungkan tingkat perkembangan yang berbeda-beda, demi mencapai tujuan pembangunan internasional yang telah disepakati, termasuk yang tertera di dalam *Deklarasi Milenium*, dan untuk mengetahui keefektifan investasi serta usaha kerjasama internasional dalam membangun Masyarakat Informasi

67. Kita sungguh meyakini bahwa kita sedang bersama-sama memasuki era baru dengan potensi yang sangat besar, yaitu Masyarakat Informasi dan perkembangan komunikasi manusia. Dalam masyarakat yang sedang muncul ini, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan, dipertukarkan, dibagi dan dikomunikasikan melalui semua jaringan di dunia. Semua individu dapat segera, bila mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, bersama-sama membangun Masyarakat Informasi yang baru berdasarkan pengetahuan yang dibagi-pakai bersama serta berlandaskan solidaritas global, dan pengertian bersama yang lebih baik antara rakyat dan bangsa-bangsa. **Kita percaya** bahwa langkah-langkah ini akan membuka jalan menuju pembangunan masa depan masyarakat berpengetahuan yang sesungguhnya.

Geneva, 12 December 2003



GENEVA
PLAN OF ACTION

GENEVA
RENCANA AKSI

A. Introduction

1. The common vision and guiding principles of the *Declaration* are translated in this *Plan of Action* into concrete action lines to advance the achievement of the internationally-agreed development goals, including those in the *Millennium Declaration*, the *Monterrey Consensus* and the *Johannesburg Declaration and Plan of Implementation*, by promoting the use of ICT-based products, networks, services and applications, and to help countries overcome the digital divide. The Information Society envisaged in the Declaration of Principles will be realized in cooperation and solidarity by governments and all other stakeholders.

2. The Information Society is an evolving concept that has reached different levels across the world, reflecting the different stages of development. Technological and other change is rapidly transforming the environment in which the Information Society is developed. *The Plan of Action* is thus an evolving platform to promote the Information Society at the national, regional and international levels. The unique two-phase structure of the World Summit on the Information Society (WSIS) provides an opportunity to take this evolution into account.

3. All stakeholders have an important role to play in the Information Society, especially through partnerships:

a) Governments have a leading role in developing and implementing comprehensive, forward looking and sustainable national e-strategies. The private sector and civil society, in dialogue with governments, have an important consultative role to play in devising national e-strategies.

b) The commitment of the private sector is important in developing and diffusing information and communication technologies (ICTs), for infrastructure, content and applications. The private sector is not only a market player but also plays a role in a wider sustainable development context.

c) The commitment and involvement of civil society is equally important in creating an equitable Information Society, and in implementing ICT-related initiatives for development.

d) International and regional institutions, including international financial institutions, have a key role in integrating the use of ICTs in the development process and making available necessary resources for building the Information Society and for the evaluation of the progress made.

A. Pendahuluan

1. Pandangan bersama dan prinsip-prinsip pedoman Deklarasi diterjemahkan dalam *Rencana Aksi* ini menjadi arahan tindakan kongkrit untuk memajukan tercapainya tujuan pembangunan yang telah disepakati, termasuk yang tertera dalam *Deklarasi Milenium*, *Konsensus Monterrey* serta *Deklarasi Johannesburg dan Rencana Pelaksanaan*, dengan mempromosikan penggunaan produk-produk berbasis TIK, jaringan, layanan jasa, dan aplikasi, serta untuk membantu negara-negara dalam mengatasi kesenjangan digital. Masyarakat Informasi yang digambarkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip akan direalisasikan dalam kerjasama dan solidaritas oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lain.

2. Masyarakat Informasi adalah suatu konsep berubah-ubah yang telah mencapai tingkat-tingkat berbeda di seluruh dunia, mencerminkan taraf perkembangan yang berbeda. Teknologi dan perubahan lain dengan cepat mengubah lingkungan di mana Masyarakat Informasi dikembangkan. *Rencana Aksi* adalah suatu landasan pijak yang berubah-ubah untuk mempromosikan Masyarakat Informasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Struktur dua-tahap yang unik dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Masyarakat Informasi (WSIS) menyediakan peluang untuk mempertimbangkan proses evolusi ini.

3. Semua pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam Masyarakat Informasi, terutama melalui kemitraan:

a) Pemerintah memiliki peran utama dalam mengembangkan dan menjalankan e-strategi yang luas, berpandangan ke depan, dan berkesinambungan. Sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam dialog dengan pemerintah, memiliki peran penting sebagai penasihat dalam merancang e-strategi nasional.

b) Komitmen sektor swasta penting dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi infrastruktur, konten, dan aplikasi. Sektor swasta tidak hanya sebagai pelaku pasar, tetapi juga memainkan peran dalam konteks pengembangan berkesinambungan yang luas.

c) Komitmen dan keterlibatan masyarakat sipil adalah sama pentingnya dalam menciptakan Masyarakat Informasi yang sederhana, dan dalam mengimplementasikan inisiatif untuk pembangunan yang terkait dengan TIK.

d) Institusi internasional dan regional, termasuk institusi keuangan internasional, memiliki peran kunci dalam pengintegrasian penggunaan TIK dalam proses pengembangan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun Masyarakat Informasi, dan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dibuat.

B. Objectives, goals and targets

4. The objectives of the *Plan of Action* are to build an inclusive Information Society; to put the potential of knowledge and ICTs at the service of development; to promote the use of information and knowledge for the achievement of internationally agreed development goals, including those contained in the *Millennium Declaration*; and to address new challenges of the Information Society, at the national, regional and international levels. Opportunity shall be taken in phase two of the WSIS to evaluate and assess progress made towards bridging the digital divide.

5. Specific targets for the Information Society will be established as appropriate, at the national level in the framework of national e-strategies and in accordance with national development policies, taking into account the different national circumstances. Such targets can serve as useful benchmarks for actions and for the evaluation of the progress made towards the attainment of the overall objectives of the Information Society.

6. Based on internationally agreed development goals, including those in the *Millennium Declaration*, which are premised on international cooperation, indicative targets may serve as global references for improving connectivity and access in the use of ICTs in promoting the objectives of the *Plan of Action*, to be achieved by 2015. These targets may be taken into account in the establishment of the national targets, considering the different national circumstances:

- a)** to connect villages with ICTs and establish community access points;
- b)** to connect universities, colleges, secondary schools and primary schools with ICTs;
- c)** to connect scientific and research centres with ICTs;
- d)** to connect public libraries, cultural centres, museums, post offices and archives with ICTs;
- e)** to connect health centres and hospitals with ICTs;
- f)** to connect all local and central government departments and establish websites and email addresses;
- g)** to adapt all primary and secondary school curricula to meet the challenges of the Information Society, taking into account national circumstances;

B. Maksud, tujuan dan sasaran

4. Maksud *Rencana Aksi* adalah untuk membangun Masyarakat Informasi inklusif, untuk menempatkan potensi pengetahuan dan TIK dalam jasa pembangunan; untuk mempromosikan penggunaan informasi dan pengetahuan demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk yang tertera di dalam *Deklarasi Milenium*; serta untuk membahas tantangan-tantangan baru Masyarakat Informasi, pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Peluang akan diambil di tahap ke dua WSIS untuk mengevaluasi dan menilai kemajuan yang telah dibuat dalam menjembatani kesenjangan digital.

5. Sasaran khusus untuk Masyarakat Informasi akan ditentukan sesuai kebutuhan, pada tingkat nasional dalam kerangka e-strategi nasional, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan memperhitungkan perbedaan keadaan di tiap negara. Sasaran-sasaran tersebut dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk berbagai tindakan dan untuk evaluasi kemajuan yang dicapai dalam mengupayakan maksud dari Masyarakat Informasi.

6. Berdasarkan tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk yang tertera dalam *Deklarasi Milenium*, yang dilandasi pemikiran pada kerjasama internasional, sasaran-sasaran yang dicantumkan dapat digunakan sebagai rujukan global untuk meningkatkan konektivitas dan akses dalam penggunaan TIK untuk mempromosikan berbagai tujuan *Rencana Aksi*, untuk dicapai menjelang 2015. Sasaran-sasaran ini dapat diperhitungkan dalam pembuatan sasaran nasional, dengan mempertimbangkan perbedaan keadaan di tiap negara:

- a)** menghubungkan desa-desa dengan TIK dan mendirikan tempat-tempat akses komunitas;
- b)** menghubungkan universitas, perguruan tinggi, sekolah menengah dan sekolah dasar dengan TIK;
- c)** menghubungkan pusat-pusat ilmiah dan penelitian dengan TIK;
- d)** menghubungkan perpustakaan umum, pusat kebudayaan, kantor pos, dan kantor arsip dengan TIK;
- e)** menghubungkan pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK;
- f)** menghubungkan semua instansi pemerintahan lokal dan pusat serta mendirikan website dan alamat e-mail.
- g)** menyesuaikan semua kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam memenuhi tantangan-tantangan Masyarakat Informasi, dengan memperhitungkan keadaan nasional.

h) to ensure that all of the world's population have access to television and radio services;

i) to encourage the development of content and to put in place technical conditions in order to facilitate the presence and use of all world languages on the Internet;

j) to ensure that more than half the world's inhabitants have access to ICTs within their reach.

7. In giving effect to these objectives, goals and targets, special attention will be paid to the needs of developing countries, and in particular to countries, peoples and groups cited in *paragraphs 11-16* of the *Declaration of Principles*.

h. untuk memastikan bahwa semua penduduk dunia memiliki akses terhadap jasa televisi dan radio.

i. untuk mendorong perkembangan konten dan untuk menempatkan kondisi teknis dalam upaya untuk memudahkan keberadaan dan penggunaan semua bahasa dunia di internet.

j. untuk memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia memiliki akses terhadap TIK dalam jangkauan mereka.

7. Dalam memberikan efek terhadap berbagai maksud, tujuan, dan sasaran ini, perhatian istimewa harus diberikan terhadap berbagai kebutuhan negara-negara berkembang, dan khususnya pada negara, penduduk, dan kelompok yang telah disebut pada *paragraf 11-16* dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip*.

C. Action Lines

C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development.

8. The effective participation of governments and all stakeholders is vital in developing the Information Society requiring cooperation and partnerships among all of them.

a) Development of national e-strategies, including the necessary human capacity building, should be encouraged by all countries by 2005, taking into account different national circumstances.

b) Initiate at the national level a structured dialogue involving all relevant stakeholders, including through public/private partnerships, in devising e-strategies for the Information Society and for the exchange of best practices.

c) In developing and implementing national e-strategies, stakeholders should take into consideration local, regional and national needs and concerns. To maximize the benefits of initiatives undertaken, these should include the concept of sustainability. The private sector should be engaged in concrete projects to develop the Information Society at local, regional and national levels.

d) Each country is encouraged to establish at least one functioning Public/Private Partnership (PPP) or Multi-Sector Partnership (MSP), by 2005 as a showcase for future action.

e) Identify mechanisms, at the national, regional and international levels, for the initiation and promotion of partnerships among stakeholders of the Information Society.

f) Explore the viability of establishing multi-stakeholder portals for indigenous peoples at the national level.

g) By 2005, relevant international organizations and financial institutions should develop their own strategies for the use of ICTs for sustainable development, including sustainable production and consumption patterns and as an effective instrument to help achieve the goals expressed in the *United Nations Millennium Declaration*.

h) International organizations should publish, in their areas of competence, including on their website, reliable information submitted by relevant stakeholders

C. Arahan Aksi

C1. Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan.

8. Partisipasi efektif antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan sangat vital dalam pembangunan Masyarakat Informasi yang membutuhkan kerjasama dan kemitraan antar mereka semua.

a) Pengembangan e-strategi nasional, termasuk pengembangan kemampuan manusia yang diperlukan, harus didorong oleh semua negara menjelang 2005, dengan memperhitungkan keadaan nasional yang berbeda-beda.

b) Mengawali pada tingkat nasional suatu dialog terstruktur yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait, termasuk melalui kemitraan publik/swasta, dalam merencanakan e-strategi untuk Masyarakat Informasi dan untuk saling tukar pengalaman/ pengetahuan praktek terbaik.

c) Dalam mengembangkan dan melaksanakan e-strategi nasional, para pemangku kepentingan harus mempertimbangkan kebutuhan dan minat lokal, regional, dan nasional. Untuk memaksimalkan berbagai manfaat prakarsa yang telah dilaksanakan, harus memasukkan konsep berkesinambungan. Sektor swasta harus terlibat dalam proyek-proyek kongkrit untuk membangun Masyarakat Informasi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

d) Setiap negara disarankan untuk mendirikan paling tidak satu Kemitraan Publik/Swasta (PPP) atau Kemitraan Multi-Sektor (MSP) yang berfungsi, menjelang 2005, sebagai contoh untuk tindak lanjut di masa mendatang.

e) Mengidentifikasi mekanisme, pada tingkat nasional, regional, dan internasional, untuk mengawali dan mempromosikan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam Masyarakat Informasi.

f) Mengeksplorasi keberlanjutan pendirian portal-portal oleh berbagai pemangku kepentingan untuk penduduk pribumi pada tingkat nasional.

g) Menjelang 2005, organisasi-organisasi internasional dan institusi-institusi keuangan yang relevan harus mengembangkan strategi mereka sendiri dalam penggunaan TIK untuk pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pola produksi dan konsumsi yang berkesinambungan dan sebagai alat efektif untuk membantu mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam *Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa*.

h) Organisasi-organisasi internasional harus menerbitkan, dalam bidang-bidang kompetensi mereka, termasuk dalam website mereka, informasi yang dapat

on successful experiences of mainstreaming ICTs.

i) Encourage a series of related measures, including, among other things: incubator schemes, venture capital investments (national and international), government investment funds (including micro-finance for Small, Medium-sized and Micro Enterprises (SMMEs)), investment promotion strategies, software export support activities (trade counseling), support of research and development networks and software parks.

C2. Information and communication infrastructure: an essential foundation for the Information Society

9. Infrastructure is central in achieving the goal of digital inclusion, enabling universal, sustainable, ubiquitous and affordable access to ICTs by all, taking into account relevant solutions already in place in developing countries and countries with economies in transition, to provide sustainable connectivity and access to remote and marginalized areas at national and regional levels.

a) Governments should take action, in the framework of national development policies, in order to support an enabling and competitive environment for the necessary investment in ICT infrastructure and for the development of new services.

b) In the context of national e-strategies, devise appropriate universal access policies and strategies, and their means of implementation, in line with the indicative targets, and develop ICT connectivity indicators.

c) In the context of national e-strategies, provide and improve ICT connectivity for all schools, universities, health institutions, libraries, post offices, community centres, museums and other institutions accessible to the public, in line with the indicative targets.

d) Develop and strengthen national, regional and international broadband network infrastructure, including delivery by satellite and other systems, to help in providing the capacity to match the needs of countries and their citizens and for the delivery of new ICT-based services. Support technical, regulatory and operational studies by the International Telecommunication Union (ITU) and, as appropriate, other relevant international organizations in order to:

i) broaden access to orbital resources, global frequency harmonization and global systems standardization;

dipercaya yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang terkait, mengenai pengalaman keberhasilan dalam mengurus-utamakan TIK.

i) Mendorong rangkaian langkah-langkah yang terkait, termasuk, diantaranya: skema inkubator, investasi modal usaha (nasional dan internasional), dana investasi pemerintah (termasuk mikro-finansial untuk Usaha-Usaha berukuran Kecil, Menengah, dan Mikro (UKMM)), strategi promosi investasi, kegiatan-kegiatan mendukung ekspor perangkat lunak (nasihat perdagangan), mendukung jaringan-jaringan penelitian dan pengembangan kawasan/taman pengembangan perangkat lunak.

C2. Infrastruktur informasi dan komunikasi: Suatu fondasi esensial untuk Masyarakat Informasi

9. Infrastruktur adalah unsur inti dalam pencapaian tujuan inklusi digital, memungkinkan ketersediaan akses terhadap TIK secara universal berkesinambungan, ada dimana-mana, dan terjangkau, dengan memperhitungkan solusi-solusi terkait yang sudah ada di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, untuk menyediakan konektivitas yang berkesinambungan serta akses untuk daerah-daerah yang terpencil dan terpinggir pada tingkat nasional dan regional.

a) Pemerintah harus mengambil tindakan, terhadap kerangka kebijakan pembangunan nasional, dalam usaha mendukung lingkungan yang memberdayakan serta kompetitif untuk investasi yang diperlukan dalam infrastruktur TIK, untuk pengembangan pelayanan jasa baru.

b) Dalam konteks e-strategi nasional, merancang kebijakan dan strategi untuk akses universal yang sesuai, serta cara-cara implementasinya, sesuai dengan sasaran indikatif, serta mengembangkan indikator konektivitas TIK.

c) Dalam konteks e-strategi nasional, menyediakan dan meningkatkan konektivitas TIK untuk semua sekolah, universitas, institusi kesehatan, perpustakaan, kantor pos, balai masyarakat, museum, dan institusi-institusi lainnya yang dapat dijangkau oleh publik, sejalan dengan sasaran-sasaran indikatif.

d) Membangun dan memperkuat infrastruktur jaringan pita lebar nasional, regional, serta internasional, termasuk pengiriman melalui satelit dan sistem-sistem lainnya, untuk membantu dalam penyediaan kapasitas dalam penyesuaian dengan kebutuhan negara-negara dan penduduknya, untuk pelayanan jasa-jasa baru berbasis TIK. Mendukung penelitian teknis, regulasi, serta operasional oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU), dan, jika perlu oleh organisasi-organisasi internasional terkait lain untuk:

i) memperluas akses untuk sumber daya orbital, harmonisasi frekuensi global, serta standarisasi sistem global;

ii) encourage public/private partnership;

iii) promote the provision of global high-speed satellite services for underserved areas such as remote and sparsely populated areas;

iv) explore other systems that can provide high-speed connectivity.

e) In the context of national e-strategies, address the special requirements of older people, persons with disabilities, children, especially marginalized children and other disadvantaged and vulnerable groups, including by appropriate educational administrative and legislative measures to ensure their full inclusion in the Information Society.

f) Encourage the design and production of ICT equipment and services so that everyone, has easy and affordable access to them including older people, persons with disabilities, children, especially marginalized children, and other disadvantaged and vulnerable groups, and promote the development of technologies, applications, and content suited to their needs, guided by the Universal Design Principle and further enhanced by the use of assistive technologies.

g) In order to alleviate the challenges of illiteracy, develop affordable technologies and non-text based computer interfaces to facilitate people's access to ICT,

h) Undertake international research and development efforts aimed at making available adequate and affordable ICT equipment for end users.

i) Encourage the use of unused wireless capacity, including satellite, in developed countries and in particular in developing countries, to provide access in remote areas, especially in developing countries and countries with economies in transition, and to improve low-cost connectivity in developing countries. Special concern should be given to the Least Developed Countries in their efforts in establishing telecommunication infrastructure.

j) Optimize connectivity among major information networks by encouraging the creation and development of regional ICT backbones and Internet exchange points, to reduce interconnection costs and broaden network access.

k) Develop strategies for increasing affordable global connectivity, thereby facilitating improved access. Commercially negotiated Internet transit and

ii) mendorong kemitraan publik/swasta;

iii) mempromosikan penyediaan pelayanan satelit global berkecepatan tinggi untuk daerah-daerah yang kurang mendapatkan pelayanan seperti daerah-daerah terpencil dan berpenduduk jarang.

iv) mengeksplorasi sistem-sistem lain yang dapat menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi.

e) Dalam konteks e-strategi nasional, memperhatikan kebutuhan khusus orang-orang tua, orang-orang cacat, anak-anak, khususnya anak-anak yang terpinggirkan, serta kelompok-kelompok lain yang berkekurangan dan rentan, termasuk penanganan administrasi pendidikan yang sesuai serta langkah-langkah legislatif untuk menjamin keikutsertaan penuh mereka dalam Masyarakat Informasi.

f) Mendorong desain dan produksi peralatan dan pelayanan jasa TIK hingga semua orang memiliki akses yang mudah dan terjangkau, termasuk orang-orang tua, orang-orang cacat, anak-anak, khususnya anak-anak yang terpinggirkan, serta kelompok-kelompok lain yang berkekurangan dan rentan, dan untuk mempromosikan pengembangan teknologi, aplikasi, serta konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan dipandu oleh Prinsip Desain Universal dan ditingkatkan lebih lanjut dengan penggunaan teknologi pembantu.

g) Dalam usaha untuk meringankan tantangan-tantangan tuna aksara, mengembangkan teknologi-teknologi yang terjangkau serta antarmuka komputer berbasis non-teks untuk memudahkan akses orang-orang terhadap TIK.

h) Menjalankan usaha-usaha penelitian dan pengembangan internasional yang bertujuan untuk membuat peralatan TIK yang sesuai dan terjangkau bagi para pengguna akhir.

i) Mendorong penggunaan kapasitas nirkabel yang tidak terpakai, termasuk satelit, di negara-negara maju dan khususnya di negara-negara berkembang, untuk menyediakan akses di daerah-daerah terpencil, terutama di negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam transisi, serta untuk memperbaiki konektivitas berbiaya rendah di negara-negara berkembang. Perhatian istimewa harus diberikan untuk Negara-Negara Terbelakang dalam usaha mereka untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.

j) Mengoptimalkan konektivitas di antara jaringan-jaringan informasi utama dengan mendorong penciptaan dan pengembangan tulang punggung regional TIK serta titik-titik penyambungan Internet, untuk mengurangi ongkos interkoneksi dan untuk memperluas akses jaringan.

k) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan konektivitas global yang terjangkau, dengan demikian memfasilitasi akses yang membaik. Ongkos transit

interconnection costs should be oriented towards objective, transparent and non-discriminatory parameters, taking into account ongoing work on this subject.

- l) Encourage and promote joint use of traditional media and new technologies.

C3. Access to information and knowledge

10. ICTs allow people, anywhere in the world, to access information and knowledge almost instantaneously. Individuals, organizations and communities should benefit from access to knowledge and information.

a) Develop policy guidelines for the development and promotion of public domain information as an important international instrument promoting public access to information.

b) Governments are encouraged to provide adequate access through various communication resources, notably the Internet, to public official information. Establishing legislation on access to information and the preservation of public data, notably in the area of the new technologies, is encouraged.

c) Promote research and development to facilitate accessibility of ICTs for all, including disadvantaged, marginalized and vulnerable groups.

d) Governments, and other stakeholders, should establish sustainable multi-purpose community public access points, providing affordable or free-of-charge access for their citizens to the various communication resources, notably the Internet. These access points should, to the extent possible, have sufficient capacity to provide assistance to users, in libraries, educational institutions, public administrations, post offices or other public places, with special emphasis on rural and underserved areas, while respecting intellectual property rights (IPRs) and encouraging the use of information and sharing of knowledge.

e) Encourage research and promote awareness among all stakeholders of the possibilities offered by different software models, and the means of their creation, including proprietary, open-source and free software, in order to increase competition, freedom of choice and affordability, and to enable all stakeholders to evaluate which solution best meets their requirements.

serta interkoneksi internet yang dinegosiasi secara komersil harus diarahkan pada parameter-parameter obyektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan memperhitungkan kelangsungan kerja pada masalah ini.

- l)** Mendorong dan mempromosikan penggunaan bersama media tradisional dan teknologi-teknologi baru.

C3. Akses untuk informasi dan pengetahuan

10. TIK memungkinkan manusia, di mana pun di dunia, untuk mengakses informasi dan pengetahuan pada saat yang hampir bersamaan. Para individu, organisasi, dan komunitas harus mengambil manfaat dari akses untuk informasi dan pengetahuan.

a) Mengembangkan pedoman kebijakan untuk pengembangan dan promosi dari informasi ranah publik sebagai alat penting internasional dalam mempromosikan akses publik ke informasi.

b) Pemerintah disarankan untuk menyediakan akses yang layak melalui berbagai sumber daya komunikasi, khususnya Internet, ke informasi resmi publik. Disarankan pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai akses untuk informasi serta pemeliharaan data umum, khususnya di area teknologi baru.

c) Mempromosikan penelitian dan pengembangan untuk memudahkan aksesibilitas dari TIK untuk semua, termasuk kelompok-kelompok yang berkekurangan, terpinggirkan, dan rentan.

d) Pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya, harus membangun pusat-pusat akses publik komunitas multiguna yang berkesinambungan, menyediakan akses yang terjangkau atau bebas biaya untuk penduduknya ke berbagai sumber daya komunikasi, khususnya internet. Pusat-pusat akses ini harus, sedapat mungkin, memiliki kapasitas yang cukup untuk menyediakan bantuan kepada pengguna, di perpustakaan, institusi pendidikan, administrasi publik, kantor pos atau tempat-tempat umum lainnya, dengan penekanan khusus pada pedesaan dan kurang terlayani, seraya menghormati Hak atas Karya Intelektual (HAKI) dan mendorong penggunaan informasi dan berbagai pengetahuan

e) Mendorong penelitian dan peningkatan kesadaran antara semua pemangku kepentingan tentang kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh berbagai model perangkat lunak, serta cara penciptaannya, termasuk kepemilikan, perangkat lunak sumber/kode terbuka dan bebas, dalam usaha untuk meningkatkan kompetisi, kebebasan memilih serta keterjangkauan, dan memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk mengevaluasi solusi terbaik untuk mencapai kebutuhan mereka.

f) Governments should actively promote the use of ICTs as a fundamental working tool by their citizens and local authorities. In this respect, the international community and other stakeholders should support capacity building for local authorities in the widespread use of ICTs as a means of improving local governance.

g) Encourage research on the Information Society, including on innovative forms of networking, adaptation of ICT infrastructure, tools and applications that facilitate accessibility of ICTs for all, and disadvantaged groups in particular.

h) Support the creation and development of a digital public library and archive services, adapted to the Information Society, including reviewing national library strategies and legislation, developing a global understanding of the need for "hybrid libraries", and fostering worldwide cooperation between libraries.

i) Encourage initiatives to facilitate access, including free and affordable access to open access journals and books, and open archives for scientific information.

j) Support research and development of the design of useful instruments for all stakeholders to foster increased awareness, assessment, and evaluation of different software models and licences, so as to ensure an optimal choice of appropriate software that will best contribute to achieving development goals within local conditions.

C4. Capacity building

11. Everyone should have the necessary skills to benefit fully from the Information Society. Therefore capacity building and ICT literacy are essential. ICTs can contribute to achieving universal education worldwide, through delivery of education and training of teachers, and offering improved conditions for lifelong learning, encompassing people that are outside the formal education process, and improving professional skills.

a) Develop domestic policies to ensure that ICTs are fully integrated in education and training at all levels, including in curriculum development, teacher training, institutional administration and management, and in support of the concept of lifelong learning.

f) Pemerintah harus mempromosikan secara aktif penggunaan TIK sebagai alat kerja fundamental bagi penduduk mereka serta pihak-pihak otoritas lokal. Dengan hal ini, masyarakat internasional dan para pemangku kepentingan lainnya harus mendukung pembangunan kapasitas untuk pihak-pihak otoritas lokal dalam penyebaran penggunaan TIK sebagai cara untuk memperbaiki pemerintahan lokal.

g) Mendorong penelitian mengenai Masyarakat Informasi, termasuk bentuk-bentuk jaringan yang inovatif, penyesuaian infrastruktur TIK, peralatan dan pemakaian yang memudahkan aksesibilitas TIK untuk semua, dan khususnya pada kelompok-kelompok yang berkekurangan.

h) Mendukung penciptaan dan pengembangan pelayanan perpustakaan dan arsip digital untuk umum, disesuaikan untuk Masyarakat Informasi, termasuk peninjauan strategi serta peraturan perundang-undangan perpustakaan nasional, mengembangkan pengertian global akan adanya keperluan untuk "perpustakaan hibrida", dan menumbuh-kembangkan kerjasama antar perpustakaan di seluruh dunia.

i) Mendorong inisiatif untuk memudahkan akses, termasuk akses bebas dan terjangkau ke akses terbuka berbagai jurnal dan buku, serta untuk arsip-arsip pengetahuan ilmiah terbuka.

j) Mendukung penelitian dan pengembangan desain peralatan yang bermanfaat untuk semua pemangku kepentingan dalam memelihara peningkatan kesadaran, penilaian, dan evaluasi dari berbagai model dan lisensi perangkat lunak yang berbeda, untuk memastikan pilihan-pilihan optimal dari perangkat lunak yang sesuai, yang memberi kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan di dalam kondisi lokal.

C4. Pembangunan kemampuan

11. Setiap orang harus memiliki kecakapan yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari Masyarakat Informasi. Oleh karena itu, pembangunan kemampuan dan pengetahuan bidang TIK adalah sangat penting. TIK dapat memberikan kontribusi untuk mencapai pendidikan universal seluruh dunia, melalui pemberian pendidikan dan pelatihan untuk para guru, serta menawarkan perbaikan kondisi untuk belajar sepanjang masa, mencakup orang-orang yang berada di luar proses pendidikan formal, juga memperbaiki ketrampilan profesional.

a) Mengembangkan kebijakan domestik untuk memastikan bahwa TIK diintegrasikan sepenuhnya dalam pendidikan dan pelatihan di semua tingkatan, termasuk dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, administrasi dan manajemen institusional, serta dalam mendukung konsep belajar sepanjang masa.

b) Develop and promote programmes to eradicate illiteracy using ICTs at national, regional and international levels.

c) Promote e-literacy skills for all, for example by designing and offering courses for public administration, taking advantage of existing facilities such as libraries, multipurpose community centres, public access points and by establishing local ICT training centres with the cooperation of all stakeholders. Special attention should be paid to disadvantaged and vulnerable groups.

d) In the context of national educational policies, and taking into account the need to eradicate adult illiteracy, ensure that young people are equipped with knowledge and skills to use ICTs, including the capacity to analyse and treat information in creative and innovative ways, share their expertise and participate fully in the Information Society.

e) Governments, in cooperation with other stakeholders, should create programmes for capacity building with an emphasis on creating a critical mass of qualified and skilled ICT professionals and experts.

f) Develop pilot projects to demonstrate the impact of ICT-based alternative educational delivery systems, notably for achieving Education for All targets, including basic literacy targets.

g) Work on removing the gender barriers to ICT education and training and promoting equal training opportunities in ICT-related fields for women and girls. Early intervention programmes in science and technology should target young girls with the aim of increasing the number of women in ICT careers. Promote the exchange of best practices on the integration of gender perspectives in ICT education.

h) Empower local communities, especially those in rural and underserved areas, in ICT use and promote the production of useful and socially meaningful content for the benefit of all.

i) Launch education and training programmes, where possible using information networks of traditional nomadic and indigenous peoples, which provide opportunities to fully participate in the Information Society.

b) Mengembangkan dan mempromosikan program-program untuk pemberantasan tunaaksa dengan menggunakan TIK pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

c) Mempromosikan kecakapan melek pengetahuan untuk semua, contohnya dengan merancang dan menawarkan kursus-kursus untuk administrasi publik, memanfaatkan keuntungan dari fasilitas yang sudah ada seperti perpustakaan, pusat-pusat komunitas multiguna, pusat-pusat akses untuk publik, serta dengan membangun pusat-pusat pelatihan TIK lokal dengan cara mengadakan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Perhatian istimewa harus diberikan untuk kelompok-kelompok yang berkekurangan dan rentan.

d) Di dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, serta dengan memperhitungkan kebutuhan untuk pemberantasan tuna aksara di kalangan orang dewasa, memastikan bahwa kalangan muda dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan TIK, termasuk kemampuan untuk menganalisa dan memperlakukan informasi dengan cara-cara kreatif dan inovatif, berbagi keahlian mereka serta berpartisipasi penuh dalam Masyarakat Informasi.

e) Pemerintah, dalam kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya, harus menciptakan program-program untuk pengembangan kemampuan dengan penekanan pada penciptaan masa yang kritis dari para profesional dan ahli TIK yang mempunyai kualifikasi dan keterampilan.

f) Mengembangkan proyek-proyek percontohan untuk menunjukkan dampak sistem pendidikan alternatif yang didasari TIK, khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran Pendidikan untuk Semua sasaran, termasuk sasaran kemampuan dasar melek pengetahuan.

g) Berusaha menghapus rintangan gender dalam pendidikan dan pelatihan TIK, serta memajukan persamaan kesempatan pelatihan untuk perempuan dewasa dan anak-anak gadis di bidang yang terkait dengan TIK. Program intervensi awal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi harus mempunyai sasaran para remaja gadis dengan maksud untuk meningkatkan jumlah wanita dalam jenjang karir TIK. Mempromosikan pertukaran cara terbaik mengenai integrasi perspektif gender dalam pendidikan TIK.

h) Memberdayakan komunitas lokal, khususnya di daerah terpencil dan kurang mendapatkan pelayanan TIK, dalam penggunaan TIK serta memajukan pembuatan konten yang berguna dan berarti secara sosial demi keuntungan semua.

i) Meluncurkan program-program pendidikan dan pelatihan, bila memungkinkan menggunakan jaringan informasi untuk para pengembara tradisional serta penduduk pribumi, dengan menyediakan berbagai kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam Masyarakat Informasi.



j) Design and implement regional and international cooperation activities to enhance the capacity, notably, of leaders and operational staff in developing countries and LDCs, to apply ICTs effectively in the whole range of educational activities. This should include delivery of education outside the educational structure, such as the workplace and at home.

k) Design specific training programmes in the use of ICTs in order to meet the educational needs of information professionals, such as archivists, librarians, museum professionals, scientists, teachers, journalists, postal workers and other relevant professional groups. Training of information professionals should focus not only on new methods and techniques for the development and provision of information and communication services, but also on relevant management skills to ensure the best use of technologies. Training of teachers should focus on the technical aspects of ICTs, on development of content, and on the potential possibilities and challenges of ICTs.

l) Develop distance learning, training and other forms of education and training as part of capacity building programmes. Give special attention to developing countries and especially LDCs in different levels of human resources development.

m) Promote international and regional cooperation in the field of capacity building, including country programmes developed by the United Nations and its Specialized Agencies.

n) Launch pilot projects to design new forms of ICT-based networking, linking education, training and research institutions between and among developed and developing countries and countries with economies in transition.

o) Volunteering, if conducted in harmony with national policies and local cultures, can be a valuable asset for raising human capacity to make productive use of ICT tools and build a more inclusive Information Society. Activate volunteer programmes to provide capacity building on ICT for development, particularly in developing countries.

p) Design programmes to train users to develop self-learning and self-development capacities.

j) Merancang dan mengimplementasikan kegiatan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan, khususnya, dari para pemimpin dan staff operasional di negara-negara berkembang serta negara-negara terbelakang (LDCs), untuk mempergunakan TIK secara efektif di dalam seluruh kegiatan pendidikan. Hal ini juga harus termasuk pembelajaran di luar struktur pendidikan, seperti di tempat kerja dan di rumah.

k) Merancang program pelatihan spesifik untuk penggunaan TIK dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sebagai ahli-ahli profesional bidang informasi, seperti juru arsip, pustakawan, ahli museum, ilmuwan, guru, jurnalis, petugas pos, serta kelompok-kelompok ahli/profesional yang relevan lainnya. Pelatihan para ahli/profesional informasi harus difokuskan tak hanya pada metode dan teknik-teknik baru untuk pengembangan dan penyediaan pelayanan informasi dan komunikasi, tapi juga pada keterampilan manajemen yang relevan untuk memastikan penggunaan teknologi yang sebaik-baiknya. Pelatihan para guru harus difokuskan pada aspek-aspek teknis TIK, pada pengembangan isi, dan pada kemungkinan-kemungkinan potensial serta tantangan-tantangan TIK.

l) Mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh, pelatihan, dan bentuk-bentuk lain dari pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari program pengembangan kemampuan. Memberi perhatian istimewa terhadap negara-negara berkembang, terutama negara-negara terbelakang (LDCs) pada berbagai tingkat pengembangan sumber daya manusia.

m) Mempromosikan kerjasama internasional dan regional dalam bidang pengembangan kemampuan, termasuk program-program negara yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Agen-agen Khususnya.

n) Meluncurkan proyek-proyek percontohan untuk merancang bentuk-bentuk baru jaringan yang didasari TIK, menghubungkan institusi pendidikan, pelatihan, serta penelitian di antara dan antar negara-negara maju dan berkembang, serta negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

o) Usaha sukarela, bila dilakukan secara harmonis dengan kebijakan nasional dan kebudayaan lokal, dapat menjadi aset berharga untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuat penggunaan peralatan TIK secara produktif serta membangun Masyarakat Informasi yang lebih inklusif. Menggerakkan program-program sukarela untuk menyediakan pengembangan kemampuan pada TIK bagi pembangunan, terutama di negara-negara berkembang.

p) Merancang program-program untuk melatih para pengguna untuk mengembangkan kemampuan swa-belajar dan pengembangan mandiri.

C5. Building confidence and security in the use of ICTs

12. Confidence and security are among the main pillars of the Information Society.

a) Promote cooperation among the governments at the United Nations and with all stakeholders at other appropriate fora to enhance user confidence, build trust, and protect both data and network integrity; consider existing and potential threats to ICTs; and address other information security and network security issues.

b) Governments, in cooperation with the private sector, should prevent, detect and respond to cyber-crime and misuse of ICTs by: developing guidelines that take into account ongoing efforts in these areas; considering legislation that allows for effective investigation and prosecution of misuse; promoting effective mutual assistance efforts; strengthening institutional support at the international level for preventing, detecting and recovering from such incidents; and encouraging education and raising awareness.

c) Governments, and other stakeholders, should actively promote user education and awareness about online privacy and the means of protecting privacy.

d) Take appropriate action on spam at national and international levels.

e) Encourage the domestic assessment of national law with a view to overcoming any obstacles to the effective use of electronic documents and transactions including electronic means of authentication.

f) Further strengthen the trust and security framework with complementary and mutually reinforcing initiatives in the fields of security in the use of ICTs, with initiatives or guidelines with respect to rights to privacy, data and consumer protection.

g) Share good practices in the field of information security and network security and encourage their use by all parties concerned.

h) Invite interested countries to set up focal points for real-time incident handling and response, and develop a cooperative network between these focal points for sharing information and technologies on incident response.

C5. Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK

12. Kepercayaan dan keamanan adalah bagian dari pilar-pilar utama Masyarakat Informasi.

a) Mempromosikan kerjasama antar pemerintahan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan semua pemangku kepentingan pada forum lain yang sesuai untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, membangun kepercayaan, dan melindungi integritas data serta jaringan, mempertimbangkan ancaman-ancaman yang ada dan potensial terhadap TIK; dan membahas masalah-masalah keamanan informasi dan keamanan jaringan lainnya.

b) Pemerintah, melalui kerjasama dengan sektor swasta, harus mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kejahatan dunia maya serta penyalahgunaan TIK dengan: menyusun pedoman yang memperhitungkan usaha-usaha yang tengah berlangsung di bidang ini; mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan investigasi efektif serta penuntutan hukum terhadap penyalahgunaan; meningkatkan usaha tolong menolong yang efektif; memperkuat bantuan institusi pada tingkat internasional untuk mencegah, mendeteksi, serta pemulihan akibat kejadian-kejadian serupa; juga mendorong pendidikan serta meningkatkan kesadaran.

c) Pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya, harus secara aktif mengupayakan peningkatan pendidikan dan kesadaran pengguna tentang hak privasi online serta cara-cara untuk melindungi hak privasi.

d) Mengambil tindakan yang tepat terhadap spam pada tingkat nasional dan internasional.

e) Mendorong penilaian domestik terhadap hukum nasional dengan maksud untuk mengatasi rintangan apa pun untuk penggunaan dokumen serta transaksi elektronik yang efektif, termasuk otentikasi secara elektronik.

f) Memperkuat kerangka kepercayaan dan keamanan lebih lanjut dengan inisiatif yang saling melengkapi dan saling menguatkan di bidang keamanan dalam penggunaan TIK, dengan inisiatif atau pedoman yang menghormati hak-hak privasi, proteksi konsumen dan datanya.

g) Berbagi praktek-praktek yang baik dalam bidang keamanan informasi dan keamanan jaringan, serta mendorong penggunaannya oleh semua kelompok yang berkepentingan.

h) Mengajak negara-negara yang berminat untuk menyusun titik-titik pusat penanganan dan penanggulangan yang terjadi saat itu, dan mengembangkan jaringan kerjasama antara titik-titik pusat tersebut untuk berbagi informasi dan teknologi dalam penanggulangan kejadian.

i) Encourage further development of secure and reliable applications to facilitate online transactions.

j) Encourage interested countries to contribute actively to the ongoing United Nations activities to build confidence and security in the use of ICTs.

C6. Enabling environment

13. To maximize the social, economic and environmental benefits of the Information Society, governments need to create a trustworthy, transparent and non-discriminatory legal, regulatory and policy environment. Actions include:

a) Governments should foster a supportive, transparent, pro-competitive and predictable policy, legal and regulatory framework, which provides the appropriate incentives to investment and community development in the Information Society.

b) **We ask** the Secretary General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in an open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of governments, the private sector and civil society from both developing and developed countries, involving relevant intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and make proposals for action, as appropriate, on the governance of Internet by 2005. The group should, *inter alia*:

i) develop a working definition of Internet governance;

ii) identify the public policy issues that are relevant to Internet governance;

iii) develop a common understanding of the respective roles and responsibilities of governments, existing intergovernmental and international organisations and other forums as well as the private sector and civil society from both developing and developed countries;

iv) prepare a report on the results of this activity to be presented for consideration and appropriate action for the second phase of WSIS in Tunis in 2005.

c) Governments are invited to:

i) facilitate the establishment of national and regional Internet Exchange Centres;

i) Mendorong pengembangan aplikasi yang aman dan dapat dipercaya untuk memudahkan transaksi-transaksi elektronik lebih lanjut.

j) Mendorong negara-negara yang berminat untuk memberi kontribusi secara aktif terhadap kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berlangsung untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK.

C6. Lingkungan yang memberdayakan

13. Untuk memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat Informasi, pemerintah perlu menciptakan peraturan dan kebijakan lingkungan yang dapat dipercaya, transparan, serta non-diskriminatif. Tindakan-tindakan mencakup:

a) Pemerintah harus mempromosikan suatu kebijakan yang transparan, pro-kompetisi dan dapat diprediksi, kerangka peraturan dan hukum yang mendukung, yang menyediakan insentif yang sesuai terhadap investasi dan pembangunan komunitas dalam Masyarakat Informasi.

b) **Kita meminta** kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk kelompok kerja tentang pengelolaan Internet, dalam suatu proses yang terbuka dan inklusif yang menjamin mekanisme keikutsertaan penuh dan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, baik dari negara-negara mpromosi maupun berkembang, yang melibatkan organisasi-organisasi antar pemerintahan serta organisasi internasional yang terkait, dan forum-forum untuk melakukan penelitian dan membuat proposal untuk tindakan yang diperlukan, dalam pengelolaan Internet menjelang 2005. Kelompok tersebut harus, *antara lain*

i) mengembangkan definisi kerja pengelolaan Internet;

ii) mengidentifikasi permasalahan kebijakan umum yang terkait dengan pengelolaan Internet;

iii) mengembangkan pengertian bersama terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah, organisasi antar pemerintahan dan organisasi internasional yang ada dan forum lain, serta sektor swasta dan masyarakat sipil dari negara-negara berkembang dan negara mpromosi.

iv) menyiapkan laporan mengenai hasil-hasil kegiatan ini untuk dipresentasikan sebagai bahan pertimbangan dan tindakan yang sesuai pada tahap ke dua WSIS di Tunis dalam tahun 2005.

c) Pemerintah dihimbau untuk:

i) memfasilitasi pendirian Pusat-Pusat Penyambungan Internet nasional dan regional;

ii) manage or supervise, as appropriate, their respective country code top-level domain name (ccTLD);

iii) promote awareness of the Internet.

d) In cooperation with the relevant stakeholders, promote regional root servers and the use of internationalized domain names in order to overcome barriers to access.

e) Governments should continue to update their domestic consumer protection laws to respond to the new requirements of the Information Society.

f) Promote effective participation by developing countries and countries with economies in transition in international ICT forums and create opportunities for exchange of experience.

g) Governments need to formulate national strategies, which include e-government strategies, to make public administration more transparent, efficient and democratic.

h) Develop a framework for the secure storage and archival of documents and other electronic records of information.

i) Governments and stakeholders should actively promote user education and awareness about online privacy and the means of protecting privacy.

j) Invite stakeholders to ensure that practices designed to facilitate electronic commerce also permit consumers to have a choice as to whether or not to use electronic communication.

k) Encourage the ongoing work in the area of effective dispute settlement systems, notably alternative dispute resolution (ADR), which can promote settlement of disputes.

l) Governments, in collaboration with stakeholders, are encouraged to formulate conducive ICT policies that foster entrepreneurship, innovation and investment, and with particular reference to the promotion of participation by women.

m) Recognizing the economic potential of ICTs for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), they should be assisted in increasing their competitiveness by streamlining administrative procedures, facilitating their access to capital and enhancing their capacity to participate in ICT-related projects.

ii) mengelola atau mengawasi, seperlunya, nama ranah tingkat-tinggi kode negara (ccTLD) mereka;

iii) Mempromosikan kesadaran terhadap Internet.

d) Melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait, mempromosikan server-server induk regional dan penggunaan nama ranah yang diinternasionalisasikan dalam usaha mengatasi rintangan ke akses.

e) Pemerintah harus terus memperbaharui hukum perlindungan konsumen domestik mereka untuk menanggapi tuntutan baru Masyarakat Informasi.

f) Mempromosikan partisipasi efektif negara-negara berkembang serta negara-negara dengan ekonomi dalam transisi di forum-forum TIK internasional dan menciptakan peluang-peluang untuk pertukaran pengalaman.

g) Pemerintah perlu merumuskan strategi-strategi nasional, termasuk strategi e-pemerintah, untuk membuat administrasi publik lebih transparan, efisien, serta demokratis.

h) Mengembangkan kerangka untuk mengamankan penyimpanan dan pengarsipan dokumen-dokumen dan catatan informasi elektronik lainnya.

i) Pemerintah dan para pemangku kepentingan wajib secara aktif mempromosikan pendidikan untuk para pengguna dan kesadaran mengenai privasi online dan cara-cara untuk melindungi privasi.

j) Mengajak para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa praktek-praktek yang dirancang untuk memudahkan perniagaan elektronik juga membolehkan konsumen untuk memiliki pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan komunikasi elektronik.

k) Mendorong pekerjaan yang sedang berlangsung di bidang sistem penyelesaian perselisihan secara efektif, khususnya Resolusi Perselisihan Alternatif (ADR), yang dapat mempromosikan penyelesaian perselisihan.

l) Pemerintah, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, disarankan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan TIK yang kondusif, yang menggalkan usaha-usaha mandiri, inovasi, serta investasi, dengan rujukan khusus mengenai promosi keikutsertaan perempuan.

m) Mengenali potensi ekonomi TIK untuk usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), mereka harus dibantu dalam meningkatkan daya saing dengan memperlancar prosedur-prosedur administratif, memudahkan akses terhadap modal dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang terkait dengan TIK.

n) Governments should act as model users and early adopters of e-commerce in accordance with their level of socio-economic development.

o) Governments, in cooperation with other stakeholders, should raise awareness of the importance of international interoperability standards for global e-commerce.

p) Governments, in cooperation with other stakeholders, should promote the development and use of open, interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards.

q) ITU, pursuant to its treaty capacity, coordinates and allocates frequencies with the goal of facilitating ubiquitous and affordable access.

r) Additional steps should be taken in ITU and other regional organisations to ensure rational, efficient and economical use of, and equitable access to, the radio-frequency spectrum by all countries, based on relevant international agreements.

C7. ICT applications: benefits in all aspects of life

14. ICT applications can support sustainable development, in the fields of public administration, business, education and training, health, employment, environment, agriculture and science within the framework of national e-strategies. This would include actions within the following sectors:

15. E-government

a) Implement e-government strategies focusing on applications aimed at innovating and promoting transparency in public administrations and democratic processes, improving efficiency and strengthening relations with citizens.

b) Develop national e-government initiatives and services, at all levels, adapted to the needs of citizens and business, to achieve a more efficient allocation of resources and public goods.

c) Support international cooperation initiatives in the field of e-government, in order to enhance transparency, accountability and efficiency at all levels of government.

n) Pemerintah harus bertindak sebagai model pemakai dan pengadopsi awal e-perdagangan sesuai dengan tingkat perkembangan sosial-ekonomi mereka.

o) Pemerintah, melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan, harus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya standar-standar inter-operabilitas internasional untuk e-perdagangan global.

p) Pemerintah, melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan, harus mempromosikan pengembangan serta penggunaan standar terbuka, dapat berinteroperasi, non-diskriminatif, dan yang didorong kebutuhan.

q) ITU, sesuai dengan kewenangan perjanjiannya, mengkoordinasikan dan mengalokasikan frekuensi dengan tujuan untuk memfasilitasi akses yang tersebar ke semua penjuru dan aksesnya terjangkau oleh siapapun.

r) Langkah-langkah tambahan harus diambil oleh ITU dan organisasi-organisasi regional lainnya untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang rasional, efisien serta ekonomis, dan memiliki akses sederajat, bagi semua negara, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang relevan.

C7. Aplikasi-aplikasi TIK: manfaat dalam semua aspek kehidupan

14. Aplikasi-aplikasi TIK dapat mendukung perkembangan yang berkesinambungan, di bidang-bidang administrasi publik, bisnis, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, serta ilmu pengetahuan, dalam kerangka e-strategi nasional. Hal ini akan mencakup tindakan-tindakan dalam sektor berikut:

15. E-pemerintah

a) Mengimplementasikan strategi-strategi e-pemerintah yang memfokuskan pada aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk berinovasi serta mempromosikan transparansi dalam administrasi publik dan proses demokrasi, meningkatkan efisiensi dan memperkuat hubungan dengan penduduk.

b) Mengembangkan inisiatif dan pelayanan e-pemerintah nasional, pada semua tingkat, disesuaikan dengan kebutuhan penduduk dan bisnis, untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan barang-peralatan publik yang lebih efisien.

c) Mendukung prakarsa kerjasama internasional di bidang e-pemerintah, dalam usaha untuk meningkatkan transparansi, tanggung-jawab, dan efisiensi di semua tingkatan pemerintahan.

16. E-business

a) Governments, international organizations and the private sector, are encouraged to promote the benefits of international trade and the use of e-business, and promote the use of e-business models in developing countries and countries with economies in transition.

b) Through the adoption of an enabling environment, and based on widely available Internet access, governments should seek to stimulate private sector investment, foster new applications, content development and public/private partnerships.

c) Government policies should favour assistance to, and growth of SMMEs, in the ICT industry, as well as their entry into e-business, to stimulate economic growth and job creation as an element of a strategy for poverty reduction through wealth creation.

17. E-learning (see section C4)**18. E-health**

a) Promote collaborative efforts of governments, planners, health professionals, and other agencies along with the participation of international organizations for creating a reliable, timely, high quality and affordable health care and health information systems and for promoting continuous medical training, education, and research through the use of ICTs, while respecting and protecting citizens' right to privacy.

b) Facilitate access to the world's medical knowledge and locally-relevant content resources for strengthening public health research and prevention programmes and promoting women's and men's health, such as content on sexual and reproductive health and sexually transmitted infections, and for diseases that attract full attention of the world including HIV/AIDS, malaria and tuberculosis.

c) Alert, monitor and control the spread of communicable diseases, through the improvement of common information systems.

d) Promote the development of international standards for the exchange of health data, taking due account of privacy concerns.

e) Encourage the adoption of ICTs to improve and extend health care and health information systems to remote and underserved areas and vulnerable populations, recognising women's roles as health providers in their families and communities.

16. E-bisnis

a) Pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan pihak swasta, didorong untuk mempromosikan manfaat perdagangan internasional serta penggunaan e-bisnis, dan mendorong penggunaan model e-bisnis di negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi.

b) Melalui penentuan lingkungan yang memberdayakan, dan berdasarkan akses internet yang tersedia secara luas, pemerintah harus menstimulasi investasi sektor swasta, mendorong aplikasi baru, pengembangan konten, dan kemitraan publik/swasta..

c) Kebijakan pemerintah harus mendahulukan bantuan, serta pertumbuhan UKMM, dalam industri TIK, serta untuk masuknya e-bisnis, menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai elemen-elemen strategi bagi pengurangan kemiskinan melalui penciptaan kemakmuran.

17. E-pembelajaran (lihat nomer C4)**18. E- kesehatan**

a) Mempromosikan usaha-usaha kerjasama dari pemerintah, perencana, ahli kesehatan, serta badan lainnya sejalan dengan keikutsertaan organisasi-organisasi internasional untuk menciptakan perawatan kesehatan serta sistem informasi kesehatan yang dipercaya, tepat pada waktunya, berkualitas tinggi, dan terjangkau, dan untuk mempromosikan pelatihan, pendidikan, serta penelitian medis yang berkesinambungan melalui penggunaan TIK, sambil menghormati dan melindungi hak-hak privasi rakyat.

b) Memudahkan akses terhadap pengetahuan medis dunia dan sumber daya konten lokal yang relevan untuk memperkuat penelitian kesehatan umum dan program-program pencegahan, serta mempromosikan kesehatan perempuan dan laki-laki, seperti konten mengenai kesehatan seksual dan reproduksi serta infeksi penularan seksual, juga untuk penyakit-penyakit yang menarik perhatian penuh dunia, termasuk HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosa.

d) Mewaspada, memonitor, dan mengontrol penyebaran penyakit menular, melalui perbaikan sistem informasi untuk umum.

d) Mempromosikan pengembangan standar internasional untuk pertukaran data kesehatan, dengan mempertimbangkan masalah privasi.

e) Mendorong penggunaan TIK untuk memperbaiki dan menyampaikan jasa perawatan kesehatan serta sistem informasi kesehatan ke daerah terpencil dan kurang terlayani, penduduk rentan, menghargai peran wanita sebagai pemelihara kesehatan dalam keluarga dan masyarakat mereka.

f) Strengthen and expand ICT-based initiatives for providing medical and humanitarian assistance in disasters and emergencies.

19. E-employment

a) Encourage the development of best practices for e-workers and e-employers built, at the national level, on principles of fairness and gender equality, respecting all relevant international norms.

b) Promote new ways of organizing work and business with the aim of raising productivity, growth and well-being through investment in ICTs and human resources.

c) Promote teleworking to allow citizens, particularly in the developing countries, LDCs, and small economies, to live in their societies and work anywhere, and to increase employment opportunities for women, and for those with disabilities. In promoting teleworking, special attention should be given to strategies promoting job creation and the retention of the skilled working force.

d) Promote early intervention programmes in science and technology that should target young girls to increase the number of women in ICT carriers.

20. E-environment

a) Governments, in cooperation with other stakeholders are encouraged to use and promote ICTs as an instrument for environmental protection and the sustainable use of natural resources.

b) Government, civil society and the private sector are encouraged to initiate actions and implement projects and programmes for sustainable production and consumption and the environmentally safe disposal and recycling of discarded hardware and components used in ICTs.

c) Establish monitoring systems, using ICTs, to forecast and monitor the impact of natural and man-made disasters, particularly in developing countries, LDCs and small economies.

21. E-agriculture

a) Ensure the systematic dissemination of information using ICTs on agriculture, animal husbandry, fisheries, forestry and food, in order to provide ready access to

f) Memperkuat dan memperluas inisiatif-inisiatif berbasis-TIK untuk menyediakan bantuan medis dan kemanusiaan dalam bencana dan keadaan darurat.

19. E-kepegawaian

a) Mendorong pengembangan praktek terbaik untuk e-pekerja dan e-pegawai, dibangun pada tingkat nasional, berdasar prinsip keadilan dan persamaan gender, dengan menghormati semua norma internasional yang sesuai.

b) Mempromosikan cara-cara baru untuk mengatur pekerjaan dan bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan, melalui investasi di TIK serta sumber daya manusia.

c) Mempromosikan kerja jarak jauh untuk memungkinkan rakyat, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang, serta negara-negara ekonomi lemah, tinggal di masyarakat mereka dan bekerja di mana saja, serta mempromosikan kesempatan kerja untuk perempuan, dan mereka yang cacat. Dalam mempromosikan sistem pekerjaan jarak jauh, perhatian khusus harus diberikan untuk strategi mempromosikan penciptaan lapangan kerja serta mempertahankan tenaga kerja terampil.

d) Mempromosikan program-program intervensi awal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus mentargetkan anak gadis muda untuk meningkatkan jumlah perempuan dewasa dalam karir TIK.

20. E-lingkungan

a) Pemerintah, melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya, disarankan untuk menggunakan dan mempromosikan TIK sebagai alat untuk melindungi lingkungan hidup serta kesinambungan penggunaan sumber daya alam.

b) Pemerintah, masyarakat umum, dan sektor swasta disarankan untuk memulai tindakan serta melaksanakan proyek dan program untuk kesinambungan produksi dan konsumsi, serta pembuangan dan daur-ulangan perangkat keras dan komponen terpakai dalam TIK, yang ramah lingkungan..

c) Membangun sistem pengawasan, menggunakan TIK, untuk meramal dan memonitor dampak dari bencana alam dan buatan manusia, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang serta ekonomi lemah.

21. E-pertanian

a) Memastikan penyebaran informasi secara sistematis menggunakan TIK pada pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan makanan, untuk mengusahakan

comprehensive, up-to-date and detailed knowledge and information, particularly in rural areas.

b) Public-private partnerships should seek to maximize the use of ICTs as an instrument to improve production (quantity and quality).

22. E-science

a) Promote affordable and reliable high-speed Internet connection for all universities and research institutions to support their critical role in information and knowledge production, education and training, and to support the establishment of partnerships, cooperation and networking between these institutions.

b) Promote electronic publishing, differential pricing and open access initiatives to make scientific information affordable and accessible in all countries on an equitable basis.

c) Promote the use of peer-to-peer technology to share scientific knowledge and pre-prints and reprints written by scientific authors who have waived their right to payment.

d) Promote the long-term systematic and efficient collection, dissemination and preservation of essential scientific digital data, for example, population and meteorological data in all countries.

e) Promote principles and metadata standards to facilitate cooperation and effective use of collected scientific information and data as appropriate to conduct scientific research.

C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content

23. Cultural and linguistic diversity, while stimulating respect for cultural identity, traditions and religions, is essential to the development of an Information Society based on the dialogue among cultures and regional and international cooperation. It is an important factor for sustainable development.

a) Create policies that support the respect, preservation, promotion and enhancement of cultural and linguistic diversity and cultural heritage within the Information Society, as reflected in relevant agreed United Nations documents, including UNESCO's *Universal Declaration on Cultural Diversity*. This includes encouraging governments to design cultural policies to promote the production of cultural, educational and scientific content and the development of local cultural industries suited to the linguistic and cultural context of the users.

ketersediaan akses terhadap pengetahuan serta informasi yang luas, mengikuti perkembangan, dan terinci, khususnya di daerah-daerah terpencil.

b) Kemitraan publik-swasta harus mengupayakan penggunaan maksimal TIK sebagai alat untuk memperbaiki produksi (kuantitas dan kualitas).

22. E-ilmu pengetahuan

a) Mempromosikan koneksi internet kecepatan tinggi yang terjangkau dan handal untuk semua universitas dan institusi penelitian untuk mendukung peran penting mereka dalam produksi informasi dan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, serta untuk mendukung pembangunan kemitraan, kerjasama, dan jaringan antara institusi-institusi tersebut.

b) Mempromosikan penerbitan elektronik, penetapan harga deferensial, dan inisiatif-inisiatif akses terbuka untuk membuat informasi ilmiah terjangkau dan dapat diakses di semua negara atas dasar kesederajatan.

c) Mempromosikan penggunaan teknologi antar-mitra ('peer-to peer') untuk berbagi pengetahuan ilmiah serta pra-cetak dan cetak-ulang yang ditulis pengarang-pengarang ilmiah yang sudah melepaskan hak imbalan mereka.

d) Mempromosikan pengumpulan jangka panjang yang sistematis dan efisien, penyebaran dan pengawetan data ilmiah digital yang esensial, contohnya, data kependudukan dan meteorologi di semua negara.

e) Mempromosikan dasar-dasar dan standar metadata untuk memudahkan kerjasama serta penggunaan yang efektif proses pengumpulan informasi dan data ilmiah yang sesuai untuk melakukan penelitian ilmiah.

C8. Keragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan konten lokal.

23. Keragaman budaya dan bahasa, seraya menstimulasikan penghargaan atas identitas budaya, tradisi, serta agama, adalah esensial untuk pengembangan Masyarakat Informasi yang berdasarkan dialog antar budaya dan kerjasama antar daerah dan internasional. Hal ini merupakan faktor penting untuk pembangunan yang berkesinambungan.

a) Membuat kebijakan yang mendukung penghormatan, pemeliharaan, promosi, dan peningkatan keragaman budaya serta bahasa, juga warisan budaya dalam Masyarakat Informasi, seperti yang tercermin dalam dokumen-dokumen yang sesuai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disetujui, termasuk *Deklarasi Keragaman Budaya Sedunia* dari UNESCO. Ini termasuk mendukung pemerintah untuk merancang kebijakan kebudayaan untuk mempromosikan produksi konten kebudayaan, pendidikan, dan ilmiah, serta pengembangan industri kebudayaan lokal yang disesuaikan dengan konteks bahasa dan budaya dari pengguna.

b) Develop national policies and laws to ensure that libraries, archives, museums and other cultural institutions can play their full role of content-including traditional knowledge-providers in the Information Society, more particularly by providing continued access to recorded information.

c) Support efforts to develop and use ICTs for the preservation of natural and, cultural heritage, keeping it accessible as a living part of today's culture. This includes developing systems for ensuring continued access to archived digital information and multimedia content in digital repositories, and support archives, cultural collections and libraries as the memory of humankind.

d) Develop and implement policies that preserve, affirm, respect and promote diversity of cultural expression and indigenous knowledge and traditions through the creation of varied information content and the use of different methods, including the digitization of the educational, scientific and cultural heritage.

e) Support local content development, translation and adaptation, digital archives, and diverse forms of digital and traditional media by local authorities. These activities can also strengthen local and indigenous communities.

f) Provide content that is relevant to the cultures and languages of individuals in the Information Society, through access to traditional and digital media services.

g) Through public/private partnerships, foster the creation of varied local and national content, including that available in the language of users, and give recognition and support to ICT-based work in all artistic fields.

h) Strengthen programmes focused on gender-sensitive curricula in formal and non-formal education for all and enhancing communication and media literacy for women with a view to building the capacity of girls and women to understand and to develop ICT content.

i) Nurture the local capacity for the creation and distribution of software in local languages, as well as content that is relevant to different segments of population, including non-literate, persons with disabilities, disadvantaged and vulnerable groups especially in developing countries and countries with economies in transition.

j) Give support to media based in local communities and support projects combining the use of traditional media and new technologies for their role in

b) Mengembangkan kebijakan nasional dan hukum untuk memastikan bahwa perpustakaan, kantor arsip, museum, dan institusi-institusi kebudayaan lainnya dapat menjalankan peran konten mereka sepenuhnya - termasuk pengetahuan tradisional - penyedia dalam Masyarakat Informasi, lebih khususnya dengan menyediakan akses berkelanjutan terhadap informasi tertulis

c) Mendukung usaha-usaha untuk mengembangkan dan menggunakan TIK untuk pelestarian warisan alamiah dan kebudayaan, menjaga untuk dapat diakses sebagai bagian kebudayaan hidup masa kini. Ini termasuk mengembangkan sistem untuk memastikan kesinambungan akses arsip informasi digital serta konten multimedia dalam gudang digital, dan mendukung arsip, koleksi kebudayaan, dan perpustakaan- sebagai daya ingat manusia.

d) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang melestarikan, menegaskan, menghormati, dan mempromosikan keragaman ungkapan budaya serta pengetahuan dan tradisi asli, melalui penciptaan berbagai konten informasi dan penggunaan berbagai cara, termasuk digitisasi warisan pendidikan, ilmiah, dan kebudayaan.

e) Mendukung pengembangan, penterjemahan dan adaptasi, pengarsipan digital konten lokal, dan berbagai bentuk media digital dan tradisional oleh para pihak otoritas lokal. Aktivitas tersebut dapat juga memperkuat komunitas-komunitas lokal dan asli.

f) Menyediakan konten yang sesuai terhadap kebudayaan dan bahasa individu-individu dalam Masyarakat Informasi, melalui akses terhadap pelayanan media tradisional dan digital.

g) Melalui kemitraan publik/swasta, mengasuh penciptaan berbagai konten lokal dan nasional, termasuk yang tersedia dalam bahasa pengguna, serta memberi pengakuan dan dukungan terhadap hasil kerja berbasis-TIK di semua bidang seni.

h) Memperkuat program-program yang berfokus pada kurikulum peka-gender dalam pendidikan formal dan non-formal untuk semua, serta meningkatkan komunikasi dan kemampuan membaca media bagi perempuan dengan tujuan untuk pengembangan kemampuan anak gadis dan perempuan dewasa untuk mengerti dan mengembangkan konten TIK.

i) Memupuk kemampuan lokal dalam penciptaan dan distribusi perangkat lunak dalam bahasa lokal, serta konten yang sesuai terhadap segmen-segmen penduduk yang berbeda, termasuk tuna aksara, orang cacat, kelompok yang berkekurangan serta rentan, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi ekonomi.

j) Memberi dukungan kepada media yang bermukim dalam komunitas lokal dan mendukung proyek-proyek dengan menggabungkan penggunaan media

facilitating the use of local languages, for documenting and preserving local heritage, including landscape and biological diversity, and as a means to reach rural and isolated and nomadic communities.

k) Enhance the capacity of indigenous peoples to develop content in their own languages.

l) Cooperate with indigenous peoples and traditional communities to enable them to more effectively use and benefit from the use of their traditional knowledge in the Information Society.

m) Exchange knowledge, experiences and best practices on policies and tools designed to promote cultural and linguistic diversity at regional and sub-regional levels. This can be achieved by establishing regional, and sub-regional working groups on specific issues of this *Plan of Action* to foster integration efforts.

n) Assess at the regional level the contribution of ICT to cultural exchange and interaction, and based on the outcome of this assessment, design relevant programmes.

o) Governments, through public/private partnerships, should promote technologies and R&D programmes in such areas as translation, iconographies, voice-assisted services and the development of necessary hardware and a variety of software models, including proprietary, open source software and free software, such as standard character sets, language codes, electronic dictionaries, terminology and thesauri, multilingual search engines, machine translation tools, internationalized domain names, content referencing as well as general and application software.

C9. Media

24. The media-in their various forms and with a diversity of ownership-as an actor, have an essential role in the development of the Information Society and are recognized as an important contributor to freedom of expression and plurality of information.

a) Encourage the media-print and broadcast as well as new media-to continue to play an important role in the Information Society.

b) Encourage the development of domestic legislation that guarantees the independence and plurality of the media.

tradisional dan teknologi baru untuk peran mereka dalam memudahkan penggunaan bahasa lokal, untuk mendokumentasikan dan melestarikan warisan lokal, termasuk keragaman pemandangan dan biologi, dan sebagai cara untuk mencapai komunitas pedesaan dan terpencil, dan pengembara.

k) Meningkatkan kemampuan penduduk asli untuk mengembangkan konten dalam bahasa mereka sendiri.

l) Bekerjasama dengan penduduk pribumi dan komunitas tradisional untuk memungkinkan mereka untuk menggunakan secara lebih efektif dan memanfaatkan penggunaan pengetahuan tradisional mereka dalam Masyarakat Informasi.

m) Bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktek-praktek terbaik mengenai kebijakan dan perangkat yang dirancang untuk mempromosikan keragaman budaya dan bahasa pada tingkat regional dan sub-regional. Hal ini dapat dicapai dengan mendirikan kelompok-kelompok kerja regional dan sub regional mengenai persoalan-persoalan spesifik dalam *Rencana Aksi* untuk mengasuh usaha-usaha integrasi.

n) Mengevaluasi di tingkat regional kontribusi TIK terhadap pertukaran dan interaksi budaya, dan berdasarkan hasil evaluasi ini, merancang program-program yang sesuai

o) Pemerintah, melalui kemitraan publik/swasta, harus mempromosikan program teknologi serta penelitian dan pengembangan di bidang seperti penerjemahan, ikonografi, layanan bantu suara, dan pengembangan perangkat keras yang diperlukan dan beragam model perangkat lunak, termasuk kepemilikan, perangkat lunak sumber/ kode terbuka, dan perangkat lunak bebas, seperti rangkaian karakter standar, kode bahasa, kamus elektronik, terminologi dan kamus, mesin pencari multi-bahasa, alat penerjemah mesin, nama ranah yang diinternasionalisasikan, rujukan konten, serta perangkat lunak umum dan aplikasi.

C9. Media

24. Media - dalam berbagai bentuk mereka dan dengan keragaman kepemilikan - sebagai pemeran, memiliki peran esensial dalam pengembangan Masyarakat Informasi dan diakui sebagai kontributor penting untuk kebebasan berekspresi serta kejamakan informasi.

a) Mendorong media-cetak dan siaran serta media baru untuk terus memainkan peran penting dalam Masyarakat Informasi.

b) Mendorong pengembangan peraturan perundang-undangan domestik yang menjamin kemerdekaan dan kejamakan media.

c) Take appropriate measures-consistent with freedom of expression-to combat illegal and harmful content in media content.

d) Encourage media professionals in developed countries to establish partnerships and networks with the media in developing ones, especially in the field of training.

e) Promote balanced and diverse portrayals of women and men by the media.

f) Reduce international imbalances affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development of human skills, taking full advantage of ICT tools in this regard.

g) Encourage traditional media to bridge the knowledge divide and to facilitate the flow of cultural content, particularly in rural areas.

C10. Ethical dimensions of the Information Society

25. The Information Society should be subject to universally held values and promote the common good and to prevent abusive uses of ICTs.

a) Take steps to promote respect for peace and to uphold the fundamental values of freedom, equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature.

b) All stakeholders should increase their awareness of the ethical dimension of their use of ICTs.

c) All actors in the Information Society should promote the common good, protect privacy and personal data and take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, human beings.

d) Invite relevant stakeholders, especially the academia, to continue research on ethical dimensions of ICTs.

c) Mengambil langkah-langkah seperlunya - konsisten dengan kebebasan berekspresi - untuk memerangi konten ilegal dan merusak dalam konten media.

d) Mendorong ahli-ahli media di negara-negara mpromosi untuk mendirikan kemitraan dan jaringan dengan media di negara-negara berkembang, terutama di bidang pelatihan.

e) Mempromosikan penampilan perempuan dan laki-laki yang seimbang dan majemuk oleh media.

f) Mengurangi ketidakseimbangan internasional yang mempengaruhi media, khususnya berkenaan dengan infrastruktur, sumber daya teknis, serta pengembangan ketrampilan manusia, dengan memanfaatkan keuntungan penuh peralatan TIK.

g) Mendorong media tradisional untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan untuk memudahkan arus konten kebudayaan, khususnya di daerah-daerah pedalaman.

C10. Dimensi etika Masyarakat Informasi

25. Masyarakat Informasi harus menjadi subyek terhadap nilai-nilai universal dan mempromosikan kebaikan bersama dan mencegah penyalahgunaan TIK.

a) Mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan penghargaan terhadap perdamaian dan menjunjung nilai-nilai fundamental kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap alam.

b) Semua pemangku kepentingan harus meningkatkan kesadaran mereka terhadap dimensi etika dan penggunaan TIK.

c) Semua pemeran dalam Masyarakat Informasi harus mempromosikan kebaikan bersama, melindungi privasi dan data pribadi serta mengambil tindakan yang sesuai dan langkah-langkah pencegahan, seperti ditentukan hukum, melawan penyalahgunaan TIK seperti tindakan ilegal dan tindakan lainnya yang dimotivasi rasisme, diskriminasi ras, xenophobia, dan ketidak-toleransian terkait, kebencian, kekerasan, semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk pedofilia dan pornografi anak, serta perdagangan dalam, dan eksploitasi terhadap kemanusiaan.

d) Mengundang para pemangku kepentingan yang sesuai, khususnya akademik, untuk melanjutkan penelitian terhadap dimensi-dimensi etika TIK.

C11. International and regional cooperation

26. International cooperation among all stakeholders is vital in implementation of this *Plan of Action* and needs to be strengthened with a view to promoting universal access and bridging the digital divide, *inter alia*, by provision of means of implementation.

a) Governments of developing countries should raise the relative priority of ICT projects in requests for international cooperation and assistance on infrastructure development projects from developed countries and international financial organizations.

b) Within the context of the UN's *Global Compact* and building upon the *United Nations Millennium Declaration*, build on and accelerate public-private partnerships, focusing on the use of ICT in development.

c) Invite international and regional organizations to mainstream ICTs in their work programmes and to assist all levels of developing countries, to be involved in the preparation and implementation of national action plans to support the fulfilment of the goals indicated in the *Declaration of Principles* and in this *Plan of Action*, taking into account the importance of regional initiatives.

C11. Kerjasama internasional dan regional

26. Kerjasama internasional antara semua pemangku kepentingan adalah vital dalam pelaksanaan *Rencana Aksi* ini dan perlu diperkokoh dengan gambaran untuk mempromosikan akses universal dan menjembatani kesenjangan digital, *antara lain*, dengan penyediaan sarana untuk implementasinya.

a) Pemerintah dari negara-negara berkembang harus meningkatkan prioritas yang terkait proyek-proyek TIK dalam permohonan untuk kerjasama internasional dan bantuan terhadap proyek-proyek pengembangan infrastruktur negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi keuangan internasional.

b) Dalam konteks *Kompak Global* PBB dan berdasarkan pada *Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa*, membangun dan mengakselerasi kemitraan publik-privat, dengan memfokuskan pada penggunaan TIK dalam pengembangan.

c) Mengundang organisasi-organisasi internasional dan regional untuk mengarus-utamakan TIK dalam program-program kerja mereka dan untuk membantu semua tingkat negara-negara berkembang, untuk terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan rencana-rencana aksi nasional untuk mendukung pemenuhan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip* serta dalam *Rencana Aksi*, dengan memperhitungkan kepentingan inisiatif regional.

D. Digital Solidarity Agenda

27. The Digital Solidarity Agenda aims at putting in place the conditions for mobilizing human, financial and technological resources for inclusion of all men and women in the emerging Information Society. Close national, regional and international cooperation among all stakeholders in the implementation of this Agenda is vital. To overcome the digital divide, **we need** to use more efficiently existing approaches and mechanisms and fully explore new ones, in order to provide financing for the development of infrastructure, equipment, capacity building and content, which are essential for participation in the Information Society.

D1. Priorities and strategies

- a)** National e-strategies should be made an integral part of national development plans, including Poverty Reduction Strategies.
- b)** ICTs should be fully mainstreamed into strategies for Official Development Assistance (ODA)
- c)** through more effective donor information-sharing and co-ordination, and through analysis and sharing of best practices and lessons learned from experience with ICT-for-development programmes.

D2. Mobilizing resources

- a)** All countries and international organizations should act to create conditions conducive to increasing the availability and effective mobilization of resources for financing development as elaborated in the *Monterrey Consensus*.
- b)** Developed countries should make concrete efforts to fulfil their international commitments to financing development including the *Monterrey Consensus*, in which developed countries that have not done so are urged to make concrete efforts towards the target of 0.7 per cent of gross national product (GNP) as ODA to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of GNP of developed countries to least developed countries.
- c)** For those developing countries facing unsustainable debt burdens, **we welcome** initiatives that have been undertaken to reduce outstanding indebtedness and invite further national and international measures in that regard, including, as appropriate, debt cancellation and other arrangements. Particular attention should be given to enhancing the Heavily Indebted Poor Countries initiative. These

D. Agenda Solidaritas Digital

27. Agenda Solidaritas Digital bertujuan untuk menempatkan dengan benar kondisi untuk memobilisasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk memasukkan semua pria dan wanita dalam Masyarakat Informasi yang timbul. Kerjasama erat nasional, regional, dan internasional di antara semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan agenda ini adalah vital. Untuk mengatasi kesenjangan digital, **kita perlu** menggunakan pendekatan serta mekanisme yang telah ada secara lebih efisien, dan mengeksplorasi yang baru sepenuhnya, dalam upaya untuk menyediakan pembiayaan terhadap pengembangan infrastruktur, perlengkapan, pembangunan kapasitas, dan konten, yang esensial untuk keikutsertaan dalam Masyarakat Informasi.

D1. Prioritas dan strategi

- a)** E-strategi nasional harus dijadikan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, termasuk Strategi Penurunan Kemiskinan.
- b)** TIK harus diurus-utamakan sepenuhnya ke dalam strategi untuk Bantuan Pengembangan Resmi (ODR).
- c)** melalui bantuan berbagi informasi dan koordinasi, dan melalui analisa dan berbagi praktek terbaik serta pelajaran yang diperoleh dari pengalaman dengan TIK untuk program pengembangan.

D2. Mobilisasi sumber daya

- a)** Semua negara dan organisasi-organisasi internasional harus bertindak untuk menciptakan keadaan kondusif untuk meningkatkan ketersediaan dan keefektifan mobilisasi sumber daya untuk pembiayaan pengembangan seperti yang diuraikan dalam *Konsensus Monterrey*.
- b)** Negara-negara berkembang harus membuat usaha-usaha kongkrit untuk memenuhi komitmen-komitmen internasional mereka untuk pembiayaan pengembangan, termasuk *Konsensus Monterrey*, di mana negara-negara mpromosi yang belum melaksanakannya didesak untuk membuat upaya kongkrit menuju sasaran 0.7 persen Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai BPR kepada negara-negara berkembang dan 0.15 sampai 0.20 persen PNB negara-negara mpromosi untuk negara-negara terbelakang.
- c)** Untuk negara-negara berkembang yang menghadapi beban hutang yang tidak dapat ditanggung, **kita menerima** inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan untuk menurunkan keberhutangan yang telah jatuh tempo dan lebih lanjut mengundang langkah-langkah nasional dan internasional dalam hal tersebut, termasuk penghapusan hutang dan pengaturan lain yang sesuai. Perhatian khusus harus

initiatives would release more resources that may be used for financing ICT for development projects.

d) Recognizing the potential of ICT for development we furthermore advocate:

i) developing countries to increase their efforts to attract major private national and foreign investments for ICTs through the creation of a transparent, stable and predictable enabling investment environment;

ii) developed countries and international financial organisations to be responsive to the strategies and priorities of ICTs for development, mainstream ICTs in their work programmes, and assist developing countries and countries with economies in transition to prepare and implement their national e-strategies. Based on the priorities of national development plans and implementation of the above commitments, developed countries should increase their efforts to provide more financial resources to developing countries in harnessing ICTs for development;

iii) the private sector to contribute to the implementation of this Digital Solidarity Agenda.

e) In our efforts to bridge the digital divide, **we should promote**, within our development cooperation, technical and financial assistance directed towards national and regional capacity building, technology transfer on mutually agreed terms, cooperation in R&D programmes and exchange of know-how.

f) While all existing financial mechanisms should be fully exploited, a thorough review of their adequacy in meeting the challenges of ICT for development should be completed by the end of December 2004. This review shall be conducted by a Task Force under the auspices of the Secretary-General of the United Nations and submitted for consideration to the second phase of this summit. Based on the conclusion of the review, improvements and innovations of financing mechanisms will be considered including the effectiveness, the feasibility and the creation of a voluntary Digital Solidarity Fund, as mentioned in the *Declaration of Principles*.

g) Countries should consider establishing national mechanisms to achieve universal access in both underserved rural and urban areas, in order to bridge the digital divide.

diberikan untuk meningkatkan Negara-Negara Miskin dengan Hutang Banyak. Inisiatif-inisiatif ini akan mengeluarkan lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk pembiayaan TIK untuk proyek pengembangan.

d) Mengenali potensi TIK untuk pengembangan, kita lebih lanjut menganjurkan:

i) negara-negara maju untuk meningkatkan upaya-upaya mereka untuk menarik investasi-investasi swasta nasional dan asing besar untuk TIK melalui penciptaan suasana investasi memberdayakan yang transparan, stabil, dan dapat diprediksi.

ii) negara-negara maju dan organisasi-organisasi keuangan internasional menjadi responsif terhadap strategi-strategi dan prioritas-prioritas TIK untuk pengembangan, mengarus-utamakan TIK dalam program-program kerja mereka, dan membantu negara-negara berkembang serta negara-negara dengan ekonomi dalam transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan e-strategi nasional mereka. Berdasarkan prioritas-prioritas rencana pembangunan nasional dan pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut di atas, negara-negara mpromosi harus meningkatkan upaya-upaya mereka menyediakan sumber daya keuangan untuk negara-negara berkembang dalam memanfaatkan TIK untuk pengembangan.

iii) Sektor swasta memberi kontribusi kepada pelaksanaan Agenda Solidaritas Digital ini.

e) Dalam upaya-upaya kita untuk menjembatani kesenjangan digital, **kita harus mempromosikan**, dalam kerjasama pengembangan kita, bantuan teknis dan keuangan yang diarahkan terhadap pengembangan kemampuan nasional dan regional, transfer teknologi berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, kerjasama dalam program penelitian dan pengembangan, serta pertukaran pengetahuan.

f) Saat semua mekanisme keuangan yang ada harus dieksploitasi sepenuhnya, suatu peninjauan menyeluruh terhadap kecukupan mereka dalam menemui tantangan TIK untuk pembangunan harus diselesaikan pada akhir Desember 2004. Peninjauan harus dijalankan oleh Gugus Tugas di bawah bantuan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diajukan untuk pertimbangan pada tahap ke dua KTT ini. Berdasarkan kesimpulan dari peninjauan, perbaikan dan inovasi dari mekanisme pembiayaan akan dipertimbangkan, termasuk keefektifan, kelayakan, dan penciptaan Dana Solidaritas Digital sukarela, sebagaimana disebutkan dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip*.

g) Negara-negara harus mempertimbangkan mekanisme nasional untuk mencapai akses universal di daerah pedesaan dan perkotaan yang kurang terlayani, dalam usaha untuk menjembatani kesenjangan digital.

E. Follow-up and evaluation

28. A realistic international performance evaluation and benchmarking (both qualitative and quantitative), through comparable statistical indicators and research results, should be developed to follow up the implementation of the objectives, goals and targets in the *Plan of Action*, taking into account different national circumstances.

a) In cooperation with each country concerned, develop and launch a composite ICT Development (Digital Opportunity) Index. It could be published annually, or every two years, in an ICT Development Report. The index could show the statistics while the report would present analytical work on policies and their implementation, depending on national circumstances, including gender analysis.

b) Appropriate indicators and benchmarking, including community connectivity indicators, should clarify the magnitude of the digital divide, in both its domestic and international dimensions, and keep it under regular assessment, and tracking global progress in the use of ICTs to achieve internationally agreed development goals, including those of the *Millennium Declaration*.

c) International and regional organizations should assess and report regularly on universal accessibility of nations to ICTs, with the aim of creating equitable opportunities for the growth of ICT sectors of developing countries.

d) Gender-specific indicators on ICT use and needs should be developed, and measurable performance indicators should be identified to assess the impact of funded ICT projects on the lives of women and girls.

e) Develop and launch a website on best practices and success stories, based on a compilation of contributions from all stakeholders, in a concise, accessible and compelling format, following the internationally-recognized web accessibility standards. The website could be periodically updated and turned into a permanent experience-sharing exercise.

f) All countries and regions should develop tools so as to provide statistical information on the Information Society, with basic indicators and analysis of its key dimensions. Priority should be given to setting up coherent and internationally comparable indicator systems, taking into account different levels of development.

E. Tindak Lanjut dan Evaluasi

28. Evaluasi kinerja dan pelandasan pijak internasional yang realistis (baik kualitatif maupun kuantitatif), melalui indikator statistik sebanding serta hasil penelitian, harus dikembangkan untuk tindak lanjut pelaksanaan maksud, tujuan, dan sasaran dalam *Rencana Aksi*, dengan memperhitungkan keadaan nasional yang berbeda.

a) Melalui kerjasama dengan setiap negara yang berkepentingan, mengembangkan dan meluncurkan index Pengembangan TIK (Peluang Digital) gabungan. Ini bisa diterbitkan setiap tahun, atau bahkan setiap dua tahun, dalam suatu Laporan Pembangunan TIK. Indeks ini bisa menunjukkan statistik saat laporan merepresentasikan kerja analitik mengenai kebijakan dan implementasinya, tergantung pada keadaan nasional, termasuk analisa gender.

b) Indikator dan pelandasan pijak yang sesuai, termasuk indikator konektivitas komunitas, harus menjelaskan besarnya kesenjangan digital, baik dalam dimensi domestik dan internasional, maupun menjaganya di bawah penilaian yang teratur, dan memantau kempromosian global dalam penggunaan TIK untuk mencapai tujuan pengembangan internasional yang disepakati, termasuk yang tercantum dalam *Deklarasi Milenium*.

c) Organisasi-organisasi internasional dan regional harus mengevaluasi dan melapor secara berkala mengenai aksesibilitas universal dari negara-negara terhadap TIK, dengan maksud untuk menciptakan peluang yang seadil untuk pertumbuhan sektor TIK negara-negara berkembang.

d) Indikator-indikator gender yang spesifik pada penggunaan dan kebutuhan TIK harus dikembangkan, dan indikator kinerja yang dapat diukur harus diidentifikasi untuk mengevaluasi dampak dari proyek-proyek TIK yang telah dibiayai dalam kehidupan perempuan dewasa dan anak gadis.

e) Mengembangkan dan meluncurkan website atas praktek dan sejarah sukses terbaik, berdasarkan kompilasi kontribusi dari semua pemangku kepentingan, dalam sebuah format yang ringkas, mudah diakses, menekankan, mengikuti standar aksesibilitas web yang diakui internasional. Website ini bisa dibuat kini secara berkala dan dialihkan menjadi latihan berbagi pengalaman yang permanen.

f) Semua negara dan daerah harus mengembangkan peralatan untuk menyediakan informasi statistik mengenai Masyarakat Informasi, dengan indikator-indikator dasar dan analisis dimensi kuncinya. Prioritas harus diberikan terhadap penyusunan sistem indikator yang berkaitan serta sebanding secara internasional, dengan memperhitungkan tingkat-tingkat perkembangan yang berbeda.

F) Towards WSIS phase 2 (Tunis)

29. Recalling General Assembly *Resolution 56/183* and taking into account the outcome of the Geneva phase of the WSIS, a preparatory meeting will be held in the first half of 2004 to review those issues of the Information Society which should form the focus of the Tunis phase of the WSIS and to agree on the structure of the preparatory process for the second phase. In line with the decision of this Summit concerning its Tunis phase, the second phase of the WSIS should consider, *inter alia*:

- a)** Elaboration of final appropriate documents based on the outcome of the Geneva phase of the WSIS with a view to consolidating the process of building a global Information Society, and reducing the Digital Divide and transforming it into digital opportunities.
- b)** Follow-up and implementation of the *Geneva Plan of Action* at national, regional and international levels, including the United Nations system, as part of an integrated and coordinated approach, calling upon the participation of all relevant stakeholders. This should take place, *inter alia*, through partnerships among stakeholders.

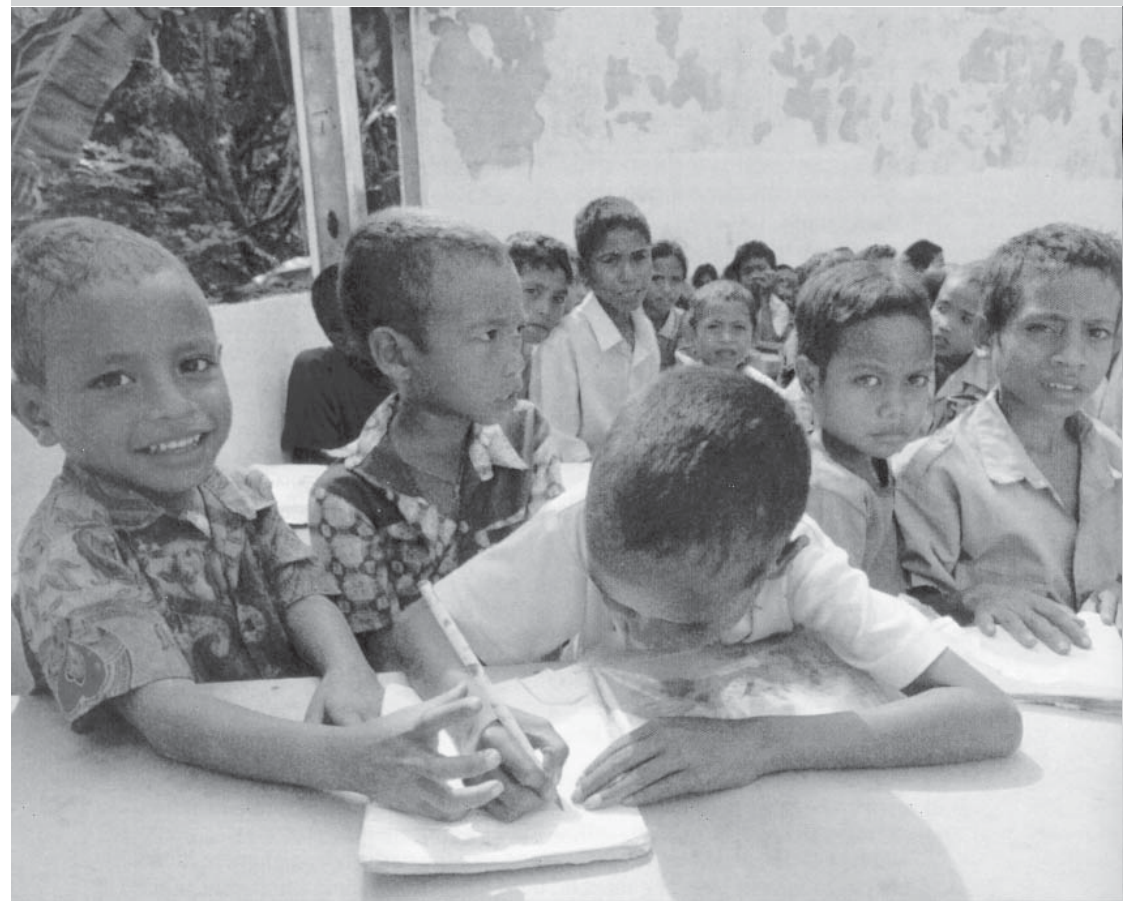
Geneva, 12 December 2003

F. Menuju WSIS Tahap 2 (Tunis)

29. Mengingat *Resolusi* Sidang Umum *56/183* dan dengan memperhitungkan hasil dari WSIS tahap Geneva, pertemuan persiapan akan diadakan pada awal pertengahan tahun 2004 untuk meninjau persoalan-persoalan Masyarakat Informasi yang harus membentuk fokus WSIS tahap Tunis serta menyetujui struktur proses persiapan untuk tahap ke dua. Sesuai dengan keputusan KTT tahap ke dua WSIS di Tunis harus mempertimbangkan, antara lain:

- a)** Elaborasi dokumen-dokumen final yang sesuai berdasarkan hasil dari WSIS tahap Geneva dengan pandangan untuk mengkonsolidasikan proses pembangunan Masyarakat Informasi global, serta mengurangi Kesenjangan Digital dan mengubahnya menjadi peluang digital.
- b)** Tindak lanjut dan implementasi *Rencana Aksi Geneva* pada tingkat nasional, regional, dan internasional, termasuk sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai bagian dari sebuah pendekatan terintegrasi dan terkoordinasi, menyerukan partisipasi semua pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini harus dilaksanakan, *antara lain*, melalui kemitraan antara para pemangku kepentingan.

Geneva, 12 Desember 2003



TUNIS
COMMITMENT

TUNIS
KOMITMEN



1. We, the representatives of the peoples of the world, have gathered in Tunis from 16-18 November 2005 for this second phase of the World Summit on the Information Society (WSIS) to reiterate our unequivocal support for the *Geneva Declaration of Principles and Plan of Action* adopted at the first phase of the World Summit on the Information Society in Geneva in December 2003.

2. We reaffirm our desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, premised on the purposes and principles of the *Charter of the United Nations*, international law and multilateralism, and respecting fully and upholding the *Universal Declaration of Human Rights*, so that people everywhere can create, access, utilise and share information and knowledge, to achieve their full potential and to attain the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

3. We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the *Vienna Declaration*. **We also reaffirm** that democracy, sustainable development, and respect for human rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing. **We further resolve** to strengthen respect for the rule of law in international as in national affairs.

4. We reaffirm paragraphs 4, 5 and 55 of the Geneva Declaration of Principles. We recognize that freedom of expression and the free flow of information, ideas, and knowledge, are essential for the Information Society and beneficial to development.

5. The Tunis Summit represents a unique opportunity to raise awareness of the benefits that Information and Communication Technologies (ICTs) can bring to humanity and the manner in which they can transform people's activities, interaction and lives and thus, increase confidence in the future.

6. This Summit is an important stepping-stone in the world's efforts to eradicate poverty and to attain the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals. By the Geneva decisions, **we established** a coherent long-term link between the WSIS process, and other relevant major United Nations conferences and summits. **We call upon** governments, private sector, civil society and international organisations to join together to implement the commitments set forth in the *Geneva Declaration of Principles and Plan of Action*. In this context, the outcomes of the recently concluded 2005 *World Summit on the review of the implementation of the Millennium Declaration* are of special relevance.

1. Kita, wakil bangsa-bangsa di dunia, telah berkumpul di Tunis dari 16-18 November 2005 untuk tahap ke dua KTT Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) untuk mengulangi pernyataan dukungan tegas kita terhadap *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva* dan *Rencana Aksi* yang diangkat pada tahap pertama KTT Dunia mengenai Masyarakat Informasi di Geneva pada Desember 2003.

2. Kita menegaskan kembali keinginan dan komitmen kita untuk membangun Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan, didasari pemikiran pada tujuan dan prinsip *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, hukum internasional dan multilateralisme, serta menghormati sepenuhnya dan menjunjung tinggi *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* sehingga bangsa di manapun dapat menciptakan, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi dan pengetahuan, untuk mencapai kemampuan mereka sepenuhnya dan untuk mendapatkan tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium.

3. Kita menegaskan kembali keuniversalan, keutuhan, saling tergantung, dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkembang, seperti yang tertulis dalam *Deklarasi Wina*. **Kita menegaskan kembali** bahwa demokrasi, pembangunan yang berkesinambungan, dan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta pemerintahan yang baik di semua tingkat adalah saling bergantung dan saling menguatkan. **Kita selanjutnya berketetapan** untuk memperkuat penghormatan terhadap peraturan hukum dalam permasalahan internasional maupun nasional.

4. Kita menegaskan kembali paragraf 4, 5, dan 55 Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva. Kita mengakui bahwa kebebasan berekspresi dan arus bebas informasi, gagasan-gagasan, dan pengetahuan, sangatlah penting bagi Masyarakat Informasi dan bermanfaat untuk pengembangan.

5. KTT Tunis mewakili suatu peluang unik untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat disampaikan untuk kemanusiaan dan cara di mana hal tersebut dapat mengubah kegiatan, interaksi dan kehidupan bangsa, sehingga meningkatkan kepercayaan di masa depan.

6. KTT ini merupakan batu pijakan penting dalam upaya dunia untuk memberantas kemiskinan dan untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium. Melalui keputusan Geneva, **kita telah membangun** rangkaian jangka panjang antara proses WSIS dengan sebagian besar konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta KTT-KTT lainnya yang relevan. **Kita menyerukan** kepada pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan organisasi-organisasi internasional untuk bergabung bersama melaksanakan komitmen yang telah disusun dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva dan Rencana Aksi*. Dalam konteks ini, hasil *KTT Dunia 2005 tentang peninjauan pelaksanaan Deklarasi Milenium* yang baru berakhir mempunyai keterkaitan istimewa.

7. We reaffirm the commitments made in Geneva and build on them in Tunis by focusing on financial mechanisms for bridging the digital divide, on Internet governance and related issues, as well as on follow-up and implementation of the Geneva and Tunis decisions, as referenced in the *Tunis Agenda for the Information Society*.

8. While reaffirming the important roles and responsibilities of all stakeholders as outlined in paragraph 3 of the Geneva *Plan of Action*, **we acknowledge** the key role and responsibilities of governments in the WSIS process.

9. We reaffirm our resolution in the quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that ICTs can offer, by recalling that governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other international organisations, should work together to: improve access to information and communication infrastructure and technologies as well as to information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information Society; and encourage international and regional cooperation. **We confirm** that these are the key principles for building an inclusive Information Society, the elaboration of which is found in the *Geneva Declaration of Principles*.

10. We recognize that access to information and sharing and creation of knowledge contributes significantly to strengthening economic, social and cultural development, thus helping all countries to reach the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals. This process can be enhanced by removing barriers to universal, ubiquitous, equitable and affordable access to information. **We underline** the importance of removing barriers to bridging the digital divide, particularly those that hinder the full achievement of the economic, social and cultural development of countries and the welfare of their people, in particular, in developing countries.

11. Furthermore, ICTs are making it possible for a vastly larger population than at any time in the past to join in sharing and expanding the base of human knowledge, and contributing to its further growth in all spheres of human endeavour as well as its application to education, health and science. ICTs have enormous potential to expand access to quality education, to boost literacy and universal primary education, and to facilitate the learning process itself, thus laying the groundwork for the establishment of a fully-inclusive and development-oriented Information Society and knowledge economy which respects cultural and linguistic diversity.

7. Kita menegaskan kembali komitmen yang dibuat di Geneva dan membangunnya di Tunis dengan memfokuskan pada mekanisme keuangan untuk menjembatani kesenjangan digital, terhadap pengelolaan Internet dan isu-isu yang terkait, serta terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan keputusan Geneva dan Tunis, seperti yang dirujuk dalam *Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi*.

8. Sambil menegaskan kembali peran dan tanggungjawab penting dari semua pemangku kepentingan seperti yang di garisbawahi dalam *paragraf 3 Rencana Aksi Geneva*, **kita mengakui** peran kunci dan tanggung jawab pemerintah dalam proses WSIS.

9. Kita menegaskan kembali ketetapan dalam pencarian untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengambil manfaat dari peluang yang ditawarkan TIK, dengan mengingat bahwa pemerintah, serta pihak swasta, masyarakat sipil, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta organisasi-organisasi lainnya, harus bekerja bersama untuk: memperbaiki akses ke infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi, serta informasi dan pengetahuan; mengembangkan kemampuan, meningkatkan rasa percaya diri dan keamanan dalam penggunaan TIK; menciptakan lingkungan yang memberdayakan pada semua tingkatan; mengembangkan dan memperluas aplikasi TIK; memelihara dan menghormati keragaman budaya; mengakui peran media; membahas dimensi etika Masyarakat Informasi; serta mendorong kerjasama internasional dan regional. **Kita menegaskan** bahwa hal ini adalah prinsip kunci untuk membangun Masyarakat Informasi yang inklusif, yang penjabarannya terdapat dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva*.

10. Kita mengakui bahwa akses ke informasi dan berbagi serta penciptaan pengetahuan memberi kontribusi berarti untuk memperkuat pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga menolong semua negara untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium. Proses ini dapat ditingkatkan dengan menghilangkan rintangan terhadap akses informasi yang universal, tersebar, sederhana, dan terjangkau. **Kita menggarisbawahi** pentingnya menyingkirkan rintangan untuk menjembatani kesenjangan digital, khususnya yang menghalangi keberhasilan sepenuhnya dari pengembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara serta kesejahteraan rakyat mereka, khususnya, di negara-negara berkembang.

11. Lebih lanjut, dibandingkan dengan masa lalu, TIK memungkinkan masyarakat dengan populasi sangat besar untuk bersama berbagi dan memperluas dasar pengetahuan manusia, dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan selanjutnya dalam semua bidang usaha manusia, serta aplikasinya kepada pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. TIK memiliki kemampuan luar biasa untuk memperluas akses kepada pendidikan berkualitas, untuk memacu kemampuan membaca dan pendidikan dasar universal, serta untuk memudahkan proses pembelajaran itu sendiri, sehingga meletakkan dasar untuk pembangunan suatu Masyarakat Informasi serta masyarakat/ekonomi yang berpengetahuan yang inklusif sepenuhnya dan berorientasi pada penghargaan terhadap keragaman budaya dan bahasa.

12. We emphasize that the adoption of ICTs by enterprises plays a fundamental role in economic growth. The growth and productivity enhancing effects of well-implemented investments in ICTs can lead to increased trade and to more and better employment. For this reason, both enterprise development and labour market policies play a fundamental role in the adoption of ICTs. **We invite** governments and the private sector to enhance the capacity of Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs), since they furnish the greatest number of jobs in most economies. **We shall work together**, with all stakeholders, to put in place the necessary policy, legal and regulatory frameworks that foster entrepreneurship, particularly for SMMEs.

13. We also recognize that the ICT revolution can have a tremendous positive impact as an instrument of sustainable development. In addition, an appropriate enabling environment at national and international levels could prevent increasing social and economic divisions, and the widening of the gap between rich and poor countries, regions, and individuals-including between men and women.

14. We also recognize that in addition to building ICT infrastructure, there should be adequate emphasis on developing human capacity and creating ICT applications and digital content in local language, where appropriate, so as to ensure a comprehensive approach to building a global Information Society.

15. Recognizing the principles of universal and non-discriminatory access to ICTs for all nations, the need to take into account the level of social and economic development of each country, and respecting the development-oriented aspects of the Information Society, **we underscore** that ICTs are effective tools to promote peace, security and stability, to enhance democracy, social cohesion, good governance and the rule of law, at national, regional and international levels. ICTs can be used to promote economic growth and enterprise development. Infrastructure development, human capacity building, information security and network security are critical to achieve these goals. **We further recognize** the need to effectively confront challenges and threats resulting from use of ICTs for purposes that are inconsistent with objectives of maintaining international stability and security and may adversely affect the integrity of the infrastructure within States, to the detriment of their security. It is necessary to prevent the abuse of information resources and technologies for criminal and terrorist purposes, while respecting human rights.

16. We further commit ourselves to evaluate and follow up progress in bridging the digital divide, taking into account different levels of development, so as to reach internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, and to assess the effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information Society.

12. Kita menekankan bahwa penggunaan TIK oleh perusahaan-perusahaan memainkan peran fundamental dalam pertumbuhan ekonomi. Efek perbaikan pertumbuhan dan produktivitas investasi bidang TIK yang dijalankan dengan baik berdampak pada peningkatan perdagangan dan penempatan kerja yang lebih baik. Untuk alasan ini, baik kebijakan pengembangan usaha maupun pasar tenaga kerja, keduanya memainkan peran fundamental dalam penggunaan TIK. **Kita mengundang** pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UKMM), karena mereka menyediakan jumlah lapangan kerja terbesar di kebanyakan masyarakat/ekonomi. **Kita akan bekerjasama**, dengan semua pemangku kepentingan, meletakkan kerangka kerja hukum, dan pengaturan yang perlu, yang memelihara kewiraswastaan, khususnya terhadap UKMM.

13. Kita mengakui bahwa revolusi TIK dapat memiliki dampak positif luar biasa sebagai alat untuk pembangunan yang berkesinambungan. Dengan tambahan, lingkungan yang memberdayakan yang layak pada tingkat nasional dan internasional dapat mencegah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi serta melebarnya perbedaan antara negara-negara kaya dan miskin, antara wilayah, dan antara individu-termasuk antara laki-laki dan perempuan.

14. Kita mengakui bahwa di samping membangun infrastruktur TIK, harus ada upaya memadai dalam pengembangan kemampuan manusia dan menciptakan aplikasi serta konten digital TIK dalam bahasa lokal, yang tepat, untuk memastikan suatu pendekatan komprehensif dalam membangun Masyarakat Informasi global.

15. Mengakui prinsip-prinsip akses universal dan non diskriminatif terhadap TIK untuk semua bangsa, kebutuhan untuk memperhatikan tingkat pengembangan sosial dan ekonomi setiap negara, dan menghormati aspek-aspek orientasi pengembangan Masyarakat Informasi, **kita menggarisbawahi** bahwa TIK adalah alat efektif untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, untuk meningkatkan demokrasi, kohesi sosial, pemerintahan yang baik, serta peraturan hukum, pada tingkat nasional, regional, dan internasional. TIK dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan perusahaan. Pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan manusia, keamanan informasi, dan keamanan jaringan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan ini. **Kita selanjutnya mengakui** perlunya menghadapi secara efektif tantangan dan ancaman sebagai hasil dari penggunaan TIK untuk tujuan yang tidak konsisten dengan maksud untuk pemeliharaan stabilitas dan keamanan internasional, serta dapat berpengaruh melawan integritas infrastruktur dalam Negara, yang merugikan keamanan mereka. Adalah perlu untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya informasi dan teknologi untuk tujuan kriminal dan teroris, seraya menghormati hak-hak asasi manusia.

16. Kita selanjutnya berkomitmen diri untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti kemajuan dalam menjembatani kesenjangan digital, dengan memperhitungkan tingkat pembangunan yang berbeda, untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium, dan untuk menilai keefektifan upaya investasi dan kerjasama internasional dalam membangun Masyarakat Informasi.

17. We urge governments, using the potential of ICTs, to create public systems of information on laws and regulations, envisaging a wider development of public access points and supporting the broad availability of this information.

18. We shall strive unremittingly, therefore, to promote universal, ubiquitous, equitable and affordable access to ICTs, including universal design and assistive technologies, for all people, especially those with disabilities, everywhere, to ensure that the benefits are more evenly distributed between and within societies, and to bridge the digital divide in order to create digital opportunities for all and benefit from the potential offered by ICTs for development.

19. The international community should take necessary measures to ensure that all countries of the world have equitable and affordable access to ICTs, so that their benefits in the fields of socio-economic development and bridging the digital divide are truly inclusive.

20. To that end, **we shall pay particular attention** to the special needs of marginalized and vulnerable groups of society including migrants, internally displaced persons and refugees, unemployed and underprivileged people, minorities and nomadic people, older persons and persons with disabilities.

21. To that end, **we shall pay special attention** to the particular needs of people of developing countries, countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under occupation, and countries recovering from conflict or natural disasters.

22. In the evolution of the Information Society, particular attention must be given to the special situation of indigenous peoples, as well as to the preservation of their heritage and their cultural legacy.

23. We recognize that a gender divide exists as part of the digital divide in society and we **reaffirm our commitment** to women's empowerment and to a gender equality perspective, so that we can overcome this divide. **We further acknowledge** that the full participation of women in the Information Society is necessary to ensure the inclusiveness and respect for human rights within the Information Society. **We encourage** all stakeholders to support women's participation in decision-making processes and to contribute to shaping all spheres of the Information Society at international, regional and national levels.

24. We recognize the role of ICTs in the protection of children and in enhancing the development of children. **We will strengthen action** to protect children from abuse

17. Kita mendesak pemerintah, menggunakan potensi TIK, untuk menciptakan sistem informasi umum mengenai hukum dan peraturan, menggambarkan pengembangan lebih luas dari titik-titik akses umum dan mendukung ketersediaan informasi ini.

18. Kita akan berusaha tanpa henti, oleh karena itu, untuk mempromosikan akses terhadap TIK yang universal, tersebar, sederhana dan terjangkau, termasuk teknologi-teknologi yang dirancang secara universal dan membantu, untuk semua manusia, terutama mereka yang cacat, di mana pun, untuk memastikan bahwa manfaatnya disalurkan lebih merata antara dan dalam masyarakat, serta untuk menjembatani kesenjangan digital dalam upaya untuk menciptakan peluang digital untuk semua dan mengambil manfaat dari peluang yang ditawarkan TIK untuk pembangunan.

19. Komunitas internasional harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua negara di dunia memiliki akses yang sederhana dan terjangkau terhadap TIK, sehingga manfaatnya dalam bidang pengembangan sosial ekonomi dan dalam menjembatani kesenjangan digital adalah benar-benar inklusif.

20. Untuk tujuan tersebut, **kita akan memberi perhatian khusus** terhadap kebutuhan istimewa dari kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan rentan, termasuk para migran, orang-orang dan pengungsi yang sedang dalam pelarian, orang menganggur dan kurang mampu, kelompok minoritas dan pengembara, orang-orang tua dan orang-orang cacat.

21. Untuk tujuan tersebut, **kita akan memberi perhatian istimewa** terhadap kebutuhan khusus rakyat negara-negara berkembang, negara dengan ekonomi dalam transisi, negara terbelakang, negara berkembang berkepulauaan kecil, negara berkembang tanpa pantai, negara miskin yang terbelit banyak utang, negara dan wilayah yang diduduki, serta negara yang sedang dalam pemulihan akibat konflik atau bencana alam.

22. Dalam evolusi Masyarakat Informasi, perhatian khusus harus diberikan terhadap situasi istimewa rakyat pribumi, serta pada pelestarian warisan adat istiadat dan kebudayaan mereka.

23. Kita mengakui bahwa kesenjangan gender ada sebagai bagian dari kesenjangan digital dalam masyarakat dan **kita menegaskan kembali** komitmen terhadap pemberdayaan perempuan serta terhadap perspektif persamaan gender, sehingga kita dapat mengatasi kesenjangan ini. **Kita selanjutnya mengakui** bahwa partisipasi sepenuhnya dari perempuan dalam Masyarakat Informasi adalah perlu untuk memastikan keinklusi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dalam Masyarakat Informasi. **Kita mendorong** semua pemangku kepentingan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk memberi kontribusi terhadap penyempurnaan semua bidang Masyarakat Informasi pada tingkat internasional, regional, dan nasional.

24. Kita mengakui peran TIK dalam melindungi anak-anak dan dalam meningkatkan perkembangan anak. **Kita akan memperkuat tindakan** untuk melindungi anak-anak

and defend their rights in the context of ICTs. In that context, **we emphasize** that the best interests of the child are a primary consideration.

25. We reaffirm our commitment to empowering young people as key contributors to building an inclusive Information Society. **We will actively engage** youth in innovative ICT-based development programmes and widen opportunities for youth to be involved in e-strategy processes.

26. We recognize the importance of creative content and applications to overcome the digital divide and to contribute to the achievement of the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

27. We recognize that equitable and sustainable access to information requires the implementation of strategies for the long-term preservation of the digital information that is being created.

28. We reaffirm our desire to build ICT networks and develop applications, in partnership with the private sector, based on open or interoperable standards that are affordable and accessible to all, available anywhere and anytime, to anyone and on any device, leading to a ubiquitous network.

29. Our conviction is that governments, the private sector, civil society, the scientific and academic community, and users can utilise various technologies and licensing models, including those developed under proprietary schemes and those developed under open-source and free modalities, in accordance with their interests and with the need to have reliable services and implement effective programmes for their people. Taking into account the importance of proprietary software in the markets of the countries, **we reiterate** the need to encourage and foster collaborative development, inter-operative platforms and free and open source software, in ways that reflect the possibilities of different software models, notably for education, science and digital inclusion programmes.

30. Recognizing that disaster mitigation can significantly support efforts to bring about sustainable development and help in poverty reduction, **we reaffirm our commitment** to leveraging ICT capabilities and potential through fostering and strengthening cooperation at the national, regional, and international levels.

31. We commit ourselves to work together towards the implementation of the digital solidarity agenda, as agreed in *paragraph 27 of the Geneva Plan of Action*. The full and

dari kekerasan dan membela hak-hak asasi mereka dalam konteks TIK. Dalam konteks tersebut, **kita menekankan** bahwa minat terbaik dari anak merupakan pertimbangan utama.

25. Kita menegaskan kembali komitmen kita untuk memberdayakan para generasi muda sebagai kontributor kunci dalam membangun Masyarakat Informasi yang inklusif. **Kita akan melibatkan secara aktif** anak muda dalam program pembangunan berdasarkan TIK yang inovatif serta memperluas peluang bagi kaum muda untuk dilibatkan dalam proses e-strategi.

26. Kita mengakui pentingnya konten dan aplikasi yang kreatif untuk mengatasi kesenjangan digital serta untuk memberikan kontribusi terhadap keberhasilan tujuan dan maksud pembangunan yang disetujui secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium.

27. Kita mengakui bahwa akses terhadap informasi yang sederajat dan berkesinambungan membutuhkan pelaksanaan strategi untuk pemeliharaan jangka panjang informasi digital yang telah diciptakan.

28. Kita menegaskan kembali keinginan untuk membangun jaringan TIK dan mengembangkan aplikasi, melalui kemitraan dengan sektor swasta, berdasarkan standar-standar terbuka atau dapat ber-interoperasi, yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua, tersedia di mana pun dan kapan pun, untuk siapa pun dan pada alat apa pun, mengarah pada jaringan yang tersebar ke seluruh pelosok manapun.

29. Keyakinan kita adalah bahwa pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil, komunitas ilmu pengetahuan dan akademik, serta pengguna dapat menggunakan berbagai model teknologi dan lisensi, termasuk yang telah dikembangkan dalam skema kepemilikan dan yang telah dikembangkan dengan cara sumber/kode terbuka (open source) dan 'bebas', sesuai dengan minat mereka dan dengan kebutuhan untuk memiliki pelayanan yang dapat diandalkan serta menjalankan program efektif untuk rakyat mereka. Dengan memperhitungkan pentingnya kepemilikan perangkat lunak dalam pasar negara-negara, **kita menyatakan kembali** perlunya mendorong dan memelihara pengembangan kolaboratif, landasan kerja yang interoperatif dan perangkat lunak yang 'bebas' dan sumber/kode terbuka, dengan cara yang mencerminkan kemungkinan-kemungkinan dari model perangkat lunak yang berbeda, terutama untuk program-program inklusif pendidikan, ilmiah, dan digital.

30. Mengakui bahwa pengurangan bencana dapat secara berarti mendukung usaha-usaha untuk menghasilkan pembangunan yang berkesinambungan dan membantu mengurangi kemiskinan, **kita menegaskan kembali komitmen** untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi TIK melalui pemeliharaan dan penguatan kerjasama pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

31. Kita berkomitmen diri untuk bekerja sama menuju ke pelaksanaan Agenda Solidaritas Digital, seperti yang disepakati pada *paragraf 27 Rencana Aksi Geneva*.

quick implementation of that agenda, observing good governance at all levels, requires in particular a timely, effective, comprehensive and durable solution to the debt problems of developing countries where appropriate, a universal, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, that can also stimulate development worldwide, benefiting countries at all stages of development, as well as, to seek and effectively implement concrete international approaches and mechanisms to increase international cooperation and assistance to bridge the digital divide.

32. We further commit ourselves to promote the inclusion of all peoples in the Information Society through the development and use of local and/or indigenous languages in ICTs. **We will continue** our efforts to protect and promote cultural diversity, as well as cultural identities, within the Information Society.

33. We acknowledge that, while technical cooperation can help, capacity building at all levels is needed to ensure that the required institutional and individual expertise is available.

34. We recognize the need for, and strive to mobilise resources, both human and financial, in accordance with *chapter two of the Tunis Agenda for the Information Society*, to enable us to increase the use of ICT for development and realise the short, medium and long-term plans dedicated to building the Information Society as follow-up and implementation of the outcomes of WSIS.

35. We recognize the central role of public policy in setting the framework in which resource mobilisation can take place.

36. We value the potential of ICTs to promote peace and to prevent conflict which, *inter alia*, negatively affects achieving development goals. ICTs can be used for identifying conflict situations through early warning systems preventing conflicts, promoting their peaceful resolution, supporting humanitarian action, including protection of civilians in armed conflicts, facilitating peacekeeping missions, and assisting post conflict peace-building and reconstruction.

37. We are convinced that our goals can be accomplished through the involvement, cooperation and partnership of governments and other stakeholders, i.e. the private sector, civil society and international organisations, and that international cooperation and solidarity at all levels are indispensable if the fruits of the Information Society are to benefit all.

38. Our efforts should not stop with the conclusion of the Summit. The emergence of the global Information Society to which we all contribute provides increasing opportunities

Pelaksanaan sepenuhnya dan cepat dari agenda tersebut, menjalankan pengelolaan yang baik pada semua tingkat, membutuhkan pada khususnya, solusi tepat waktu, efektif, komprehensif, dan tahan lama terhadap permasalahan hutang negara-negara berkembang yang sesuai, sebuah sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan peraturan, terbuka, non-diskriminatif, dan sederhana, serta dapat menstimulasi perkembangan di seluruh dunia, memberi manfaat pada negara-negara di semua tingkat perkembangan, maupun, mencari dan menjalankan secara efektif pendekatan serta mekanisme internasional yang kongkrit untuk meningkatkan kerjasama dan bantuan internasional dalam menjembatani kesenjangan digital.

32. Kita selanjutnya berkomitmen diri untuk mendorong ikut sertanya semua bangsa dalam Masyarakat Informasi melalui pengembangan dan penggunaan bahasa lokal dan/atau pribumi. **Kita akan melanjutkan** upaya kita untuk melindungi dan mempromosikan keragaman budaya, serta identitas kebudayaan, dalam Masyarakat Informasi.

33. Kita mengakui bahwa, sementara kerjasama teknis dapat membantu, pengembangan kemampuan di semua tingkat diperlukan untuk memastikan bahwa keahlian institusional dan individual yang dibutuhkan tersedia.

34. Kita mengakui kebutuhan akan, dan berusaha untuk memobilisasi sumber daya, kedua-duanya, manusia dan keuangan, sesuai dengan *Bab Dua Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi*, untuk memungkinkan kita meningkatkan penggunaan TIK untuk pembangunan dan merealisasikan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, yang diabdikan untuk membangun Masyarakat Informasi sebagai tindak lanjut hasil-hasil WSIS.

35. Kita mengakui peran utama kebijakan publik dalam menciptakan kerangka kerja di mana mobilisasi sumber dapat terjadi.

36. Kita menghargai kemampuan TIK untuk mempromosikan perdamaian dan mencegah konflik yang, antara lain, berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan. TIK dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi situasi konflik melalui sistem peringatan dini pencegah konflik, mempromosikan resolusi perdamaian, mendukung tindakan kemanusiaan, termasuk perlindungan rakyat sipil di daerah konflik bersenjata, mempermudah misi perdamaian, dan membantu pembangunan dan rekonstruksi perdamaian pasca konflik.

37. Kita yakin bahwa tujuan kita dapat dicapai melalui keterlibatan, kerjasama, dan kemitraan pemerintah dan pihak-pemangku kepentingan lain, seperti: sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional, dan bahwa kerjasama serta solidaritas internasional pada semua tingkat tak dapat disisihkan bila hasil Masyarakat Informasi adalah untuk manfaat semua.

38. Upaya kita tidak boleh berhenti dengan berakhirnya KTT. Kemunculan Masyarakat Informasi global di mana kita semua memberi kontribusi, memberikan peningkatan

for all our peoples and for an inclusive global community that were unimaginable only a few years ago. **We must harness** these opportunities today and support their further development and progress.

39. We reaffirm our strong resolve to develop and implement an effective and sustainable response to the challenges and opportunities of building a truly global Information Society that benefits all our peoples.

40. We strongly believe in the full and timely implementation of the decisions we took in Geneva and Tunis, as outlined in the *Tunis Agenda for the Information Society*.

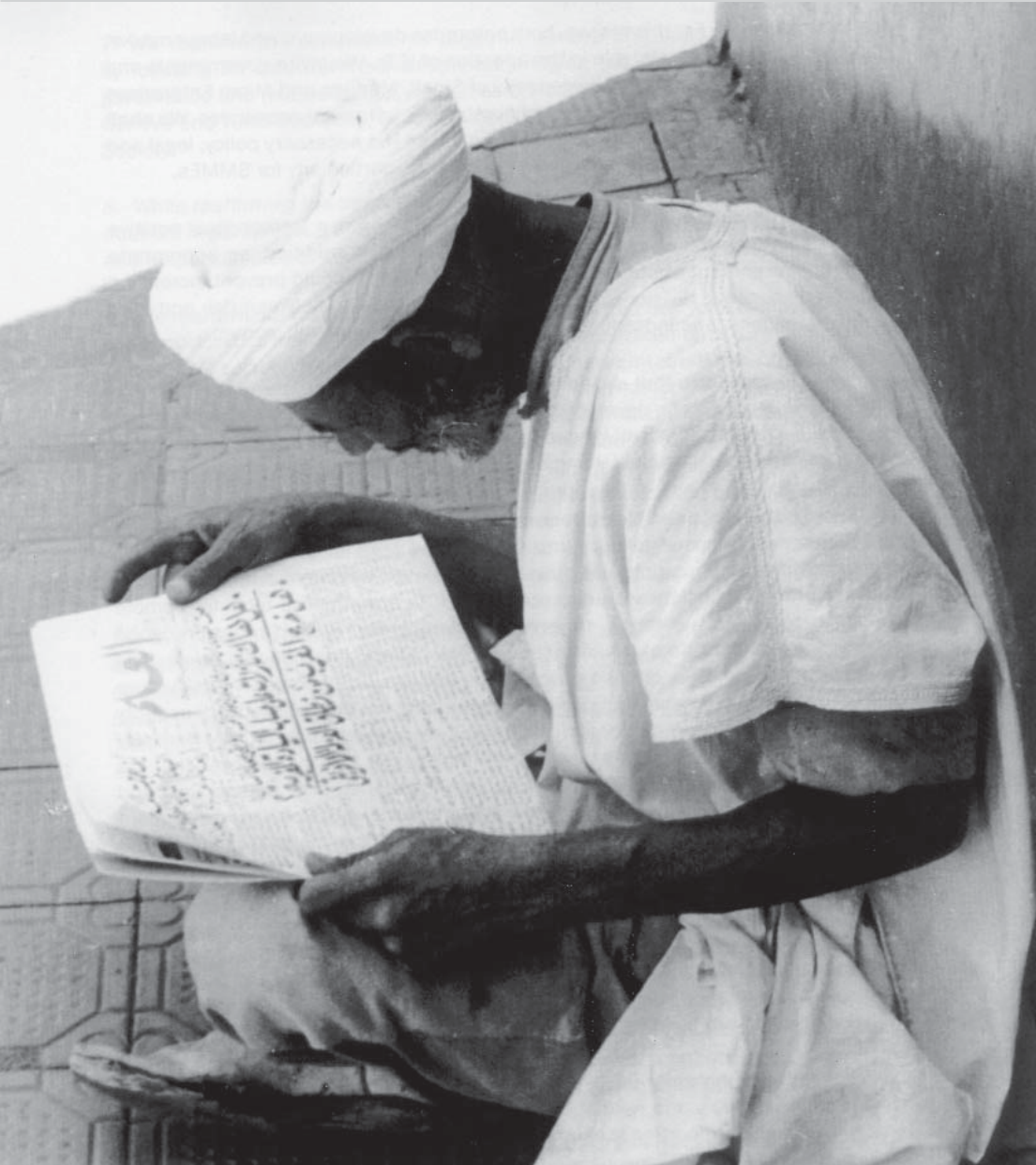
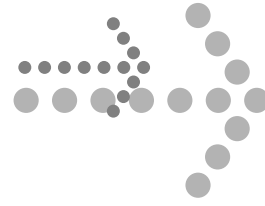
Tunis, 18 November 2005

peluang untuk semua bangsa dan untuk suatu komunitas global inklusif yang tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu. **Kita harus memanfaatkan** peluang ini sekarang dan mendukung pengembangan dan kemajuan mereka selanjutnya.

39. Kita menegaskan kembali ketetapan kuat kita untuk mengembangkan serta melaksanakan tanggapan yang efektif dan berkesinambungan terhadap tantangan dan peluang dalam membangun Masyarakat Informasi global sesungguhnya yang memberi manfaat untuk semua bangsa.

40. Kita berkeyakinan kuat terhadap pelaksanaan sepenuhnya dan tepat waktu dari keputusan-keputusan yang kita ambil di Geneva dan Tunis, seperti di gariskan dalam *Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi*.

Tunis, 18 November 2005



AGENDA T U N I S
FOR THE INFORMATION SOCIETY

T U N I S AGENDA
UNTUK MASYARAKAT INFORMASI

A. Introduction

1. We recognize that it is now time to move from principles to action, considering the work already being done in implementing the *Geneva Plan of Action* and identifying those areas where progress has been made, is being made, or has not taken place.

2. We reaffirm the commitments made in Geneva and build on them in Tunis by focusing on financial mechanisms for bridging the digital divide, on Internet governance and related issues, as well as on implementation and follow-up of the Geneva and Tunis decisions.

B. Financial Mechanisms For Meeting The Challenges of ICT for Development

3. We thank the UN Secretary-General for his efforts in creating the Task Force on Financial Mechanisms (TFFM) and we commend the members on their report.

4. We recall that the mandate of the TFFM was to undertake a thorough review of the adequacy of existing financial mechanisms in meeting the challenges of ICT for development.

5. The TFFM report sets out the complexity of existing mechanisms, both private and public, which provide financing for ICTs in developing countries. It identifies areas where these could be improved and where ICTs could be given higher priority by developing countries and their development partners.

6. Based on the conclusion of the review of the report, **we have considered** the improvements and innovations of financial mechanisms, including the creation of a voluntary Digital Solidarity Fund, as mentioned in the Geneva Declaration of Principles.

7. We recognize the existence of the digital divide and the challenges that this poses for many countries, which are forced to choose between many competing objectives in their development planning and in demands for development funds whilst having limited resources.

8. We recognize the scale of the problem in bridging the digital divide, which will require adequate and sustainable investments in ICT infrastructure and services, and capacity building, and transfer of technology over many years to come.

A. Pendahuluan

1. Kita mengakui bahwa sekarang adalah saatnya untuk beranjak dari prinsip-prinsip menjadi tindakan, dengan mempertimbangkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan *Rencana Aksi Geneva* dan mengidentifikasi daerah-daerah di mana kemajuan telah dicapai, sedang dicapai, atau belum terjadi.

2. Kita menegaskan kembali komitmen-komitmen yang telah dibuat di Geneva dan dikembangkan di Tunis dengan memfokuskan pada mekanisme keuangan untuk menjembatani kesenjangan digital, pada pengelolaan Internet dan masalah yang terkait, serta pada pelaksanaan dan tindak lanjut dari keputusan-keputusan Geneva dan Tunis.

B. Mekanisme Keuangan untuk memenuhi Tantangan-Tantangan TIK dalam Pembangunan

3. Kita berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam upayanya untuk menciptakan Gugus Tugas Mekanisme Keuangan (Task Force on Financial Mechanisms/TFFM), dan kita menghargai anggota-anggotanya berdasarkan laporan mereka.

4. Kita mengingat bahwa mandat TFFM adalah untuk menjalankan peninjauan menyeluruh kelengkapan mekanisme keuangan yang telah ada dalam mengatasi tantangan-tantangan TIK untuk pembangunan

5. Laporan TFFM menjabarkan kompleksitas mekanisme yang ada, baik swasta maupun publik, yang menyediakan keuangan untuk TIK di negara-negara berkembang. Laporan tersebut mengidentifikasi hal-hal yang dapat diperbaiki dan di mana TIK dapat diberi prioritas lebih tinggi oleh negara-negara berkembang dan mitra-mitra pembangunannya.

6. Berdasarkan kesimpulan hasil peninjauan kembali laporan tersebut, **kita telah mempertimbangkan** perbaikan dan inovasi mekanisme keuangan, termasuk pengadaan Dana Solidaritas Digital sukarela, seperti yang telah disebutkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva.

7. Kita mengakui adanya kesenjangan digital dan tantangan yang dihadapi banyak negara, yang dipaksa memilih di antara banyak maksud persaingan di dalam perencanaan pengembangan mereka dan dalam kebutuhan dana pembangunan di mana sumber daya yang dimiliki terbatas.

8. Kita mengakui skala permasalahan dalam menjembatani kesenjangan digital, yang akan membutuhkan investasi yang memadai dan berkelanjutan dalam infrastruktur dan pelayanan TIK, serta, pengembangan kemampuan dan alih teknologi beberapa tahun ke depan.

9. We call upon the international community to promote the transfer of technology on mutually-agreed terms, including ICTs, to adopt policies and programmes with a view to assisting developing countries to take advantage of technology in their pursuit of development through, *inter alia*, technical cooperation and the building of scientific and technological capacity in our efforts to bridge the digital and development divides.

10. We recognize that the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, are fundamental. The *Monterrey Consensus on Financing for Development* is the basis for the pursuit of adequate and appropriate financial mechanisms to promote ICT for development, in accordance with the Digital Solidarity Agenda of the *Geneva Plan of Action*.

11. We recognize and acknowledge the special and specific funding needs of the developing world, as referred to in *paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles**, which faces numerous challenges in the ICT sector, and that there is strong need to focus on their special financing needs to achieve the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

12. We agree that the financing of ICT for development needs to be placed in the context of the growing importance of the role of ICTs, not only as a medium of communication, but also as a development enabler, and as a tool for the achievement of the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

13. In the past, financing of ICT infrastructure in most developing countries has been based on public investment. Lately, a significant influx of investment has taken place where private sector participation has been encouraged, based on a sound regulatory framework, and where public policies aimed at bridging the digital divide have been implemented.

14. We are greatly encouraged by the fact that advances in communication technology, and high-speed data networks are continuously increasing the possibilities for developing countries, and countries with economies in transition, to participate in the global market for ICT-enabled services on the basis of their comparative advantage. These emerging opportunities provide a powerful commercial basis for ICT infrastructural investment in these countries. Therefore, governments should take action, in the framework of national development policies, in order to support an enabling and competitive environment for the necessary investment in ICT infrastructure and for the development of new services. At the same time, countries should pursue policies and measures that would not discourage, impede or prevent the continued participation of these countries in the global market for ICT-enabled services.

*For reference, Paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles reads as follows:

We continue to pay special attention to the particular needs of people of developing countries, countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under occupation, countries recovering from conflict and countries and regions with special needs as well as to conditions that pose severe threats to development, such as natural disasters.

9. Kita menyerukan kepada komunitas internasional untuk mempromosikan alih teknologi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk TIK, untuk membuat kebijakan dan program-program dengan maksud membantu negara-negara berkembang dalam mengambil manfaat teknologi dalam pengejaran pembangunan mereka melalui, *antara lain*, kerjasama teknik dan pengembangan kemampuan ilmiah serta teknologi dalam upaya-upaya kita untuk menjembatani kesenjangan dan pengembangan digital.

10. Kita mengakui bahwa tujuan dan maksud pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium, adalah fundamental. *Konsensus Monterrey mengenai Pembiayaan untuk Pembangunan* merupakan basis untuk pencapaian mekanisme keuangan yang memadai dan sesuai untuk mempromosikan TIK untuk pembangunan, sesuai dengan Agenda Solidaritas Digital dari *Rencana Aksi Geneva*.

11. Kita mengakui dan mengidentifikasi kebutuhan pendanaan istimewa dan khusus dari dunia berkembang, seperti yang disebutkan dalam *paragraf 16 Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva**, yang menghadapi berbagai tantangan dalam sektor TIK, dan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan pembiayaan istimewa untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium.

12. Kita sepakat bahwa pembiayaan TIK untuk pembangunan perlu ditempatkan pada konteks pertumbuhan yang makin penting dari peran TIK, tidak hanya sebagai media komunikasi, tapi sebagai pemberdaya pembangunan, dan sebagai alat untuk keberhasilan tujuan dan maksud yang telah disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium.

13. Di masa lalu, pembiayaan infrastruktur TIK di kebanyakan negara berkembang didasarkan pada investasi publik. Belakangan, telah terjadi gelombang arus investasi yang besar di mana telah didorong keterlibatan sektor swasta, berdasarkan kerangka pengaturan yang sehat, dan di mana telah dilaksanakan kebijakan publik yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital.

14. Kita sungguh terdorong oleh fakta bahwa kemajuan teknologi komunikasi, dan jaringan-jaringan data kecepatan tinggi secara terus menerus meningkatkan kemungkinan-kemungkinan untuk negara-negara berkembang, serta negara-negara dengan masyarakat/ekonomi dalam transisi, untuk turut serta dalam pasar global untuk pelayanan yang diberdayakan oleh TIK berdasarkan keuntungan komparatif mereka. Peluang yang timbul ini menyediakan basis komersial yang kuat untuk investasi infrastruktur TIK di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan, dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, dalam upaya mendukung lingkungan yang memberdayakan dan berdaya saing untuk investasi yang diperlukan dalam infrastruktur TIK serta untuk pengembangan pelayanan-pelayanan baru. Di saat yang bersamaan, negara-negara harus mengupayakan kebijakan dan langkah-langkah yang tidak akan mengecilkan hati, merintangi, atau mencegah keikutsertaan terus menerus negara-negara tersebut dalam pasar global untuk pelayanan yang diberdayakan TIK.

*Sebagai referensi, Paragraf 16 Deklarasi Prinsip-prinsip Geneva berbunyi sbb:

Kita akan terus memberikan perhatian istimewa pada kebutuhan khusus penduduk negara-negara berkembang, negara dengan perekonomian dalam transisi, negara terbelakang, negara berkembang kepulauan kecil, negara berkembang tanpa pantai, negara miskin yang terbelit banyak hutang, negara dan wilayah yang diduduki, negara yang sedang dalam pemulihan akibat konflik, dan negara serta wilayah dengan kebutuhan khusus serta pada kondisi yang memiliki ancaman berat terhadap pembangunan seperti bencana alam.

15. We take note that the challenges for expanding the scope of useful accessible information content in the developing world are numerous; in particular, the issue of financing for various forms of content and applications requires new attention, as this area has often been overlooked by the focus on ICT infrastructure.

16. We recognize that attracting investment in ICTs has depended crucially upon an enabling environment, including good governance at all levels, and a supportive, transparent and pro-competitive policy and regulatory framework, reflecting national realities.

17. We endeavour to engage in a proactive dialogue on matters related to corporate social responsibility and good corporate governance of trans-national corporations and their contribution to the economic and social development of developing countries in our efforts to bridge the digital divide.

18. We underline that market forces alone cannot guarantee the full participation of developing countries in the global market for ICT-enabled services. Therefore, **we encourage** the strengthening of international cooperation and solidarity aimed at enabling all countries, especially those referred to in *paragraph 16* of the *Geneva Declaration of Principles*, to develop ICT infrastructure and ICT-enabled services that are viable and competitive at national and international levels.

19. We recognize that, in addition to the public sector, financing of ICT infrastructure by the private sector has come to play an important role in many countries and that domestic financing is being augmented by North-South flows and South-South co-operation.

20. We recognize that, as a result of the growing impact of sustainable private sector investment in infrastructure, multilateral and bilateral public donors are redirecting public resources to other development objectives, including Poverty Reduction Strategy Papers and related Programmes, policy reforms and mainstreaming of ICTs and capacity development. **We encourage** all governments to give appropriate priority to ICTs, including traditional ICTs such as broadcast radio and television, in their national development strategies. **We also encourage** multilateral institutions as well as bilateral public donors to consider also providing more financial support for regional and large-scale national ICT infrastructure projects and related capacity development. They should consider aligning their aid and partnership strategies with the priorities set by developing countries and countries with economies in transition in their national development strategies including their poverty reduction strategies.

15. Kita mencatat bahwa tantangan untuk memperluas jangkauan konten informasi berguna yang dapat diakses dalam dunia berkembang jumlahnya banyak; khususnya persoalan pembiayaan untuk berbagai bentuk konten dan aplikasi, membutuhkan perhatian baru, karena bidang ini telah sering terlewat oleh fokus pada infrastruktur TIK.

16. Kita mengakui bahwa penarikan investasi dalam TIK telah secara kritis mengandalkan pada lingkungan yang memberdayakan, termasuk pengelolaan yang baik di semua tingkatan, dan suatu kerangka kebijakan dan pengaturan yang mendukung, transparan, dan pro-kompetisi, mencerminkan realitas nasional.

17. Kita berusaha untuk terlibat dalam dialog proaktif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang baik dari perusahaan trans-nasional serta kontribusi mereka terhadap pengembangan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang untuk menjembatani kesenjangan digital.

18. Kita menggarisbawahi bahwa kekuatan pasar saja tidak dapat menjamin keikutsertaan penuh negara-negara berkembang dalam pasar global untuk pelayanan yang diberdayakan TIK. Oleh karena itu, **kita mendorong** peningkatan kerjasama dan solidaritas internasional yang bertujuan untuk memungkinkan semua negara, khususnya mengenai yang disebutkan dalam *paragraf 16* dalam *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva*, untuk mengembangkan infrastruktur TIK dan pelayanan yang diberdayakan TIK yang dapat berjalan dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

19. Kita mengakui bahwa, selain pada sektor publik, pembiayaan infrastruktur TIK oleh sektor swasta telah memainkan peran penting di banyak negara dan bahwa pembiayaan domestik sedang diperbesar oleh arus Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-Selatan.

20. Kita mengakui bahwa, sebagai hasil dari dampak pertumbuhan investasi sektor swasta yang berkesinambungan dalam infrastruktur, donor-donor publik multilateral dan bilateral kembali mengarahkan sumber daya publik ke maksud pengembangan lain, termasuk Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan dan program-program yang berkaitan, pembaharuan kebijakan dan mengurus-utamakan TIK serta pengembangan kemampuan. **Kita mendorong** semua pemerintahan untuk memberi prioritas yang memadai untuk TIK, termasuk TIK tradisional seperti siaran radio dan televisi, dalam strategi pembangunan nasional mereka. **Kita mendorong** institusi-institusi multilateral serta donor-donor publik bilateral untuk mempertimbangkan juga dengan memberikan lebih banyak dukungan keuangan bagi proyek-proyek infrastruktur TIK nasional yang bersifat regional dan berskala besar serta terkait dengan pengembangan kemampuan. Mereka harus mempertimbangkan penyesuaian strategi bantuan dan kemitraan mereka dengan prioritas yang disusun oleh negara-negara berkembang dan negara-negara dengan masyarakat/ekonomi dalam transisi dalam strategi pembangunan nasional termasuk strategi pengurangan kemiskinan.

21. We recognize that public finance plays a crucial role in providing ICT access and services to rural areas and disadvantaged populations including those in Small Island Developing States and Landlocked Developing Countries.

22. We note that ICT-related capacity building needs represent a high priority in all developing countries and the current financing levels have not been adequate to meet the needs, although there are many different funding mechanisms supporting ICTs for Development.

23. We recognize that there are a number of areas in need of greater financial resources and where current approaches to ICT for development financing have devoted insufficient attention to date. These include:

- a) ICT capacity building programmes, materials, tools, educational funding and specialised training initiatives, especially for regulators and other public sector employees and organisations;
- b) Communications access and connectivity for ICT services and applications in remote rural areas, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries and other locations presenting unique technological and market challenges;
- c) Regional backbone infrastructure, regional networks, Network Access Points and related regional projects, to link networks across borders and in economically-disadvantaged regions which may require coordinated policies including legal, regulatory and financial frameworks, and seed financing and would benefit from sharing experiences and best practices;
- d) Broadband capacity to facilitate the delivery of a broader range of services and applications, promote investment and provide Internet access at affordable prices to both existing and new users;
- e) Coordinated assistance, as appropriate, for countries referred to in *paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles*, particularly Least Developed Countries and Small Island Developing States, in order to improve effectiveness and to lower transaction costs associated with the delivery of international donor support;
- f) ICT applications and content aimed at the integration of ICTs into the implementation of poverty eradication strategies and in sector programmes, particularly in health, education, agriculture and the environment;

In addition, there is a need to consider the following other issues, which are relevant to ICT for development and which have not received adequate attention:

21. Kita mengakui bahwa keuangan publik memainkan peran sangat penting dalam menyediakan akses dan pelayanan TIK ke daerah pedesaan dan penduduk berkekurangan, termasuk Negara Berkembang Kepulauan Kecil serta Negara Berkembang tanpa pantai.

22. Kita mencatat bahwa kebutuhan pengembangan kemampuan yang terkait dengan TIK merupakan prioritas tinggi di semua negara berkembang dan tingkat pembiayaan sekarang ini belum mencukupi kebutuhan, walaupun ada banyak mekanisme pendanaan yang mendukung TIK untuk pembangunan.

23. Kita mengakui bahwa ada sejumlah daerah yang memerlukan sumber daya keuangan yang lebih besar dan di mana pendekatan-pendekatan yang ada terhadap TIK untuk pembiayaan pembangunan kurang mendapat perhatian saat ini. Hal ini termasuk:

- a) Program-program pengembangan kemampuan TIK, material, peralatan, pendanaan pendidikan, dan inisiatif pelatihan khusus, teristimewa untuk para regulator, dan karyawan serta organisasi sektor publik lainnya.
- b) Akses dan konektivitas komunikasi untuk pelayanan dan aplikasi TIK di daerah-daerah pedesaan terpencil, Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil, Negara Berkembang Tanpa Pantai dan lokasi-lokasi lain yang merepresentasikan tantangan-tantangan teknis dan pasar yang unik.
- c) Infrastruktur tulang punggung regional, jaringan regional, Pusat-pusat Akses Jaringan, dan proyek-proyek regional yang terkait, untuk menghubungkan jaringan antar perbatasan dan daerah-daerah yang lemah ekonominya, di mana akan dibutuhkan kebijakan terkoordinasi termasuk kerangka-kerangka hukum, pengaturan, dan keuangan, serta pembiayaan awal dan yang akan memperoleh manfaat dari pertukaran pengalaman dan praktek-praktek terbaik.
- d) Kapasitas pita lebar untuk memudahkan pengiriman pelayanan dan aplikasi yang lebih luas, mempromosikan investasi dan menyediakan akses Internet dengan harga terjangkau untuk pengguna lama dan baru.
- e) Bantuan terkoordinasi, bila diperlukan, untuk negara-negara yang disebutkan dalam *paragraf 16 Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva*, khususnya Negara-Negara Terbelakang dan Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil, dalam upaya memperbaiki efektivitas dan untuk mengurangi biaya transaksi yang berhubungan dengan pengiriman bantuan donor internasional.
- f) Aplikasi dan konten TIK yang ditujukan pada integrasi TIK ke dalam pelaksanaan strategi pemberantasan kemiskinan dan program-program sektor, terutama bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lingkungan.

Selain itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan persoalan-persoalan lain selanjutnya, yang sesuai dengan TIK untuk pembangunan dan yang belum mendapatkan perhatian cukup:

g) Sustainability of Information Society related projects, for example the maintenance of ICT infrastructure;

h) Special needs of Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs), such as funding requirements;

i) Local development and manufacturing of ICT applications and technologies by developing countries;

j) Activities on ICT-related institutional reform and enhanced capacity on legal and regulatory framework;

k) Improving organizational structures and business process change aimed at optimizing the impact and effectiveness of ICT projects and other projects with significant ICT components;

l) Local government and initiatives based in local communities that deliver ICT services to communities in areas such as education, health and livelihood support.

24. Recognizing that the central responsibility for coordination of public financing programmes and public ICT development initiatives rests with governments, **we recommend** that further cross-sectoral and cross-institutional coordination should be undertaken, both on the part of donors and recipients within the national framework.

25. Multilateral development banks and institutions should consider adapting their existing mechanisms, and where appropriate designing new ones, to provide for national and regional demands on ICT development.

26. We acknowledge the following prerequisites for equitable and universal accessibility to, and better utilisation of, financial mechanisms:

a) Creating policy and regulatory incentives aimed at universal access and the attraction of private sector investment;

b) Identification and acknowledgement of the key role of ICTs in national development strategies, and their elaboration, when appropriate, in conjunction with e-strategies;

c) Developing institutional and implementation capacity to support the use of national universal service/access funds, and further study of these mechanisms and those aiming to mobilise domestic resources;

g) Kestinambungan proyek-proyek yang terkait dengan Masyarakat Informasi, misalnya pemeliharaan infrastruktur TIK.

h) Kebutuhan-kebutuhan khusus Usaha-Usaha Kecil Menengah, dan Mikro (UKMM), seperti persyaratan pendanaan.

i) Pengembangan lokal dan pembuatan aplikasi teknologi TIK oleh negara-negara berkembang.

j) Aktivitas-aktivitas pembaharuan institusional yang terkait dengan TIK dan meningkatkan kemampuan terhadap kerangka hukum dan pengaturan.

k) Memperbaiki struktur organisasi dan perubahan proses bisnis yang bertujuan mengoptimalkan dampak dan efektivitas proyek-proyek TIK dan proyek-proyek lainnya dengan komponen-komponen TIK yang penting.

l) Pemerintah lokal dan inisiatif-inisiatif yang berbasis di komunitas lokal yang memberi layanan TIK untuk komunitas di bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan mata pencaharian.

24. Menyadari bahwa tanggungjawab utama untuk koordinasi inisiatif program pembiayaan publik dan pengembangan TIK publik ada pada pemerintah, **kita menyarankan** bahwa harus dilakukan koordinasi antar-sektor dan antar-institusi selanjutnya, baik pada bagian pendonor maupun penerima di dalam kerangka nasional.

25. Bank-bank pembangunan multilateral dan institusi-institusi harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan mekanisme mereka yang ada, dan bila diperlukan menciptakan yang baru, untuk penyediaan terhadap kebutuhan nasional dan regional untuk pembangunan TIK.

26. Kita mengetahui prasyarat-prasyarat berikut untuk aksesibilitas yang adil dan universal, dan penggunaan yang lebih baik dari mekanisme-mekanisme keuangan:

a) Menciptakan insentif kebijakan dan peraturan yang bertujuan pada akses universal dan penarikan minat investasi sektor swasta.

b) Identifikasi dan pengakuan dari peran kunci TIK dalam strategi pembangunan nasional, dan penjabarannya, yang diperlukan, yang berhubungan dengan e-strategi.

c) Mengembangkan kemampuan institusional dan kemampuan untuk mendukung penggunaan dana nasional untuk pelayanan/akses universal, dan lebih lanjut mempelajari mekanisme-mekanisme ini serta yang bertujuan untuk memobilisasi sumber daya domestik.

d) Encouraging the development of locally-relevant information, applications and services that will benefit developing countries and countries with economies in transition;

e) Supporting the “scaling-up” of successful ICT-based pilot programmes;

f) Supporting the use of ICTs in government as a priority and crucial target area for ICT-based development interventions;

g) Building human resource and institutional capacity (knowledge) at every level for achieving Information Society objectives, especially in the public sector;

h) Encouraging business sector entities to help jump-start wider demand for ICT services by supporting creative industries, local producers of cultural content and applications as well as small businesses;

i) Strengthening capacities to enhance the potential of securitised funds and utilising them effectively.

27. We recommend improvements and innovations in existing financing mechanisms, including:

a) Improving financial mechanisms to make financial resources become adequate, more predictable, preferably untied, and sustainable;

b) Enhancing regional cooperation and creating multi-stakeholder partnerships, especially by creating incentives for building regional backbone infrastructure;

c) Providing affordable access to ICTs, by the following measures:

i. Reducing international Internet costs charged by backbone providers, supporting, inter alia, the creation and development of regional ICT backbones and Internet Exchange Points to reduce interconnection cost and broaden network access;

ii. Encouraging ITU to continue the study of the question of the International Internet Connectivity (IIC) as an urgent matter to develop appropriate Recommendations;

d) Coordinating programmes among governments and major financial players to mitigate investment risks and transaction costs for operators entering less attractive rural and low income market segments;

d) Mendorong pengembangan informasi, aplikasi, dan pelayanan yang sesuai lingkungan lokal yang akan memberi manfaat terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

e) Mendukung “perluasan” program-program percobaan berlandaskan TIK yang berhasil.

f) Mendukung penggunaan TIK di pemerintahan sebagai suatu bidang sasaran prioritas dan menentukan untuk intervensi pengembangan berlandaskan TIK.

g) Membangun sumber daya manusia dan kemampuan institusional (pengetahuan) di setiap tingkat untuk mencapai maksud Masyarakat Informasi, khususnya di sektor publik.

h) Mendorong perusahaan sektor bisnis untuk membantu melejitkan kebutuhan pelayanan TIK yang lebih luas dengan mendukung industri-industri kreatif, produsen konten dan aplikasi kebudayaan lokal, serta bisnis kecil.

i) Memperkuat kemampuan untuk meningkatkan peluang dana yang terjamin dan menggunakannya secara efektif.

27. Kita menyarankan perbaikan dan inovasi mekanisme keuangan yang telah ada, termasuk:

a) Memperbaiki mekanisme keuangan untuk membuat sumber daya keuangan yang memadai, lebih dapat diprediksi, sebaiknya tidak terikat, dan berkesinambungan.

b) Meningkatkan kerjasama regional dan menciptakan kemitraan antar multi pemangku kepentingan, khususnya dengan menciptakan insentif untuk membangun infrastruktur tulang punggung regional.

c) Menyediakan akses TIK yang terjangkau, dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

i. menurunkan biaya Internet internasional yang dibebankan oleh penyelenggara tulang punggung (backbone), mendukung, antara lain, penciptaan dan pengembangan tulang punggung TIK regional dan Pusat-pusat Penyambungan Internet untuk menurunkan ongkos interkoneksi serta memperluas akses jaringan;

ii. Mendorong ITU untuk melanjutkan studi terhadap masalah Ketersambungan Internet Internasional (SII) sebagai persoalan mendesak untuk mengembangkan Rekomendasi-Rekomendasi yang tepat.

d) Mengkoordinasikan program-program antar pemerintahan dan pemain keuangan utama untuk mengurangi resiko investasi dan ongkos transaksi bagi para operator yang memasuki segmen-segmen pasar pedesaan yang kurang menguntungkan dan segmen investasi berpendapatan rendah.

e) Helping to accelerate the development of domestic financial instruments, including by supporting local microfinance instruments, ICT business incubators, public credit instruments, reverse auction mechanisms, networking initiatives based on local communities, digital solidarity and other innovations;

f) Improving the ability to access financing facilities with a view to accelerating the pace of financing of ICT infrastructure and services, including the promotion of North-South flows as well as North-South and South-South cooperation;

g) Multilateral, regional and bilateral development organisations should consider the utility of creating a virtual forum for the sharing of information by all stakeholders on potential projects, on sources of financing and on institutional financial mechanisms;

h) Enabling developing countries to be increasingly able to generate funds for ICTs and to develop financial instruments, including trust funds and seed capital adapted to their economies;

i) Urging all countries to make concrete efforts to fulfil their commitments under the *Monterrey Consensus*;

j) Multilateral, regional and bilateral development organisations should consider cooperating to enhance their capacity to provide rapid response with a view to supporting developing countries that request assistance with respect to ICT policies;

k) Encouraging increased voluntary contributions;

l) Making, as appropriate, effective use of debt relief mechanisms as outlined in the *Geneva Plan of Action*, including *inter alia* debt cancellation and debt swapping, that may be used for financing ICT for development projects, including those within the framework of poverty reduction strategies.

28. We welcome the Digital Solidarity Fund (DSF) established in Geneva as an innovative financial mechanism of a voluntary nature open to interested stakeholders with the objective of transforming the digital divide into digital opportunities for the developing world by focusing mainly on specific and urgent needs at the local level and seeking new voluntary sources of “solidarity” finance. The DSF will complement existing mechanisms for funding the Information Society, which should continue to be fully utilised to fund the growth of new ICT infrastructure and services.

e) Membantu mempercepat pengembangan pengaturan keuangan domestik termasuk mendukung pengaturan keuangan lokal mikro, inkubator bisnis TIK, pengaturan kredit publik, mekanisme lelang mundur, inisiatif jejaring berdasarkan komunitas lokal, solidaritas digital, dan inovasi-inovasi lainnya.

f) Memperbaiki kemampuan untuk mengakses fasilitas pembiayaan dengan pandangan untuk mempercepat langkah pembiayaan infrastruktur dan pelayanan TIK, termasuk mempromosikan arus Utara-Selatan, serta kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.

g) Organisasi-organisasi pengembangan multilateral, regional, dan bilateral harus mempertimbangkan kegunaan penciptaan suatu forum virtual untuk pertukaran informasi oleh semua pemangku kepentingan mengenai proyek-proyek potensial, mengenai sumber daya pembiayaan dan tentang mekanisme keuangan institusional.

h) Memberdayakan negara-negara berkembang untuk dapat meningkat secara bertahap dalam rangka menghasilkan dana untuk TIK dan untuk mengembangkan perangkat keuangan, termasuk dana titipan dan modal awal yang disesuaikan dengan ekonomi mereka.

i) Mendesak semua negara untuk membuat upaya kongkrit dalam memenuhi komitmen mereka di bawah *Konsensus Monterrey*.

j) Organisasi-organisasi pengembangan multilateral, regional, dan bilateral harus mempertimbangkan bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyediakan respons yang cepat dengan pandangan untuk mendukung negara-negara berkembang yang meminta bantuan yang terkait pada kebijakan TIK.

k) Mendorong peningkatan kontribusi sukarela.

l) Membuat, setepat-tepatnya, penggunaan mekanisme peringanan hutang secara efektif seperti yang digariskan dalam *Rencana Aksi Geneva*, termasuk *antara lain* penghapusan hutang dan pertukaran hutang, yang dapat digunakan untuk pembiayaan proyek pengembangan TIK, termasuk yang tercantum di dalam kerangka Strategi Penurunan Kemiskinan.

28. Kita menyambut baik Dana Solidaritas Digital yang didirikan di Geneva sebagai mekanisme keuangan inovatif sukarela yang terbuka untuk pemangku kepentingan yang berminat, dengan maksud untuk mengubah kesenjangan digital menjadi peluang digital untuk dunia berkembang dengan memfokuskan terutama pada tingkat lokal kebutuhan-kebutuhan spesifik dan mendesak, serta mencari sumber daya sukarelawan baru bagi keuangan “solidaritas”. DSF akan mengimbangi mekanisme-mekanisme yang sudah ada untuk pendanaan Masyarakat Informasi, yang harus terus berlanjut untuk digunakan secara penuh untuk mendanai pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan baru TIK.

C. Internet Governance

29. We reaffirm the principles enunciated in the Geneva phase of the WSIS, in December 2003, that the Internet has evolved into a global facility available to the public and its governance should constitute a core issue of the Information Society agenda. The international management of the Internet should be multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of governments, the private sector, civil society and international organisations. It should ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure functioning of the Internet, taking into account multilingualism.

30. We acknowledge that the Internet, a central element of the infrastructure of the Information Society, has evolved from a research and academic facility into a global facility available to the public.

31. We recognize that Internet governance, carried out according to the Geneva principles, is an essential element for a people-centred, inclusive, development oriented and non-discriminatory Information Society. Furthermore, we commit ourselves to the stability and security of the Internet as a global facility and to ensuring the requisite legitimacy of its governance, based on the full participation of all stakeholders, from both developed and developing countries, within their respective roles and responsibilities.

32. We thank the UN Secretary-General for establishing the Working Group on Internet Governance (WGIG). **We commend** the chairman, members and secretariat for their work and for their report.

33. We take note of the WGIG's report that has endeavoured to develop a working definition of Internet governance. It has helped identify a number of public policy issues that are relevant to Internet governance. The report has also enhanced our understanding of the respective roles and responsibilities of governments, inter-governmental and international organisations and other forums as well as the private sector and civil society from both developing and developed countries.

34. A working definition of Internet governance is the development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet.

35. We reaffirm that the management of the Internet encompasses both technical and public policy issues and should involve all stakeholders and relevant inter-

C. Pengelolaan Internet

29. Kita menegaskan kembali prinsip-prinsip yang telah diumumkan dalam WSIS tahap Geneva, pada Desember 2003, bahwa Internet telah tumbuh menjadi fasilitas global yang tersedia untuk publik dan pengaturannya harus merupakan suatu persoalan inti agenda Masyarakat Informasi. Manajemen internasional Internet harus multilateral, transparan, dan demokratis, dengan keikutsertaan penuh dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional. Hal tersebut harus memastikan penyaluran sumber daya yang merata, memudahkan akses untuk semua, dan memastikan fungsi Internet yang stabil dan aman, dengan memperhitungkan multilingualisme.

30. Kita mengakui bahwa Internet, suatu elemen sentral infrastruktur Masyarakat Informasi, telah berubah dari fasilitas riset dan akademis menjadi fasilitas global tersedia untuk publik.

31. Kita mengakui bahwa pengelolaan Internet, terselenggara sesuai dengan prinsip-prinsip Geneva, merupakan unsur esensial untuk Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, inklusif, terarah pada pembangunan, dan non-diskriminatif. Selanjutnya, kita berkomitmen terhadap diri sendiri untuk kestabilan dan keamanan Internet sebagai fasilitas global serta untuk memastikan legitimasi yang dipersyaratkan, bagi pengelolaannya, berdasarkan keikutsertaan penuh semua pemangku kepentingan, dari negara-negara maju dan berkembang, di dalam peran dan tanggungjawabnya masing-masing.

32. Kita berterima kasih kepada Sekretaris Jenderal PBB yang telah mendirikan Kelompok Kerja mengenai Pengelolaan Internet (Working Group on Internet Governance / WGIG). **Kita menghargai** ketua, anggota, dan sekretariat untuk hasil kerja dan laporan mereka.

33. Kita mencatat laporan WGIG yang telah berusaha mengembangkan definisi kerja tentang pengelolaan Internet. Hal ini telah membantu mengidentifikasi sejumlah persoalan kebijakan publik yang relevan dengan pengelolaan Internet. Laporan tersebut telah meningkatkan pemahaman kita terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pemerintah, organisasi antar-pemerintah, dan organisasi internasional serta forum-forum lain, serta sektor swasta dan masyarakat sipil dari negara-negara berkembang dan negara maju.

34. Definisi kerja dari pengelolaan Internet adalah *pengembangan dan aplikasi oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam peran mereka masing-masing, terhadap prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dan program-program yang membangun evolusi dan penggunaan dari Internet.*

35. Kita menegaskan kembali bahwa manajemen Internet mencakup baik teknis maupun kebijakan publik serta harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan

governmental and international organisations. In this respect it is recognized that:

- a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of States. They have rights and responsibilities for international Internet-related public policy issues;
- b) The private sector has had, and should continue to have, an important role in the development of the Internet, both in the technical and economic fields;
- c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at community level, and should continue to play such a role;
- d) Inter-governmental organisations have had, and should continue to have, a facilitating role in the coordination of Internet-related public policy issues;
- e) International organisations have also had and should continue to have an important role in the development of Internet-related technical standards and relevant policies.

36. We recognize the valuable contribution by the academic and technical communities within those stakeholder groups mentioned in paragraph 35 to the evolution, functioning and development of the Internet.

37. We seek to improve the coordination of the activities of international and inter-governmental organisations and other institutions concerned with Internet governance and the exchange of information among themselves. A multi-stakeholder approach should be adopted, as far as possible, at all levels.

38. We call for the reinforcement of specialised regional Internet resource management institutions to guarantee the national interest and rights of countries in that particular region to manage their own Internet resources, while maintaining global coordination in this area.

39. We seek to build confidence and security in the use of ICTs by strengthening the trust framework. **We reaffirm** the necessity to further promote, develop and implement in cooperation with all stakeholders a global culture of cyber-security, as outlined in UNGA *Resolution 57/239* and other relevant regional frameworks. This culture requires national action and increased international cooperation to strengthen security while enhancing the protection of personal information, privacy and data. Continued development of the culture of cyber-security should enhance access and trade and

organisasi-organisasi antar-pemerintah dan internasional yang terkait. Mengenai hal ini, disepakati bahwa:

- a) Otoritas kebijakan untuk isu kebijakan publik yang terkait dengan Internet adalah hak kedaulatan negara. Mereka mempunyai hak dan tanggung jawab untuk persoalan-persoalan kebijakan publik yang terkait dengan Internet.
- b) Sektor swasta telah, dan harus terus memiliki, peran penting dalam pengembangan Internet, di bidang teknis dan ekonomi.
- c) Masyarakat sipil juga harus memainkan peran penting dalam persoalan-persoalan Internet, khususnya pada tingkat komunitas, dan harus terus memainkan peran tersebut.
- d) Organisasi-organisasi antar-pemerintah telah, dan harus terus memiliki, peran fasilitasi dalam mengkoordinasikan isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan Internet.
- e) Organisasi-organisasi internasional telah, dan harus terus memiliki, peran penting dalam pengembangan standar teknis yang terkait dengan Internet dan kebijakan yang sesuai.

36. Kita mengakui kontribusi berharga yang disampaikan oleh komunitas akademik dan teknis di dalam kelompok para pemangku kepentingan yang disebutkan dalam *paragraf 35* terhadap evolusi, fungsi, dan pengembangan Internet.

37. Kita mencoba untuk memperbaiki koordinasi aktivitas organisasi-organisasi internasional dan antar pemerintah serta institusi-institusi lainnya yang menaruh perhatian pada pengelolaan Internet dan pertukaran informasi antar mereka sendiri. Suatu pendekatan multi pemangku kepentingan harus disepakati, sejauh mungkin, pada semua tingkatan.

38. Kita menyerukan penguatan terhadap institusi-institusi manajemen sumber daya Internet regional dikhususkan untuk menjamin kepentingan nasional dan hak-hak dari negara-negara dalam wilayah tertentu tersebut untuk mengatur sumber daya Internet mereka sendiri, seraya memelihara koordinasi global di bidang ini.

39. Kita mencoba untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK dengan memperkuat kerangka kepercayaan. **Kita menegaskan kembali** perlunya untuk mempromosikan lebih lanjut, mengembangkan, dan menjalankan suatu budaya global keamanan dunia maya melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, seperti yang digarisbawahi dalam *Resolusi UNGA 57/239* dan pola regional yang sesuai lainnya. Budaya ini membutuhkan tindakan nasional dan peningkatan kerjasama internasional untuk memperkuat keamanan seraya meningkatkan pengamanan informasi privasi dan data pribadi. Pengembangan berkelanjutan dari budaya keamanan dunia maya harus meningkatkan akses dan perdagangan dan harus memperhitungkan

must take into account the level of social and economic development of each country and respect the development-oriented aspects of the Information Society.

40. We underline the importance of the prosecution of cybercrime, including cybercrime committed in one jurisdiction, but having effects in another. **We further underline** the necessity of effective and efficient tools and actions, at national and international levels, to promote international cooperation among, *inter alia*, law enforcement agencies on cybercrime. **We call upon governments** in cooperation with other stakeholders to develop necessary legislation for the investigation and prosecution of cybercrime, noting existing frameworks, for example, UNGA *Resolutions 55/63 and 56/121 on Combatting the criminal misuse of information technologies* and regional initiatives including, but not limited to, the Council of Europe's *Convention on Cybercrime*.

41. We resolve to deal effectively with the significant and growing problem posed by spam. **We take note** of current multilateral, multi-stakeholder frameworks for regional and international cooperation on spam, for example, *the APEC Anti-Spam Strategy, the London Action Plan, the Seoul Melbourne Anti-Spam Memorandum of Understanding* and the relevant activities of OECD and ITU. **We call upon** all stakeholders to adopt a multi-pronged approach to counter spam that includes, *inter alia*, consumer and business education; appropriate legislation, law enforcement authorities and tools; the continued development of technical and self-regulatory measures; best practices; and international cooperation.

42. We reaffirm our commitment to the freedom to seek, receive, impart and use information, in particular, for the creation, accumulation and dissemination of knowledge. **We affirm** that measures undertaken to ensure Internet stability and security, to fight cybercrime and to counter spam, must protect and respect the provisions for privacy and freedom of expression as contained in the relevant parts of the *Universal Declaration of Human Rights* and the *Geneva Declaration of Principles*

43. We reiterate our commitments to the positive uses of the Internet and other ICTs and to take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs as mentioned under *the Ethical Dimensions of the Information Society of the Geneva Declaration of Principles and Plan of Action*.

44. We also underline the importance of countering terrorism in all its forms and manifestations on the Internet, while respecting human rights and in compliance with other obligations under international law, as outlined in UNGA *A/60/L.1* with reference to *Article 85* of the 2005 *World Summit Outcome*.

tingkat pengembangan sosial dan ekonomi setiap negara serta menghormati aspek-aspek yang berorientasi pada pengembangan Masyarakat Informasi.

40. Kita menggarisbawahi pentingnya penuntutan hukum kejahatan dunia maya, termasuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dalam satu yurisdiksi, tapi berdampak di bidang lainnya. **Kita selanjutnya menggarisbawahi** perlunya alat-peralatan dan tindakan yang efektif dan efisien, pada tingkat nasional dan internasional, untuk mempromosikan kerjasama internasional di antara, antara lain, agen-agen penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya. **Kita menyerukan kepada pemerintah** dalam kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan peraturan perundangan-undangan yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan hukum kejahatan dunia maya, dengan memperhatikan kerangka yang telah ada, misalnya, *Resolusi UNGA 55/63 dan 56/121 mengenai Memerangi perbuatan kriminal penyalahgunaan teknologi informasi* dan inisiatif-inisiatif regional termasuk, tapi tidak terbatas pada, *Dewan Konvensi Eropa terhadap Kejahatan Dunia Maya*.

41. Kita memutuskan untuk menyelesaikan secara efektif masalah besar dan yang sedang berkembang secara signifikan akibat spam. **Kita mencatat** kerangka multilateral, multi pemangku kepentingan saat ini, untuk kerjasama regional dan internasional terhadap spam, misalnya, *Strategi Anti-Spam APEC, Rencana Aksi London, Memorandum Kesepakatan Anti-Spam Seoul Melbourne* dan aktivitas-aktivitas sesuai OECD dan ITU. **Kita menyerukan** kepada semua pemangku kepentingan, untuk mengadopsi pendekatan multi jurus melawan spam termasuk, *antara lain*, pendidikan konsumen dan bisnis; peraturan perundang-undangan yang sesuai, otoritas dan sarana penegakan hukum; pengembangan berkelanjutan dari tindakan-tindakan teknis dan pengaturan diri; praktek-praktek terbaik; dan kerjasama internasional.

42. Kita menegaskan kembali komitmen kita terhadap kebebasan untuk mencari, menerima, memberi, dan menggunakan informasi, khususnya, untuk penciptaan, pengumpulan, dan diseminasi pengetahuan. **Kita menegaskan** bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan stabilitas dan keamanan Internet, untuk memerangi kejahatan dunia maya dan menanggulangi spam, harus melindungi dan menghormati penciptaan privasi dan kebebasan berekspresi seperti yang terkandung dalam bagian-bagian yang sesuai dalam *Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia* dan *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva*.

43. Kita menyatakan kembali komitmen kita terhadap penggunaan Internet yang positif dan TIK lainnya serta untuk mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dan langkah pencegahan, seperti yang ditentukan oleh hukum, melawan penyalahgunaan TIK seperti yang disebutkan dalam *Dimensi-Dimensi Etika Masyarakat Informasi dari Deklarasi Prinsip-Prinsip* dan *Rencana Aksi Geneva*.

44. Kita menggarisbawahi pentingnya melawan terorisme dalam semua bentuk dan manifestasinya di Internet, sambil menghormati hak-hak asasi manusia dan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lain di bawah hukum internasional, seperti yang tercantum dalam UNGA *A/60/L.1* dengan referensi kepada *Artikel 85 Hasil KTT Dunia 2005*.

45. We underline the importance of the security, continuity and stability of the Internet, and the need to protect the Internet and other ICT networks from threats and vulnerabilities. **We affirm** the need for a common understanding of the issues of Internet security, and for further cooperation to facilitate outreach, the collection and dissemination of security-related information and exchange of good practice among all stakeholders on measures to combat security threats, at national and international levels.

46. We call upon all stakeholders to ensure respect for privacy and the protection of personal information and data, whether via adoption of legislation, the implementation of collaborative frameworks, best practices and self-regulatory and technological measures by business and users. **We encourage all stakeholders**, in particular governments, to reaffirm the right of individuals to access information according to the *Geneva Declaration of Principles* and other mutually-agreed relevant international instruments, and to coordinate internationally as appropriate.

47. We recognize the increasing volume and value of all e-business, both within and across national boundaries. **We call for** the development of national consumer protection laws and practices, and enforcement mechanisms where necessary, to protect the right of consumers who purchase goods and services online, and for enhanced international cooperation to facilitate a further expansion, in a non-discriminatory way, under applicable national laws, of e-business as well as consumer confidence in it.

48. We note with satisfaction the increasing use of ICT by governments to serve citizens and encourage countries that have not yet done so to develop national programmes and strategies for e-government.

49. We reaffirm our commitment to turning the digital divide into digital opportunity, and **we commit** to ensuring harmonious and equitable development for all. **We commit** to foster and provide guidance on development areas in the broader Internet governance arrangements, and to include, amongst other issues, international interconnection costs, capacity building and technology / know-how transfer. **We encourage** the realization of multilingualism in the Internet development environment, and **we support** the development of software that renders itself easily to localisation, and enables users to choose appropriate solutions from different software models including open-source, free and proprietary software

50. We acknowledge that there are concerns, particularly amongst developing countries, that the charges for international Internet connectivity should be better

45. Kita menggarisbawahi pentingnya keamanan, kesinambungan dan kestabilan Internet, serta kebutuhan untuk melindungi Internet dan jaringan-jaringan TIK lainnya dari ancaman-ancaman dan kerentanan. **Kita menegaskan** kebutuhan untuk pengertian bersama atas persoalan-persoalan keamanan Internet, dan untuk kerjasama selanjutnya dalam memudahkan penyampaian, pengumpulan, dan penyebaran informasi yang terkait dengan keamanan dan bertukar praktek baik antar semua pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah untuk melawan ancaman keamanan, pada tingkat nasional dan internasional.

46. Kita menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan menghormati privasi dan perlindungan terhadap informasi dan data pribadi, melalui adopsi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kerangka kerjasama, praktek-praktek terbaik, serta langkah-langkah pengaturan sendiri dan secara teknologi oleh bisnis dan para pengguna. **Kita mendorong semua pemangku kepentingan**, teristimewa pemerintahan, untuk menegaskan kembali hak-hak individual untuk mengakses informasi sesuai dengan *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva* dan perangkat internasional yang relevan yang disepakati bersama lainnya, serta untuk mengkoordinasikan secara internasional setepat-tepatnya.

47. Kita mengakui peningkatan volume dan nilai semua e-bisnis, baik di dalam maupun yang menyeberangi batas-batas nasional. **Kita menyerukan untuk** melaksanakan pengembangan hukum dan praktek perlindungan konsumen nasional, dan mekanisme pemberlakuan di mana diperlukan, untuk melindungi hak konsumen yang membeli barang dan jasa secara online, dan untuk peningkatan kerjasama internasional dalam memudahkan ekspansi selanjutnya, secara non diskriminatif, di bawah hukum nasional yang berlaku, untuk kepercayaan e-bisnis, serta kepercayaan konsumen.

48. Kita mencatat dengan rasa puas tentang peningkatan penggunaan TIK oleh pemerintah untuk melayani rakyat dan mendorong negara-negara yang belum melakukannya, untuk mengembangkan program-program dan strategi nasional untuk e-pemerintah.

49. Kita menegaskan kembali komitmen untuk mengubah kesenjangan digital menjadi peluang digital, dan **kita berkomitmen** untuk memastikan pengembangan yang serasi dan sederajat untuk semua. **Kita berkomitmen** untuk memelihara dan menyediakan pedoman tentang area pengembangan dalam persiapan pengelolaan Internet yang lebih luas, dan untuk memasukkan, di antara isu-isu antara lain, biaya interkoneksi internasional, pengembangan kemampuan, dan alih teknologi/ pengetahuan. **Kita mendorong** realisasi multi-lingualisme dalam lingkungan pengembangan Internet, dan **kita mendukung** pengembangan perangkat lunak yang dapat menyesuaikan diri secara mudah untuk proses lokalisasi, dan memungkinkan pengguna untuk memilih solusi dari model-model perangkat lunak yang berbeda termasuk perangkat lunak sumber/kode terbuka, bebas, maupun sumber/kode tertutup (berhak milik).

50. Kita mengetahui bahwa ada kekhawatiran, khususnya di antara negara-negara berkembang, bahwa beban biaya untuk koneksitas Internet internasional harus lebih

balanced to enhance access. **We therefore call for** the development of strategies for increasing affordable global connectivity, thereby facilitating improved and equitable access for all, by:

- a) Promoting Internet transit and interconnection costs that are commercially-negotiated in a competitive environment and that should be oriented towards objective, transparent and non-discriminatory parameters, taking into account ongoing work on this subject;
- b) Setting up regional high-speed Internet backbone networks and the creation of national, sub-regional and regional Internet Exchange Points (IXPs);
- c) Recommending donor programmes and developmental financing mechanisms to consider the need to provide funding for initiatives that advance connectivity, IXPs and local content for developing countries;
- d) Encouraging ITU to continue the study of the question of the International Internet Connectivity (IIC) as a matter of urgency, and to periodically provide output for consideration and possible implementation. **We also encourage** other relevant institutions to address this issue;
- e) Promoting the development and growth of low-cost terminal equipment, such as individual and collective user devices, especially for use in developing countries;
- f) Encouraging Internet Service Providers (ISPs) and other parties in the commercial negotiations to adopt practices towards attainment of fair and balanced interconnectivity costs.
- g) Encouraging relevant parties to commercially negotiate reduced interconnection costs for Least Developed Countries (LDCs), taking into account the special constraints of LDCs.

51. We encourage governments and other stakeholders, through partnerships where appropriate, to promote ICT education and training in developing countries, by establishing national strategies for ICT integration in education and workforce development and dedicating appropriate resources. Furthermore, international cooperation would be extended, on a voluntary basis, for capacity building in areas relevant to Internet governance. This may include, in particular, building centres of

diseimbangkan dengan lebih baik untuk meningkatkan akses. **Kita dengan ini menyerukan untuk** pelaksanaan pengembangan strategi untuk meningkatkan ketersambungan global yang terjangkau, sehingga meningkatkan akses yang lebih baik dan seadil untuk semua orang, dengan:

- a) Mempromosikan biaya transit dan interkoneksi Internet yang dinegosiasi secara komersial dalam lingkungan kompetitif dan harus berorientasi pada parameter-parameter objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan memperhitungkan proses kerja yang sedang berlangsung dalam subyek ini.
- b) Menyusun jaringan tulang punggung Internet kecepatan tinggi regional dan penciptaan Pusat-pusat Koneksi Internet (IXPs) nasional, sub-regional, dan regional.
- c) Menyarankan program-program donor dan pengembangan mekanisme pembiayaan untuk mempertimbangkan kebutuhan penyediaan pendanaan untuk inisiatif-inisiatif yang mempromosikan koneksitas, IXPs, dan konten lokal untuk negara-negara berkembang.
- d) Mendorong ITU untuk melanjutkan studi tentang pertanyaan Koneksitas Internet Internasional (IIC) sebagai masalah mendesak, dan secara berkala menyediakan keluaran sebagai bahan pertimbangan dan kemungkinan implementasinya. **Kita mendorong** institusi-institusi yang relevan lainnya untuk membahas isu ini.
- e) Mempromosikan pengembangan dan pertumbuhan perangkat terminal dengan biaya rendah, seperti peralatan pengguna individual dan bersama, teristimewa untuk digunakan di negara-negara berkembang.
- f) Mendorong Penyedia Layanan Internet (ISP) dan kelompok-kelompok lainnya dalam negosiasi komersial untuk menyepakati praktek menuju pencapaian biaya koneksitas yang adil dan seimbang.
- g) Mendorong kelompok-kelompok yang relevan untuk bernegosiasi secara komersial dalam rangka pengurangan biaya interkoneksi untuk Negara Terbelakang (LDCs), dengan memperhitungkan kendala-kendala khusus dari LDCs.

51. Kita mendorong pemerintah-pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, melalui kerjasama kemitraan yang diperlukan, untuk mempromosikan pendidikan dan pelatihan TIK di negara-negara berkembang, dengan mengembangkan strategi-strategi nasional untuk integrasi TIK dalam pengembangan pendidikan dan tenaga kerja serta menyediakan sumber daya yang sesuai. Lebih lanjut, kerjasama internasional dapat diperluas, atas dasar sukarela, untuk pengembangan kemampuan di bidang-bidang yang sesuai dengan pengelolaan Internet. Ini dapat mencakup, khususnya, membangun pusat-pusat keahlian dan institusi-institusi lain untuk memudahkan alih pengetahuan

expertise and other institutions to facilitate know-how transfer and exchange of best practices, in order to enhance the participation of developing countries and all stakeholders in Internet governance mechanisms.

52. In order to ensure effective participation in global Internet governance, **we urge** international organisations, including inter-governmental organisations, where relevant, to ensure that all stakeholders, particularly from developing countries, have the opportunity to participate in policy decision-making relating to Internet governance, and to promote and facilitate such participation.

53. We commit to working earnestly towards multilingualisation of the Internet, as part of a multilateral, transparent and democratic process, involving governments and all stakeholders, in their respective roles. In this context, **we also support** local content development, translation and adaptation, digital archives, and diverse forms of digital and traditional media, and recognize that these activities can also strengthen local and indigenous communities. **We would therefore underline** the need to:

- a) Advance the process for the introduction of multilingualism in a number of areas including domain names, email addresses and keyword look-up;
- b) Implement programmes that allow for the presence of multilingual domain names and content on the Internet and the use of various software models in order to fight against the linguistic digital divide and to ensure the participation of all in the emerging new society.
- c) Strengthen cooperation between relevant bodies for the further development of technical standards and to foster their global deployment.

54. We recognize that an enabling environment, at national and international levels, supportive of foreign direct investment, transfer of technology, and international cooperation, particularly in the areas of finance, debt and trade, is essential for the development of the Information Society, including for the development and diffusion of the Internet and its optimal use. In particular, the roles of the private sector and civil society as the drivers of innovation and private investment in the development of the Internet are critical. Value is added at the edges of the network in both developed and developing countries when the international and domestic policy environment encourages investment and innovation.

55. We recognize that the existing arrangements for Internet governance have worked effectively to make the Internet the highly robust, dynamic and geographically diverse medium that it is today, with the private sector taking the lead in day-to-day operations, and with innovation and value creation at the edges.

dan pertukaran praktek-praktek terbaik, dalam upaya untuk meningkatkan keikutsertaan negara-negara berkembang dan semua pemangku kepentingan dalam mekanisme pengelolaan Internet.

52. Dalam rangka memastikan keikutsertaan yang efektif dalam pengelolaan Internet global, **kita mendesak** organisasi-organisasi internasional, termasuk organisasi antar pemerintah, yang relevan, untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, khususnya dari negara-negara berkembang, memiliki peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Internet, dan untuk mempromosikan dan memfasilitasi keikutsertaan tersebut.

53. Kita berkomitmen untuk bekerja sungguh-sungguh menuju pemultibahasaan Internet, sebagai bagian dari proses multilateral, transparan, dan demokratis, melibatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan, dalam peran mereka masing-masing. Dalam konteks ini, **kita mendukung** pengembangan, penterjemahan, dan penyesuaian konten lokal, pengarsipan digital, dan beragam bentuk media digital dan tradisional, dan mengakui bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat pula memperkuat komunitas-komunitas lokal dan pribumi. **Kita dengan demikian akan menggarisbawahi** kebutuhan untuk:

- a) Mempromosikan proses untuk pengenalan multi-lingualisme dalam sejumlah bidang termasuk nama ranah, alamat e-mail, dan pencarian kata kunci;
- b) Mengimplementasikan program-program yang membolehkan adanya nama ranah dan konten multi-bahasa pada Internet dan penggunaan berbagai model perangkat lunak dalam upaya untuk memerangi kesenjangan digital bahasa dan memastikan keikutsertaan semua orang dalam pemunculan masyarakat baru.
- c) Memperkuat kerjasama antar badan yang sesuai untuk pengembangan selanjutnya dari standar-standar teknis dan untuk memelihara penggelaran global.

54. Kita mengakui bahwa lingkungan yang memberdayakan, di tingkat nasional dan internasional, yang mendukung investasi asing langsung, alih teknologi, dan kerjasama internasional, khususnya di bidang keuangan, hutang-piutang dan perdagangan, sangat diperlukan untuk pengembangan Masyarakat Informasi, termasuk untuk pengembangan dan penyebaran Internet serta penggunaannya secara optimal. Khususnya, peran sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai pendorong inovasi dan investasi pribadi dalam pengembangan Internet sangatlah menentukan. Akan terjadi pertambahan nilai di penghujung-penghujung jaringan baik di negara maju maupun berkembang pada saat lingkungan kebijakan internasional dan domestik mendorong investasi dan inovasi.

55. Kita mengakui bahwa persiapan yang ada untuk pengelolaan Internet telah bekerja secara efektif untuk membuat Internet sebagai medium yang sangat kuat, dinamis, dan memiliki keragaman geografis seperti sekarang ini, dengan sektor swasta mengambil pimpinan dalam operasional sehari-hari, dan dengan inovasi dan penciptaan nilai di penghujung-penghujungnya.

56. The Internet remains a highly dynamic medium and therefore any framework and mechanisms designed to deal with Internet governance should be inclusive and responsive to the exponential growth and fast evolution of the Internet as a common platform for the development of multiple applications.

57. The security and stability of the Internet must be maintained.

58. We recognize that Internet governance includes more than Internet naming and addressing. It also includes other significant public policy issues such as, *inter alia*, critical Internet resources, the security and safety of the Internet, and developmental aspects and issues pertaining to the use of the Internet.

59. We recognize that Internet governance includes social, economic and technical issues including affordability, reliability and quality of service.

60. We further recognize that there are many cross-cutting international public policy issues that require attention and are not adequately addressed by the current mechanisms.

61. We are convinced that there is a need to initiate, and reinforce, as appropriate, a transparent, democratic, and multilateral process, with the participation of governments, private sector, civil society and international organisations, in their respective roles. This process could envisage creation of a suitable framework or mechanisms, where justified, thus spurring the ongoing and active evolution of the current arrangements in order to synergise the efforts in this regard.

62. We emphasize that any Internet governance approach should be inclusive and responsive and should continue to promote an enabling environment for innovation, competition and investment.

63. Countries should not be involved in decisions regarding another country's country-code Top-Level Domain (ccTLD). Their legitimate interests, as expressed and defined by each country, in diverse ways, regarding decisions affecting their ccTLDs, need to be respected, upheld and addressed via a flexible and improved framework and mechanisms

64. We recognize the need for further development of, and strengthened co-operation among, stakeholders for public policies for generic top-level domain names (gTLDs).

65. We underline the need to maximise the participation of developing countries in decisions regarding Internet governance, which should reflect their interests, as well as in development and capacity building.

56. Internet tetap sebagai medium berdinamika tinggi dan oleh karena itu kerangka dan mekanisme apapun yang dirancang untuk menghadapi pengelolaan Internet harus inklusif dan responsif terhadap pertumbuhan eksponensial dan evolusi cepat dari Internet sebagai suatu kerangka bersama untuk pengembangan berbagai aplikasi.

57. Keamanan dan kestabilan Internet harus dipelihara.

58. Kita mengakui bahwa pengelolaan Internet mencakup lebih dari pemberian nama dan alamat Internet. Hal ini termasuk masalah kebijakan publik signifikan lain, **antara lain**, sumber daya Internet yang kritis, keamanan dan keselamatan Internet, serta aspek perkembangan dan masalah mengenai penggunaan Internet.

59. Kita mengakui bahwa pengelolaan Internet mencakup persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan teknis, termasuk keterjangkauan, keandalan, dan kualitas layanan.

60. Kita selanjutnya mengakui bahwa terdapat banyak isu kebijakan publik internasional yang saling-terkait dan membutuhkan perhatian serta tidak cukup dibahas oleh mekanisme-mekanisme yang berlaku saat ini.

61. Kita memiliki keyakinan bahwa terdapat kebutuhan untuk memprakarsai, dan mendorong, proses-proses yang tepat, yang transparan, demokratis, dan multilateral, dengan keikutsertaan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional, sesuai dengan peran masing-masing. Proses ini dapat menggambarkan penciptaan kerangka atau mekanisme yang tepat, sehingga memacu evolusi yang sedang berlangsung dan aktif dari persiapan-persiapan sekarang ini dalam rangka mensinergikan upaya-upaya mengenai hal ini.

62. Kita menekankan bahwa pendekatan pengelolaan Internet apa pun harus inklusif dan responsif serta harus terus mempromosikan lingkungan yang memberdayakan untuk inovasi, kompetisi, dan investasi.

63. Negara-negara tidak perlu terlibat dalam keputusan mengenai kode negara Ranah Tingkat Puncak (ccTLD) dari negara lain. Keinginan kuat mereka, seperti yang dinyatakan dan ditentukan oleh setiap negara, dalam beragam cara, mengenai keputusan yang mempengaruhi ccTLDs mereka, perlu untuk dihormati, dijunjung, dan dibahas melalui suatu kerangka dan mekanisme yang fleksibel dan lebih baik.

64. Kita mengakui kebutuhan untuk pengembangan selanjutnya dari, dan penguatan kerjasama antara, pemangku kepentingan untuk kebijakan publik dari nama generik Ranah Tingkat Puncak (gTLDs)

5. Kita menggarisbawahi kebutuhan untuk memaksimalkan keikutsertaan negara-negara berkembang dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan Internet, yang harus mencerminkan keinginan kuat mereka, serta dalam pembangunan dan pengembangan kemampuannya.

66. In view of the continuing internationalization of the Internet and the principle of universality, **we agree** to implement the *Geneva Principles* regarding Internet governance.

67. We agree, inter alia, to invite the UN Secretary-General to convene a new forum for multi-stakeholder policy dialogue.

68. We recognize that all governments should have an equal role and responsibility for international Internet governance and for ensuring the stability, security and continuity of the Internet. **We also recognize** the need for development of public policy by governments in consultation with all stakeholders.

69. We further recognize the need for enhanced cooperation in the future, to enable governments, on an equal footing, to carry out their roles and responsibilities, in international public policy issues pertaining to the Internet, but not in the day-to-day technical and operational matters, that do not impact on international public policy issues.

70. Using relevant international organisations, such cooperation should include the development of globally-applicable principles on public policy issues associated with the coordination and management of critical Internet resources. In this regard, **we call upon** the organisations responsible for essential tasks associated with the Internet to contribute to creating an environment that facilitates this development of public policy principles.

71. The process towards enhanced cooperation, to be started by the UN Secretary-General, involving all relevant organisations by the end of the first quarter of 2006, will involve all stakeholders in their respective roles, will proceed as quickly as possible consistent with legal process, and will be responsive to innovation. Relevant organisations should commence a process towards enhanced cooperation involving all stakeholders, proceeding as quickly as possible and responsive to innovation. The same relevant organisations shall be requested to provide annual performance reports.

72. We ask the UN Secretary-General, in an open and inclusive process, to convene, by the second quarter of 2006, a meeting of the new forum for multi-stakeholder policy dialogue-called the *Internet Governance Forum (IGF)*. The mandate of the Forum is to:

- a) Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to foster the sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet;

66. Menunjuk pada internasionalisasi Internet yang berkelanjutan dan prinsip universal, **kita menyetujui** untuk melaksanakan *Prinsip-Prinsip Geneva* mengenai pengelolaan Internet.

67. Kita menyetujui, antara lain, untuk mengundang Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk suatu forum baru untuk melaksanakan dialog kebijakan multi pemangku kepentingan.

68. Kita mengakui, bahwa semua pemerintahan harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, untuk pengelolaan Internet internasional dan untuk menjamin stabilitas, keamanan, dan kelanjutan Internet. **Kita juga mengakui** kebutuhan untuk pengembangan kebijakan publik oleh pemerintah dalam konsultasi dengan semua pemangku kepentingan.

69. Kita selanjutnya mengakui kebutuhan untuk peningkatan kerjasama di masa depan, untuk memberdayakan pemerintah, pada dasar pijak yang sama, untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka, dalam masalah kebijakan publik internasional sehubungan dengan Internet, tetapi bukan dalam persoalan teknis dan operasional harian yang tidak berdampak pada masalah kebijakan publik internasional.

70. Dengan menggunakan organisasi internasional yang relevan, kerjasama tersebut harus termasuk pengembangan prinsip global yang dapat diaplikasikan untuk isu kebijakan publik yang terkait dengan koordinasi dan manajemen atas sumber daya Internet yang kritis. Dalam hal ini, **kita menyerukan** kepada organisasi-organisasi yang bertanggungjawab untuk tugas-tugas esensial yang terkait dengan Internet untuk memberi kontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang memudahkan pengembangan prinsip kebijakan publik ini.

71. Proses menuju peningkatan kerjasama, akan dimulai oleh Sekretaris Jenderal PBB, melibatkan semua organisasi terkait menjelang kuartal pertama 2006, akan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan peran masing-masing, akan berlangsung secepat mungkin, konsisten dengan proses hukum, dan akan tanggap terhadap inovasi. Organisasi-organisasi terkait harus memulai suatu proses menuju peningkatan kerjasama yang melibatkan semua pemangku kepentingan, berlangsung secepat mungkin dan tanggap terhadap inovasi. Organisasi-organisasi terkait tersebut akan diminta untuk membuat laporan pelaksanaan tahunan.

72. Kita meminta Sekretaris Jenderal PBB, dalam suatu proses terbuka dan inklusif, untuk menyelenggarakan, menjelang kuartal ke dua 2006, suatu pertemuan forum baru untuk dialog kebijakan multi pemangku kepentingan yang dinamakan *Forum Pengelolaan Internet (IGF)*. Mandat Forum adalah untuk:

- a) Mendiskusikan isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan elemen kunci pengelolaan Internet dalam upaya menumbuh-kembangkan kesinambungan, kehandalan, keamanan, kestabilan, dan pengembangan Internet.

b) Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international public policies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the scope of any existing body;

c) Interface with appropriate inter-governmental organisations and other institutions on matters under their purview;

d) Facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full use of the expertise of the academic, scientific and technical communities;

e) Advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability and affordability of the Internet in the developing world;

f) Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future Internet governance mechanisms, particularly those from developing countries;

g) Identify emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and the general public, and, where appropriate, make recommendations;

h) Contribute to capacity building for Internet governance in developing countries, drawing fully on local sources of knowledge and expertise;

i) Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in Internet governance processes;

j) Discuss, *inter alia*, issues relating to critical Internet resources;

k) Help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of particular concern to everyday users;

l) Publish its proceedings.

73. The Internet Governance Forum, in its working and function, will be multilateral, multi-stakeholder, democratic and transparent. To that end, the proposed IGF could:

a) Build on the existing structures of Internet governance, with special emphasis on the complementarity between all stakeholders involved in this process -

b) Memfasilitasi pertukaran pendapat di antara badan-badan yang berurusan dengan kebijakan publik internasional yang saling terkait yang berbeda, mengenai Internet dan mendiskusikan masalah yang tidak tercakup dalam jangkauan tugas badan-badan yang ada.

c) Berantar-muka dengan organisasi antar-pemerintah yang tepat dan institusi lainnya tentang hal-hal di dalam tugas mereka.

d) Memfasilitasi pertukaran informasi dan praktek-praktek terbaik, dan dalam hal ini memanfaatkan keahlian sepenuhnya komunitas-komunitas akademik, ilmu pengetahuan, dan teknik.

e) Mengajukan semua pemangku kepentingan dalam mengemukakan cara dan sarana untuk mempercepat keberadaan dan keterjangkauan Internet di dalam dunia berkembang.

f) Memperkuat dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mekanisme pengelolaan Internet yang telah ada, dan/atau akan ada di masa mendatang, khususnya dari negara-negara berkembang.

g) Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul, menyampaikannya untuk menjadi perhatian badan-badan yang relevan serta masyarakat umum, dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan.

h) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemampuan pengelolaan Internet di negara-negara berkembang, dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya pengetahuan dan keahlian lokal.

i) Mempromosikan dan menilai, secara berkelanjutan, perwujudan prinsip-prinsip WSIS dalam proses pengelolaan Internet.

j) Mendiskusikan, *antara lain*, masalah-masalah yang terkait dengan sumber daya Internet yang kritis.

k) Membantu mencari pemecahan terhadap masalah yang timbul dari penggunaan dan penyalahgunaan Internet, yang menjadi perhatian khusus para pengguna sehari-hari.

l) Menerbitkan laporan kerja (jurnal rutin).

73. Forum Pengelolaan Internet (IGF), dalam kinerja dan fungsinya, akan menjadi multilateral, multi pemangku kepentingan, demokratis, dan transparan. Untuk hasil tersebut, IGF yang diajukan dapat:

a) Membangun di atas struktur pengelolaan Internet yang ada, dengan penekanan istimewa pada sifat saling mengisi antara semua pemangku kepentingan yang

governments, business entities, civil society and inter-governmental organisations;

b) Have a lightweight and decentralised structure that would be subject to periodic review;

c) Meet periodically, as required. IGF meetings, in principle, may be held in parallel with major relevant UN conferences, *inter alia*, to use logistical support.

74. We encourage the UN Secretary-General to examine a range of options for the convening of the Forum, taking into consideration the proven competencies of all stakeholders in Internet governance and the need to ensure their full involvement.

75. The UN Secretary-General would report to UN Member States periodically on the operation of the Forum.

76. We ask the UN Secretary-General to examine the desirability of the continuation of the Forum, in formal consultation with Forum participants, within five years of its creation, and to make recommendations to the UN Membership in this regard.

77. The IGF would have no oversight function and would not replace existing arrangements, mechanisms, institutions or organisations, but would involve them and take advantage of their expertise. It would be constituted as a neutral, non-duplicative and non-binding process. It would have no involvement in day-to-day or technical operations of the Internet.

78. The UN Secretary-General should extend invitations to all stakeholders and relevant parties to participate at the inaugural meeting of the IGF, taking into consideration balanced geographical representation. The UN Secretary-General should also:

a) draw upon any appropriate resources from all interested stakeholders, including the proven expertise of ITU, as demonstrated during the WSIS process; and

b) establish an effective and cost-efficient bureau to support the IGF, ensuring multi-stakeholder participation.

79. Diverse matters relating to Internet governance would continue to be addressed in other relevant fora.

80. We encourage the development of multi-stakeholder processes at the national, regional and international levels to discuss and collaborate on the expansion and diffusion

terlibat dalam proses ini - pemerintah, badan usaha, masyarakat sipil, dan organisasi antar-pemerintah.

b) Memiliki suatu struktur ringan dan terdesentralisasi yang akan menjadi subyek untuk ditinjau secara berkala.

c) Bertemu secara berkala, sesuai kebutuhan. Pertemuan IGF, pada prinsipnya, dapat dilaksanakan secara paralel dengan konferensi-konferensi utama PBB yang terkait, *antara lain*, untuk menggunakan dukungan logistiknya.

74. Kita mendorong Sekretaris Jenderal PBB untuk memeriksa sederet pilihan untuk penyelenggaraan Forum, dengan mempertimbangkan kompetensi yang telah dibuktikan oleh semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Internet dan kebutuhan untuk memastikan keterlibatan mereka sepenuhnya.

75. Sekretaris Jenderal PBB akan memberikan laporan kepada Negara-Negara Anggota PBB secara berkala mengenai pelaksanaan operasi Forum tersebut.

76. Kita meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meneliti keinginan tentang kelanjutan Forum, dalam pelaksanaan konsultasi formal dengan para peserta forum, dalam jangka lima tahun pendiriannya, dan untuk membuat rekomendasi kepada para Anggota PBB tentang hal ini.

77. IGF tidak akan memiliki fungsi pemantauan dan tidak akan mengganti pengaturan, mekanisme, institusi, atau organisasi yang sudah ada saat ini, tapi akan melibatkan mereka dan mengambil manfaat dari keahlian mereka. Hal ini akan merupakan suatu proses netral, non-duplikatif, dan tidak mengikat. IGF tidak memiliki keterlibatan dalam pengoperasian sehari-hari atau teknis dari Internet.

78. Sekretaris Jenderal PBB harus menyampaikan undangan kepada semua pemangku kepentingan dan pihak terkait untuk ikut serta pada pertemuan inaugurasi IGF, dengan mempertimbangkan representasi geografis yang seimbang. Sekretaris Jenderal PBB harus:

a) menarik sumber daya yang sesuai dari semua pemangku kepentingan yang memiliki minat, termasuk keahlian yang telah terbukti dari ITU, seperti yang ditunjukkan selama proses WSIS; dan

b) mendirikan biro yang efektif dan efisien dalam biaya untuk mendukung IGF, memastikan keikutsertaan multi-pemangku kepentingan.

79. Berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Internet akan terus dibahas dalam forum lainnya yang relevan.

80. Kita mendorong pengembangan proses multi pemangku kepentingan di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mendiskusikan dan mengkolaborasikan

of the Internet as a means to support development efforts to achieve internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

81. We reaffirm our commitment to the full implementation of the Geneva Principles.

82. We welcome the generous offer of the Government of Greece to host the first meeting of the IGF in Athens no later than 2006 and **we call upon** the UN Secretary-General to extend invitations to all stakeholders and relevant parties to participate at the inaugural meeting of the IGF.

mengenai ekspansi dan difusi Internet sebagai cara untuk mendukung upaya pengembangan dalam mencapai maksud dan tujuan pengembangan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium.

81. Kita menegaskan kembali komitmen kita terhadap pelaksanaan sepenuhnya dari Prinsip-Prinsip Geneva.

82. Kita menyambut baik tawaran Pemerintah Yunani untuk menjadi tuan rumah pertemuan IGF pertama di Athena paling lambat tahun 2006 dan kita menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menyampaikan undangan kepada semua pemangku kepentingan dan kelompok yang relevan untuk ikut serta pada pertemuan inaugurasi IGF.

D. IMPLEMENTATION AND FOLLOW-UP

83. Building an inclusive development-oriented Information Society will require unremitting multi-stakeholder effort. **We thus commit ourselves** to remain fully engaged-nationally, regionally and internationally-to ensure sustainable implementation and follow-up of the outcomes and commitments reached during the WSIS process and its Geneva and Tunis phases of the Summit. Taking into account the multi-faceted nature of building the Information Society, effective cooperation among governments, private sector, civil society and the United Nations and other international organisations, according to their different roles and responsibilities and leveraging on their expertise, is essential.

84. Governments and other stakeholders should identify those areas where further effort and resources are required, and jointly identify, and where appropriate develop, implementation strategies, mechanisms and processes for WSIS outcomes at international, regional, national and local levels, paying particular attention to people and groups that are still marginalised in their access to, and utilisation of, ICTs.

85. Taking into consideration the leading role of governments in partnership with other stakeholders in implementing the WSIS outcomes, including the *Geneva Plan of Action*, at the national level, **we encourage** those governments that have not yet done so to elaborate, as appropriate, comprehensive, forward-looking and sustainable national e-strategies, including ICT strategies and sectoral e-strategies as appropriate*, as an integral part of national development plans and poverty reduction strategies, as soon as possible and before 2010.

86. **We support** regional and international integration efforts aimed at building a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, and **we reiterate** that strong cooperation within and among regions is indispensable to support knowledge-sharing. Regional cooperation should contribute to national capacity building and to the development of regional implementation strategies.

87. **We affirm** that the exchange of views and sharing of effective practices and resources is essential to implementing the outcomes of WSIS at the regional and international levels. To this end, efforts should be made to provide and share, among all stakeholders, knowledge and know-how, related to the design, implementation, monitoring and evaluation of e-strategies and policies, as appropriate. **We recognize** as fundamental elements to bridge the digital divide in developing countries, in a sustainable way, poverty reduction, enhanced national capacity building and the promotion of national technological development.

*Throughout this text, further references to "e-strategies" are interpreted as including also ICT strategies and sectoral e-strategies, as appropriate.

D. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

83. Membangun suatu Masyarakat Informasi yang inklusif yang berorientasi pada perkembangan akan membutuhkan upaya multi pemangku kepentingan yang tiada henti. **Oleh karena itu kita berkomitmen diri** untuk tetap terlibat penuh - secara nasional, regional, dan internasional - untuk memastikan pelaksanaan berkesinambungan dan menindak lanjuti hasil dan komitmen yang dicapai selama proses WSIS dan tahap-tahap KTT Geneva dan Tunis. Dengan memperhitungkan aneka segi ciri pembangunan Masyarakat Informasi, kerjasama efektif antar pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi internasional lainnya, sesuai dengan peran dan tanggung jawab berbeda mereka dan menggunakan keahlian mereka, adalah hal yang diperlukan.

84. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya harus mengidentifikasi area permasalahan di mana upaya dan sumber daya selanjutnya dibutuhkan, dan bersama-sama mengidentifikasi, dan di mana diperlukan mengembangkan, pelaksanaan strategi, mekanisme, dan proses untuk hasil WSIS di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal, dengan memberikan perhatian khusus untuk orang dan kelompok yang masih terpinggirkan dalam akses dan penggunaan TIK.

85. Mempertimbangkan peran utama pemerintah dalam kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya pada pelaksanaan hasil WSIS, termasuk *Rencana Aksi Geneva*, di tingkat nasional, **kita mendorong** pemerintah yang belum melakukannya untuk menjabarkan, sesuai yang diperlukan, e-strategi yang menyeluruh, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan, termasuk strategi TIK dan e-strategi sektoral yang diperlukan*, sebagai bagian integral rencana pembangunan nasional dan strategi menurunkan kemiskinan, secepat mungkin dan sebelum 2010.

86. **Kita mendukung** upaya integrasi regional dan internasional yang bertujuan pada pembangunan Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, yang inklusif, dan berorientasi pada pembangunan, dan **kita menyatakan kembali** bahwa kerjasama yang kokoh di dalam dan antara wilayah tak dapat digantikan untuk mendukung proses berbagi-pengetahuan. Kerjasama Regional harus memberi kontribusi kepada pengembangan kemampuan nasional dan kearah pengembangan strategi pelaksanaan regional.

87. **Kita menegaskan** bahwa pertukaran pendapat serta bertukar praktek efektif dan sumber daya adalah esensial untuk melaksanakan hasil WSIS di tingkat regional dan internasional. Untuk hasil ini, harus diupayakan untuk menyediakan dan berbagi, antara semua pemangku kepentingan, pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan rancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi e-strategi dan kebijakan, seperlunya. **Kita mengakui** sebagai elemen fundamental untuk menjembatani kesenjangan digital di negara-negara berkembang, secara berkesinambungan, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan kemampuan nasional, dan mempromosikan pengembangan teknologi nasional.

*Dalam teks ini, rujukan lebih lanjut untuk "e-strategi" diartikan termasuk strategi TIK dan e-strategi sektor, sesuai keperluan

88. We reaffirm that through the international cooperation of governments and the partnership of all stakeholders, it will be possible to succeed in our challenge of harnessing the potential of ICTs as a tool, at the service of development, to promote the use of information and knowledge to achieve the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, as well as to address the national and local development priorities, thereby further improving the socio-economic development of all human beings.

89. We are determined to improve international, regional and national connectivity and affordable access to ICTs and information through an enhanced international cooperation of all stakeholders that promotes technology exchange and technology transfer, human resource development and training, thus increasing the capacity of developing countries to innovate and to participate fully in, and contribute to, the Information Society.

90. We reaffirm our commitment to providing equitable access to information and knowledge for all, recognizing the role of ICTs for economic growth and development. **We are committed** to working towards achieving the indicative targets, set out in the *Geneva Plan of Action*, that serve as global references for improving connectivity and universal, ubiquitous, equitable, non-discriminatory and affordable access to, and use of ICTs, considering different national circumstances, to be achieved by 2015, and to using ICTs, as a tool to achieve the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, by:

a) Mainstreaming and aligning national e-strategies, across local, national, and regional action plans, as appropriate and in accordance with local and national development priorities, with in-built time-bound measures;

b) Developing and implementing enabling policies that reflect national realities and that promote a supportive international environment, foreign direct investment as well as the mobilization of domestic resources, in order to promote and foster entrepreneurship, particularly Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs), taking into account the relevant market and cultural contexts. These policies should be reflected in a transparent, equitable regulatory framework to create a competitive environment to support these goals and strengthen economic growth;

c) Building ICT capacity for all and confidence in the use of ICTs by all - including youth, older persons, women, indigenous peoples, people with disabilities, and remote and rural communities - through the improvement and delivery of relevant education and training programmes and systems including lifelong and distance learning;

88. Kita menegaskan kembali bahwa melalui kerjasama internasional pemerintahan dan kemitraan semua pemangku kepentingan, akan dapat berhasil dalam tantangan kita untuk memanfaatkan kemampuan TIK sebagai sarana, dalam mendukung pembangunan, untuk mempromosikan penggunaan informasi dan pengetahuan untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium, seperti untuk membahas prioritas pembangunan nasional dan lokal, oleh karenanya meningkatkan pembangunan sosial ekonomi semua umat manusia.

89. Kita berketetapan untuk memperbaiki keterhubungan internasional, regional, dan nasional, serta akses yang terjangkau ke TIK dan informasi melalui kerjasama internasional semua pemangku kepentingan yang mempromosikan pertukaran teknologi dan alih teknologi, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang untuk berinovasi dan berpartisipasi penuh dalam, dan memberi kontribusi kepada Masyarakat Informasi.

90. Kita menegaskan kembali komitmen untuk menyediakan akses yang adil untuk informasi dan pengetahuan kepada semua, dengan mengakui peran TIK untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. **Kita berkomitmen** untuk bekerja menuju pencapaian sasaran-sasaran indikatif, dijabarkan dalam Rencana Aksi Geneva, yang menjadi referensi global untuk memperbaiki keterhubungan dan akses universal, tersebar, adil, non-diskriminatif, dan terjangkau ke, dan penggunaan TIK, dengan mempertimbangkan keadaan nasional yang berbeda-beda, untuk dicapai menjelang 2015, dan untuk menggunakan TIK, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium, dengan cara :

a) Mengarus-utamakan dan meluruskan e-strategi nasional, melalui Rencana Aksi lokal, nasional, dan regional, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan prioritas pembangunan lokal dan nasional, dengan langkah-langkah yang telah ditentukan jangka waktunya;

b) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan yang mencerminkan realitas nasional dan yang mempromosikan lingkungan internasional yang mendukung, investasi asing langsung, seperti pengerahan sumber daya domestik, dalam upaya untuk mempromosikan dan menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha, khususnya Usaha-Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (SMMEs), dengan memperhitungkan pasar dan budaya yang sesuai. Kebijakan ini harus dicerminkan dalam pola peraturan yang transparan dan adil untuk menciptakan lingkungan yang bersaing untuk mendukung tujuan-tujuan ini dan memperkuat pertumbuhan ekonomi;

c) Membangun kemampuan TIK untuk semua dan kepercayaan diri dalam penggunaan TIK oleh semua - termasuk orang muda, orang tua, perempuan, penduduk pribumi, orang cacat, dan komunitas yang terpencil dan di pedesaan - melalui perbaikan dan pelaksanaan pendidikan yang sesuai serta program dan sistem pelatihan, termasuk pembelajaran seumur hidup dan pembelajaran jarak jauh;

d) *Implementing effective training and education*, particularly in ICT science and technology, that motivates and promotes participation and active involvement of girls and women in the decision-making process of building the Information Society;

e) *Paying special attention to the formulation of universal design concepts and the use of assistive technologies* that promote access for all persons, including those with disabilities;

f) *Promoting public policies aimed at providing affordable access* at all levels, including community-level, to hardware as well as software and connectivity through an increasingly converging technological environment, capacity building and local content;

g) *Improving access to the world's health knowledge and telemedicine services*, in particular in areas such as global cooperation in emergency response, access to and networking among health professionals to help improve quality of life and environmental conditions;

h) *Building ICT capacities* to improve access and use of postal networks and services;

i) *Using ICTs to improve access to agricultural knowledge*, combat poverty, and support production of and access to locally-relevant agriculture-related content;

j) *Developing and implementing e-government applications* based on open standards in order to enhance the growth and interoperability of e-government systems, at all levels, thereby furthering access to government information and services, and contributing to building ICT networks and developing services that are available anywhere and anytime, to anyone and on any device;

k) Supporting educational, scientific, and cultural institutions, including libraries, archives and museums, in their role of developing, providing equitable, open and affordable access to, and preserving diverse and varied content, including in digital form, to support informal and formal education, research and innovation; and in particular supporting libraries in their public service role of providing free and equitable access to information and of improving ICT literacy and community connectivity, particularly in underserved communities;

l) *Enhancing the capacity of communities* in all regions to develop content in local and/or indigenous languages;

d) Mengimplementasikan pelatihan dan pendidikan yang efektif, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi TIK, yang memotivasi serta mempromosikan keikutsertaan dan keterlibatan anak-anak gadis dan perempuan dewasa dalam proses pengambilan keputusan dalam membangun Masyarakat Informasi;

e) Memberikan perhatian istimewa kepada perumusan konsep rancangan universal dan penggunaan teknologi penunjang yang mempromosikan akses untuk semua orang termasuk orang cacat;

f) Mempromosikan kebijakan publik yang ditujukan pada penyediaan akses yang terjangkau di semua tingkat, termasuk tingkat komunitas, terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak dan koneksitas melalui lingkungan teknologi yang makin terpadu, pengembangan kemampuan, dan konten lokal;

g) Memperbaiki akses terhadap pelayanan pengetahuan dan pengobatan kesehatan jarak jauh dunia, khususnya di wilayah seperti kerjasama global dalam menanggapi keadaan darurat, akses kepada dan jaringan antara ahli kesehatan untuk menolong memperbaiki kualitas kehidupan dan kondisi lingkungan;

h) Mengembangkan kemampuan TIK untuk memperbaiki akses dan penggunaan jaringan dan pelayanan pos;

i) Menggunakan TIK untuk memperbaiki akses terhadap pengetahuan pertanian, memerangi kemiskinan, dan mendukung produksi dari dan akses kepada konten yang terkait dengan pertanian yang sesuai dengan keadaan lokal;

j) *Mengembangkan dan melaksanakan aplikasi e-pemerintah* berdasarkan standar terbuka dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan keterpaduan operasional sistem e-pemerintah, di semua tingkatan, dengan demikian meneruskan akses ke informasi dan pelayanan pemerintah, dan memberikan kontribusi untuk pembangunan jaringan TIK dan pengembangan jasa yang tersedia di mana pun dan kapan pun, kepada siapa pun dan menggunakan alat apa pun;

k) *Mendukung institusi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan*, termasuk perpustakaan, arsip, dan museum, dalam peran pengembangan mereka, menyediakan akses yang sederhana, terbuka, dan terjangkau untuk, dan memelihara konten yang beragam dan berbagai macam, termasuk dalam bentuk digital, untuk mendukung pendidikan informal dan formal, penelitian dan pembaharuan, serta khususnya mendukung perpustakaan dalam peran pelayanan publik untuk menyediakan akses informasi yang bebas dan sederhana, serta untuk memperbaiki kemampuan menggunakan TIK dan koneksitas komunitas, khususnya di komunitas dengan sarana yang terbatas;

l) *Meningkatkan kemampuan komunitas* di semua wilayah untuk mengembangkan konten dalam bahasa lokal dan atau pribumi;

m) Strengthening the creation of quality e-content, on national, regional and international levels;

n) Promoting the use of traditional and new media in order to foster universal access to information, culture and knowledge for all people, especially vulnerable populations and populations in developing countries and using, *inter alia*, radio and television as educational and learning tools;

o) Reaffirming the independence, pluralism and diversity of media, and freedom of information including through, as appropriate, the development of domestic legislation, **we reiterate** our call for the responsible use and treatment of information by the media in accordance with the highest ethical and professional standards. **We reaffirm** the necessity of reducing international imbalances affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development of human skills. These reaffirmations are made with reference to *Geneva Declaration of Principles paragraphs 55 to 59*.

p) Strongly encouraging ICT enterprises and entrepreneurs to develop and use environment-friendly production processes in order to minimise the negative impacts of the use and manufacture of ICTs and disposal of ICT waste on people and the environment. In this context, it is important to give particular attention to the specific needs of the developing countries;

q) Incorporating regulatory, self-regulatory, and other effective policies and frameworks to protect children and young people from abuse and exploitation through ICTs into national plans of action and e-strategies;

r) Promoting the development of advanced research networks, at national, regional and international levels, in order to improve collaboration in science, technology and higher education;

s) Promoting voluntary service, at the community level, to help maximise the developmental impact of ICTs;

t) Promoting the use of ICTs to enhance flexible ways of working, including teleworking, leading to greater productivity and job creation.

91. We recognize the intrinsic relationship between disaster reduction, sustainable development and the eradication of poverty and that disasters seriously undermine investment in a very short time and remain a major impediment to sustainable development and poverty eradication. **We are clear** as to the important enabling role of

m) Memperkuat penciptaan e-konten berkualitas, di tingkat nasional, regional, dan internasional;

n) Mempromosikan penggunaan media tradisional dan baru dalam upaya untuk menumbuh-kembangkan akses universal terhadap informasi, budaya, dan pengetahuan untuk semua orang, khususnya penduduk yang rentan dan penduduk di negara-negara berkembang serta menggunakan, antara lain, radio dan televisi sebagai alat pendidikan dan pembelajaran;

o) Menegaskan Kembali kebebasan, pluralisme, dan keragaman media, serta kebebasan terhadap informasi termasuk melalui, pengembangan peraturan perundang-undangan domestik sesuai yang dibutuhkan, kita menyatakan kembali seruan untuk penggunaan dan perlakuan informasi yang bertanggung jawab oleh media sesuai dengan standar etika dan profesional tertinggi. Kita menegaskan kembali kebutuhan untuk mengurangi ketidakseimbangan internasional yang mempengaruhi media, khususnya mengenai infrastruktur, sumber teknik dan perkembangan keterampilan manusia. Penegasan kembali ini dibuat dengan referensi kepada *Deklarasi Prinsip-Prinsip Geneva paragraf 55* sampai dengan 59;

p) Mendesak dengan sangat perusahaan-perusahaan dan para wiraswasta TIK untuk mengembangkan dan menggunakan proses produksi ramah lingkungan dalam upaya untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan dan pembuatan TIK serta pembuangan sampah TIK terhadap manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk memberi perhatian khusus kepada kebutuhan spesifik negara-negara berkembang;

q) Menerbitkan peraturan, pengaturan diri, dan kebijakan lainnya serta pola untuk melindungi anak dan orang muda dari kekerasan dan eksploitasi melalui TIK ke dalam perencanaan dari aksi dan e-strategi nasional;

r) Mempromosikan pengembangan jaringan penelitian tingkat lanjut, di tingkat nasional, regional, dan internasional, dalam upaya memperbaiki kerjasama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;

s) Mempromosikan layanan sukarela, di tingkat komunitas, untuk membantu memaksimalkan dampak TIK pada pembangunan;

t) Mempromosikan penggunaan TIK untuk meningkatkan cara kerja yang fleksibel, termasuk cara kerja jarak jauh, mengarah pada produktivitas dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik.

91. Kita mengakui hubungan intrinsik antara pengurangan bencana, pembangunan berkelanjutan, dan pemberantasan kemiskinan, dan bahwa bencana secara serius merusak investasi dalam waktu yang sangat singkat dan tetap menjadi penghalang utama terhadap pembangunan yang berkesinambungan dan pemberantasan

ICTs at the national, regional and international levels including:

- a) Promoting technical cooperation and enhancing the capacity of countries, particularly developing countries, in utilising ICT tools for disaster early warning, management and emergency communications, including dissemination of understandable warnings to those at risk;
- b) Promoting regional and international cooperation for easy access to and sharing of information for disaster management, and exploring modalities for the easier participation of developing countries;
- c) Working expeditiously towards the establishment of standards-based monitoring and worldwide early-warning systems linked to national and regional networks and facilitating emergency disaster response all over the world, particularly in high-risk regions.

92. We encourage countries, and all other interested parties, to make available child helplines, taking into account the need for mobilization of appropriate resources. For this purpose, easy-to-remember numbers, accessible from all phones and free of charge, should be made available.

93. We seek to digitise our historical data and cultural heritage for the benefit of future generations. **We encourage** effective information management policies in the public and private sectors, including the use of standards-based digital archiving and innovative solutions to overcome technological obsolescence, as a means to ensure the long-term preservation of, and continued access to, information.

94. We acknowledge that everyone should benefit from the potential that the Information Society offers. Therefore, **we invite** governments to assist, on a voluntary basis, those countries affected by any unilateral measure not in accordance with international law and the *Charter of the United Nations* that impedes the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of their population.

95. We call upon international and inter-governmental organisations to develop, within approved resources, their policy analysis and capacity building programmes, based on practical and replicable experiences of ICT matters, policies and actions that have led to economic growth and poverty alleviation, including through the improved competitiveness of enterprises.

96. We recall the importance of creating a trustworthy, transparent and non-discriminatory legal, regulatory and policy environment. To that end, **we reiterate** that

kemiskinan. **Kita yakin** mengenai peran pemberdayaan penting TIK di tingkat nasional, regional, dan internasional, termasuk:

- a) Mempromosikan kerjasama teknis dan meningkatkan kemampuan negara, khususnya negara-negara berkembang, dalam menggunakan sarana TIK untuk komunikasi peringatan awal bencana, manajemen, dan komunikasi darurat, termasuk penyebaran peringatan yang dapat dimengerti kepada mereka yang terancam bahaya;
- b) Mempromosikan kerjasama regional dan internasional untuk kemudahan akses kepada dan berbagi informasi untuk manajemen bencana, serta menjelajahi modalitas untuk mempermudah keikutsertaan negara-negara berkembang.
- c) Bekerja secara cepat menuju pembangunan sistem pemantauan sesuai standar dan sistem peringatan awal di seluruh dunia yang terhubung kepada jaringan nasional dan regional serta memfasilitasi penanggulangan bencana darurat di seluruh dunia, khususnya di wilayah yang beresiko tinggi.

92. Kita mendorong negara-negara, termasuk semua kelompok yang berminat, untuk menyediakan saluran pertolongan anak, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk mengarahkan sumber daya yang diperlukan. Untuk maksud ini, harus disediakan nomor yang mudah diingat, dapat diakses melalui semua telepon dan bebas biaya.

93. Kita mencoba untuk mendigitalkan warisan data dan kebudayaan bersejarah kita untuk kepentingan generasi mendatang. **Kita mendorong** kebijakan manajemen informasi yang efektif di sektor publik dan swasta, termasuk penggunaan pengarsipan digital sesuai standar dan solusi inovatif untuk mengatasi teknologi yang kadaluwarsa, sebagai cara untuk memastikan pemeliharaan jangka panjang, dan akses yang berkelanjutan pada informasi.

94. Kita mengakui bahwa semua harus mendapatkan manfaat dari peluang yang ditawarkan Masyarakat Informasi. Oleh karena itu, **kita mengundang** pemerintah untuk membantu, atas dasar sukarela, negara-negara yang kena dampak langkah unilateral apapun yang tidak menurut hukum internasional dan *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* yang merintangi keberhasilan pengembangan ekonomi dan sosial oleh penduduk negara-negara yang kena dampaknya, dan yang menghalangi kesejahteraan penduduk.

95. Kita menyerukan kepada organisasi internasional dan antar-pemerintah untuk mengembangkan, dengan sumber daya yang disetujui, analisis kebijakan dan program pengembangan kemampuan, berdasarkan pengalaman praktis dan dapat ditiru dari persoalan, kebijakan, dan tindakan TIK yang telah membawa kepada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk melalui perbaikan daya kompetitif badan-badan usaha.

96. Kita menyerukan kembali pentingnya menciptakan lingkungan hukum, peraturan, dan kebijakan yang dapat dipercaya, transparan, dan non-diskriminatif. Untuk maksud

ITU and other regional organisations should take steps to ensure rational, efficient and economic use of, and equitable access to, the radio-frequency spectrum by all countries, based on relevant international agreements.

97. We acknowledge that multi-stakeholder participation is essential to the successful building of a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society and that governments could play an important role in this process. **We underline** that the participation of all stakeholders in implementing WSIS outcomes, and following them up on national, regional and international levels with the overarching goal of helping countries to achieve internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, is key to that success.

98. We encourage strengthened and continuing cooperation between and among stakeholders to ensure effective implementation of the Geneva and Tunis outcomes, for instance through the promotion of national, regional and international multi-stakeholder partnerships including Public Private Partnerships (PPPs), and the promotion of national and regional multi-stakeholder thematic platforms, in a joint effort and dialogue with developing and less developed countries, development partners and actors in the ICT sector. In that respect, **we welcome** partnerships such as the ITU-led *Connect the World* initiative.

99. We agree to ensure the sustainability of progress towards the goals of WSIS after the completion of its Tunis phase and **we decide**, therefore, to establish a mechanism for implementation and follow-up at national, regional and international levels.

100. At the national level, based on the WSIS outcomes, **we encourage** governments, with the participation of all stakeholders and bearing in mind the importance of an enabling environment, to set up a national implementation mechanism, in which:

a) National e-strategies, where appropriate, should be an integral part of national development plans, including Poverty Reduction Strategies, aiming to contribute to the achievement of internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals;

b) ICTs should be fully mainstreamed into strategies for Official Development Assistance (ODA) through more effective information-sharing and co-ordination among development partners, and through analysis and sharing of best practices and lessons learned from experience with ICT for development programmes;

tersebut, **kita mengulangi pernyataan** bahwa ITU dan organisasi regional lainnya harus mengambil langkah untuk memastikan penggunaan yang rasional, efisien, dan ekonomis dari, dan akses sederajat terhadap, spektrum frekuensi radio oleh semua negara, berdasarkan perjanjian internasional yang sesuai.

97. Kita mengakui bahwa keikutsertaan multi-pemangku kepentingan adalah sangat perlu untuk keberhasilan membangun Masyarakat Informasi yang terpusat pada manusia, inklusif, dan mengarah pada pembangunan dan bahwa pemerintah dapat memainkan peran penting dalam proses ini. **Kita menggarisbawahi** bahwa keikutsertaan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan hasil WSIS, dan menindaklanjuti di tingkat nasional, regional, dan internasional dengan tujuan mencakup untuk menolong negara-negara mencapai tujuan dan maksud pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium.

98. Kita mendorong kerjasama yang diperkokoh dan berkelanjutan antara dan antar pihak-pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi hasil-hasil Geneva dan Tunis yang efektif; contohnya, melalui promosi kemitraan multi-pemangku kepentingan tingkat nasional, regional, dan internasional, termasuk Kemitraan Publik Swasta (PPPs), dan promosi dari landasan pijak tematik multi-pemangku kepentingan tingkat nasional dan regional, dalam upaya bersama dan dialog dengan negara-negara berkembang dan kurang berkembang, mitra pembangunan, dan pemeran sektor TIK. Untuk hal tersebut, **kita menyambut** kemitraan seperti prakarsa *Menghubungkan Dunia* yang dipimpin oleh ITU.

99. Kita menyetujui untuk memastikan kesinambungan kemajuan mengarah pada tujuan WSIS setelah selesainya tahap Tunis dan **kita memutuskan**, untuk mendirikan suatu mekanisme dalam rangka mengimplementasikan dan menindak lanjutinya di tingkat nasional, regional, dan internasional.

100. Pada tingkat nasional, berdasarkan hasil-hasil WSIS, **kita mendorong** pemerintah, dengan keikutsertaan semua pemangku kepentingan dan dengan membawa pemikiran pentingnya suatu lingkungan yang memberdayakan, untuk menyusun mekanisme pelaksanaan nasional, di mana:

a) E-strategi nasional, sesuai yang diperlukan, harus menjadi bagian integral dari rencana pengembangan nasional, termasuk Strategi Pengurangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk memberi kontribusi kepada pencapaian maksud dan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium;

b) TIK harus diurus-utamakan sepenuhnya ke dalam strategi untuk Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) melalui pertukaran informasi yang lebih efektif dan koordinasi antar mitra pembangunan, dan melalui analisis dan pertukaran praktek terbaik serta pelajaran yang diperoleh dari pengalaman dengan program TIK untuk pembangunan;

c) Existing bilateral and multilateral technical assistance programmes, including those under the UN Development Assistance Framework, should be used whenever appropriate to assist governments in their implementation efforts at the national level;

d) Common Country Assessment reports should contain a component on ICT for development.

101. At the regional level:

a) Upon request from governments, regional inter-governmental organisations in collaboration with other stakeholders should carry out WSIS implementation activities, exchanging information and best practices at the regional level, as well as facilitating policy debate on the use of ICT for development, with a focus on attaining the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals;

b) UN Regional Commissions, based on request of Member States and within approved budgetary resources, may organise regional WSIS follow-up activities in collaboration with regional and sub-regional organisations, with appropriate frequency, as well as assisting Member States with technical and relevant information for the development of regional strategies and the implementation of the outcomes of regional conferences;

c) **We consider** a multi-stakeholder approach and the participation in regional WSIS implementation activities by the private sector, civil society, and the United Nations and other international organisations to be essential.

102. At the international level, bearing in mind the importance of the enabling environment:

a) *Implementation and follow-up* of the outcomes of the Geneva and Tunis phases of the Summit should take into account the main themes and action lines in the Summit documents;

b) Each UN agency should act according to its mandate and competencies, and pursuant to decisions of their respective governing bodies, and within existing approved resources;

c) Implementation and follow-up should include inter-governmental and multi-stakeholder components.

103. We invite UN agencies and other inter-governmental organisations, in line with UNGA *Resolution 57/270 B*, to facilitate activities among different stakeholders, including civil society and the business sector, to help national governments in their implementation

c) Program bantuan teknik bilateral dan multilateral yang ada, termasuk yang berada di bawah Pola Bantuan Pembangunan PBB (UN Development Assistance Framework), harus digunakan bilamana diperlukan untuk membantu pemerintah dalam upaya pelaksanaan mereka di tingkat nasional;

d) Laporan Penilaian Negara Bersama harus memuat komponen mengenai TIK untuk pembangunan.

101. Pada tingkat regional:

a) Atas permintaan pemerintah, organisasi antar-pemerintah regional melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain harus melaksanakan kegiatan pelaksanaan WSIS, bertukar informasi dan praktek terbaik di tingkat regional, maupun memudahkan debat kebijakan terhadap penggunaan TIK untuk pembangunan, dengan fokus kepada pencapaian maksud dan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pengembangan Milenium;

b) Komisi Regional PBB, berdasarkan permintaan Negara Anggota dan dalam batasan anggaran belanja yang disetujui, dapat mengorganisasikan kegiatan tindak lanjut WSIS secara regional melalui kolaborasi dengan organisasi regional dan sub-regional, dengan frekuensi yang sesuai, serta membantu negara anggota dengan informasi teknis dan sesuai untuk pengembangan strategi regional dan pelaksanaan dari hasil konferensi regional;

c) **Kita mempertimbangkan** pendekatan multi-pemangku kepentingan dan keikutsertaan dalam kegiatan pelaksanaan WSIS regional oleh pihak swasta, masyarakat sipil, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi internasional lain adalah perlu.

102. Di tingkat internasional, mengingat pentingnya lingkungan yang memberdayakan:

a) *Pelaksanaan dan tindak lanjut* hasil-hasil KTT tahap Geneva dan Tunis harus memperhitungkan tema utama dan arah aksi dalam dokumen KTT;

b) Setiap instansi PBB harus bertindak sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing, dan menurut keputusan badan pengelolaan mereka, dan dalam batas sumber daya yang ada yang telah disetujui;

c) Pelaksanaan dan tindak lanjut harus termasuk komponen antar-pemerintah dan multi-pemangku kepentingan;

103. Kita mengundang badan PBB dan organisasi antar-pemerintah lainnya, sejalan dengan *Resolusi* UNGA *57/270 B*, untuk memfasilitasi kegiatan antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor bisnis, untuk membantu

efforts. **We request** the UN Secretary-General, in consultation with members of the UN system Chief Executives Board for coordination (CEB), to establish within the CEB, a UN Group on the Information Society consisting of the relevant UN bodies and organisations with the mandate to facilitate the implementation of WSIS outcomes and to suggest to CEB that, in considering lead agency(ies) of this Group, it takes into consideration the experience of and activities in the WSIS process undertaken by ITU, UNESCO and UNDP.

104. We further request the UN Secretary-General to report to the UNGA through ECOSOC by June 2006, on the modalities of the inter-agency coordination of the implementation of WSIS outcomes including recommendations on the follow-up process.

105. We request that ECOSOC oversees the system-wide follow-up of the Geneva and Tunis outcomes of WSIS. To this end, **we request** that ECOSOC, at its substantive session of 2006, reviews the mandate, agenda and composition of the Commission on Science and Technology for Development (CSTD), including considering the strengthening of the Commission, taking into account the multi-stakeholder approach.

106. WSIS implementation and follow-up should be an integral part of the UN integrated follow-up to major UN conferences and should contribute to the achievement of internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals. It should not require the creation of any new operational bodies.

107. International and regional organisations, should assess and report regularly on universal accessibility of nations to ICTs, with the aim of creating equitable opportunities for the growth of ICT sectors of developing countries.

108. We attach great importance to multi-stakeholder implementation at the international level, which should be organised taking into account the themes and action lines in the *Geneva Plan of Action*, and moderated or facilitated by UN agencies when appropriate. An Annex to this document offers an indicative and non-exhaustive list of facilitators/moderators for the action lines of the *Geneva Plan of Action*.

109. The experience of, and the activities undertaken by, UN agencies in the WSIS process-notably ITU, UNESCO and UNDP-should continue to be used to their fullest extent. These three agencies should play leading facilitating roles in the implementation of the *Geneva Plan of Action* and organise a meeting of moderators/facilitators of action lines, as mentioned in the *Annex*.

110. The coordination of multi-stakeholder implementation activities would help to avoid duplication of activities. This should include, *inter alia*, information exchange, creation

pemerintah-pemerintah nasional dalam upaya implementasinya. **Kita meminta** Sekretaris Jenderal PBB, melalui konsultasi dengan anggota Dewan Eksekutif Utama untuk koordinasi (CEB) sistem PBB, untuk mendirikan dalam CEB, suatu Kelompok PBB tentang Masyarakat Informasi yang terdiri dari badan dan organisasi PBB yang sesuai dengan mandat untuk memfasilitasi implementasi hasil-hasil WSIS dan untuk menyampaikan usul kepada CEB bahwa, dalam mempertimbangkan agen-agen pimpinan kelompok ini, perlu dipertimbangkan pengalaman dan kegiatan dalam proses WSIS yang dilakukan oleh ITU, UNESCO, dan UNDP.

104. Kita selanjutnya meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melapor kepada UNGA melalui ECOSOC menjelang Juni 2006, mengenai modalitas kerjasama antar - badan tentang implementasi hasil-hasil WSIS termasuk rekomendasi terhadap proses tindak lanjut.

105. Kita meminta bahwa ECOSOC mengawasi tindak lanjut sistem secara keseluruhan atas hasil Geneva dan Tunis. Untuk maksud ini, **kita meminta** bahwa ECOSOC, pada sesi yang membicarakan hal ini pada tahun 2006, meninjau mandat, agenda, dan susunan Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan (CSTD), termasuk mempertimbangkan penguatan Komisi, dengan memperhitungkan pendekatan multi-pemangku kepentingan.

106. Implementasi dan tindak lanjut WSIS harus menjadi bagian terpadu dari tindak lanjut terpadu PBB terhadap konferensi-konferensi utama PBB dan harus memberi sumbangan pada pencapaian maksud dan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium. Hal ini tidak mengharuskan penciptaan badan operasional baru.

107. Organisasi internasional dan regional, harus menilai dan memberi laporan secara teratur mengenai aksesibilitas universal negara-negara pada TIK, dengan tujuan menciptakan peluang sederajat untuk pertumbuhan sektor TIK negara-negara berkembang.

108. Kita meletakkan kepentingan besar terhadap implementasi multi pemangku kepentingan di tingkat internasional, yang harus diatur dengan memperhitungkan tema dan arah aksi dalam *Rencana Aksi Geneva*, serta dimoderatori atau difasilitasi oleh badan PBB sesuai keperluan. Lampiran dari dokumen ini menyuguhkan daftar indikatif dan tidak terbatas para fasilitator/moderator untuk arahan aksi *Rencana Aksi Geneva*.

109. Pengalaman dari, dan kegiatan yang dilakukan oleh, agen-agen PBB dalam proses WSIS - khususnya ITU, UNESCO dan UNDP - harus terus digunakan sepenuhnya. Tiga agen ini harus memainkan peran utama dalam memfasilitasi implementasi *Rencana Aksi Geneva* dan mengatur pertemuan moderator/fasilitator arahan aksi, seperti yang tercantum dalam *Lampiran*.

110. Koordinasi kegiatan implementasi multi pemangku kepentingan akan membantu untuk mencegah duplikasi kegiatan. Hal ini harus termasuk, *antara lain*, pertukaran

of knowledge, sharing of best practices, and assistance in developing multi-stakeholder and public/private partnerships.

111. We request the United Nations General Assembly (UNGA) to make an overall review of the implementation of WSIS outcomes in 2015.

112. We call for periodic evaluation, using an agreed methodology, such as described in *paragraphs 113-120*.

113. Appropriate indicators and benchmarking, including community connectivity indicators, should clarify the magnitude of the digital divide, in both its domestic and international dimensions, and keep it under regular assessment, and track global progress in the use of ICTs to achieve internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.

114. The development of ICT indicators is important for measuring the digital divide. **We note** the launch, in June 2004, of the *Partnership on Measuring ICT for Development*, and its efforts:

- a)** to develop a common set of core ICT indicators; to increase the availability of internationally comparable ICT statistics as well as to establish a mutually-agreed framework for their elaboration, for further consideration and decision by the UN Statistical Commission;
- b)** to promote capacity building in developing countries for monitoring the Information Society;
- c)** to assess the current and potential impact of ICTs on development and poverty reduction;
- d)** to develop specific gender-disaggregated indicators to measure the digital divide in its various dimensions.

115. We also note the launch of the *ICT Opportunity Index* and the *Digital Opportunity Index*, which will build upon the common set of core ICT indicators as they were defined within the *Partnership on Measuring ICT for Development*.

116. We stress that all indices and indicators must take into account different levels of development and national circumstances.

117. The further development of these indicators should be undertaken in a collaborative, cost-effective and non-duplicative fashion.

118. We invite the international community to strengthen the statistical capacity of developing countries by giving appropriate support at national and regional levels.

informasi, penciptaan pengetahuan, berbagi praktek-praktek terbaik, dan bantuan dalam mengembangkan kemitraan publik/swasta multi-pemangku kepentingan.

111. Kita meminta Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) untuk membuat tinjauan kembali menyeluruh tentang implementasi hasil-hasil WSIS pada 2015.

112. Kita menyerukan untuk mengadakan evaluasi berkala, menggunakan metodologi yang telah disepakati, seperti yang dijelaskan dalam *paragraf 113-120*.

113. Indikator yang sesuai dan penolak-ukuran, termasuk indikator koneksitas komunitas, harus menjelaskan besarnya kesenjangan digital, dalam dimensi domestik dan internasional, dan menjaganya di bawah penilaian berkala, serta melacak kemajuan global dalam penggunaan TIK untuk mencapai maksud dan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium.

114. Pengembangan indikator TIK penting untuk mengukur kesenjangan digital. **Kita mencatat** peluncuran, pada Juni 2004, *Kemitraan mengenai Pengukuran TIK untuk Pembangunan*, dan upayanya:

- a)** Mengembangkan seperangkat indikator inti TIK, untuk meningkatkan ketersediaan statistik TIK yang sebanding secara internasional maupun untuk mendirikan pola yang disepakati bersama untuk penjabarannya, sebagai bahan pertimbangan dan keputusan selanjutnya oleh Komisi Statistik PBB;
- b)** Mempromosikan pengembangan kemampuan di negara-negara berkembang untuk memantau Masyarakat Informasi;
- c)** Untuk menilai dampak sekarang dan potensial TIK pada pembangunan dan pengurangan kemiskinan.
- d)** Mengembangkan indikator pemisah gender tertentu untuk mengukur kesenjangan digital dalam berbagai dimensi.

115. Kita mencatat peluncuran *Index Peluang TIK* dan *Index Peluang Digital*, yang akan membangun perangkat indikator TIK inti sebagaimana ditentukan dalam *Kemitraan untuk Mengukur TIK untuk Pembangunan*.

116. Kita menekankan bahwa semua indeks dan indikator harus memperhitungkan perbedaan tingkat perkembangan dan keadaan nasional.

117. Pengembangan selanjutnya dari indikator-indikator ini harus dilaksanakan dengan cara yang kolaboratif, efektif biaya, dan non-duplikatif.

118. Kita mengundang komunitas internasional untuk memperkuat kemampuan statistik negara-negara berkembang dengan memberikan dukungan yang sesuai di tingkat nasional dan regional.

119. We commit ourselves to review and follow up progress in bridging the digital divide, taking into account the different levels of development among nations, so as to achieve the internationally-agreed development goals and objectives, including the Millennium Development Goals, assessing the effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information Society, identifying gaps as well as deficits in investment and devising strategies to address them.

120. The sharing of information related to the implementation of WSIS outcomes is an important element of evaluation. **We note with appreciation** the *Report on the Stocktaking of WSIS-related activities*, which will serve as one of the valuable tools for assisting with the follow-up, beyond the conclusion of the Tunis Phase of the Summit, as well as the *Golden Book* of initiatives launched during the Tunis phase. **We encourage** all WSIS stakeholders to continue to contribute information on their activities to the public WSIS stocktaking database maintained by ITU. In this regard, **we invite** all countries to gather information at the national level with the involvement of all stakeholders, to contribute to the stocktaking.

121. There is a need to build more awareness of the Internet in order to make it a global facility which is truly available to the public. **We call upon the UNGA** to declare 17 May as *World Information Society Day* to help to raise awareness, on an annual basis, of the importance of this global facility, on the issues dealt with in the Summit, especially the possibilities that the use of ICT can bring for societies and economies, as well as of ways to bridge the digital divide.

122. We request the Secretary-General of the Summit to report to the General Assembly of the United Nations on its outcome, as requested in UNGA *Resolution 59/220*.

Tunis, 18 November 2005

119. Kita berkomitmen diri untuk meninjau kembali dan menindak lanjuti kemajuan dalam menjembatani kesenjangan digital, dengan memperhitungkan perbedaan tingkat dari pembangunan antar negara, untuk mencapai maksud dan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium, menilai efektivitas investasi dan upaya kerjasama internasional dalam membangun Masyarakat Informasi, mengidentifikasi kesenjangan maupun defisit dalam investasi dan menyusun strategi untuk mengatasinya.

120. Berbagi informasi yang terkait dengan implementasi hasil-hasil WSIS adalah elemen penting dari evaluasi. **Kita mencatat dengan penghargaan** *Laporan mengenai Inventarisasi kegiatan yang terkait WSIS*, yang akan menjadi salah satu dari alat berharga untuk membantu tindak lanjut, melampaui berakhirnya KTT tahap Tunis, termasuk inisiatif *Buku Emas* yang diluncurkan selama tahap Tunis. **Kita mendorong** semua pemangku kepentingan yang terkait dengan WSIS untuk melanjutkan memberikan kontribusi informasi terhadap kegiatan mereka ke dalam database inventarisasi WSIS publik yang dipelihara oleh ITU. Dalam hal ini, **kita mengundang** semua negara untuk mengumpulkan informasi di tingkat nasional dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan, untuk memberikan kontribusinya pada database inventarisasi tersebut.

121. Ada kebutuhan untuk membangun kesadaran/perhatian yang lebih besar terhadap Internet dalam upaya untuk membuatnya menjadi fasilitas global yang benar-benar tersedia untuk publik. **Kita menyerukan** kepada UNGA untuk menyatakan 17 Mei sebagai *Hari Masyarakat Informasi Dunia* untuk membantu meningkatkan kesadaran, setiap tahunan, terhadap pentingnya fasilitas global ini, mengenai isu-isu yang ditangani dalam KTT ini, khususnya berbagai kemungkinan yang dapat diakibatkan oleh penggunaan TIK untuk pembangunan masyarakat dan ekonomi, termasuk cara untuk menjembatani kesenjangan digital.

122. Kita meminta Sekretaris Jenderal KTT ini untuk melaporkan hasil-hasilnya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang diminta dalam *Resolusi UNGA 59/220*.

Tunis, 18 November 2005

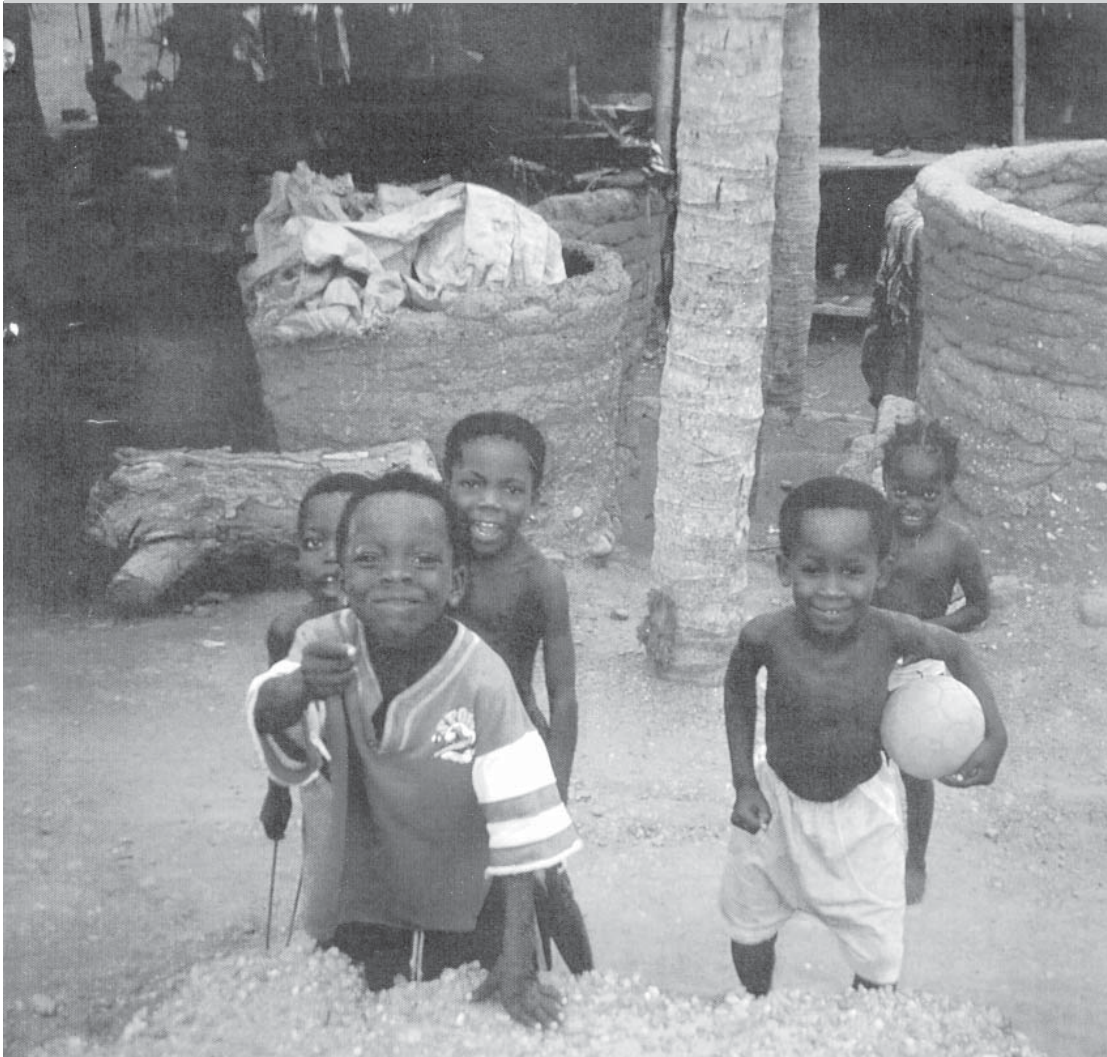
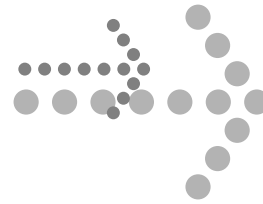


- Annex -

Action Line	Possible moderators/facilitators
C1. The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development	ECOSOC / UN Regional Commissions / ITU
C2. Information and communication infrastructure	ITU
C3. Access to information and knowledge	ITU / UNESCO
C4. Capacity building	UNDP / UNESCO / ITU / UNCTAD
C5. Building confidence and security in the use of ICTs	ITU
C6. Enabling environment	ITU / UNDP / UN Regional Commissions / UNCTAD
C7. ICT Applications • E-government • E-business • E-learning • E-health • E-employment • E-environment • E- agriculture • E-science	UNDP / ITU WTO / UNCTAD / ITU / UPU UNESCO / ITU / UNIDO WHO / ITU ILO / ITU WHO / WMO / UNEP / UN-Habitat / ITU / ICAO FAO / ITU UNESCO / ITU / UNCTAD
C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content	UNESCO
C9. Media	UNESCO
C10. Ethical dimensions of the Information Society	UNESCO / ECOSOC
C11. international and regional cooperation	UN Regional Commissions / UNDP / ITU / UNESCO / ECOSOC

- Lampiran -

Arahan Aksi	Kemungkinan moderator/fasilitator
C1. Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan	ECOSOC / Komisi Regional PBB / ITU
C2. Infrastruktur informasi dan komunikasi	ITU
C3. Akses untuk informasi dan pengetahuan	ITU / UNESCO
C4. Pembangunan kemampuan	UNDP / UNESCO / ITU / UNCTAD
C5. Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK	ITU
C6. Lingkungan yang memberdayakan	ITU / UNDP / Komisi Regional PBB / UNCTAD
C7. Aplikasi-aplikasi TIK • E-pemerintah • E-bisnis • E-pembelajaran • E-kesehatan • E-kepegawaian • E-lingkungan • E-pertanian • E-ilmu pengetahuan	UNDP / ITU WTO / UNCTAD / ITU / UPU UNESCO / ITU / UNIDO WHO / ITU ILO / ITU WHO / WMO / UNEP / UN-Habitat / ITU / ICAO FAO / ITU UNESCO / ITU / UNCTAD
C8. Keragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan konten lokal	UNESCO
C9. Media	UNESCO
C10. Dimensi etika Masyarakat Informasi	UNESCO / ECOSOC
C11. Kerjasama internasional dan regional	Komisi Regional PBB / UNDP / ITU / UNESCO / ECOSOC



® Photo credits :

h.31 UNESCO / Sergio Santimano / 10035303
h.42 UN Photo / L. Gubb / 152408
h.42 UN DPI / F. Charton / 187129
h.59 UN Photo / Eskinder Debebe / 31572
h.59 UN Photo / John Isaac / 61006
h.61 UN Photo / Jean Pierre Lafont / 64722
h.61 UNESCO / Sergio Santimano / 10035323
h.69 UNESCO / Cart / 30032748
h.99 UN Photo / Eskinder Debebe / 76190
h.99 ILO / M. Crozet / cn1399
h. 101 UNESCO / Jasmina Sopova / 10035134

www.itu.int/wsis/

® Kredit Foto:

h.31 UNESCO / Sergio Santimano / 10035303
h.42 UN Photo / L. Gubb / 152408
h.42 UN DPI / F. Charton / 187129
h.59 UN Photo / Eskinder Debebe / 31572
h.59 UN Photo / John Isaac / 61006
h.61 UN Photo / Jean Pierre Lafont / 64722
h.61 UNESCO / Sergio Santimano / 10035323
h.69 UNESCO / Cart / 30032748
h.99 UN Photo / Eskinder Debebe / 76190
h.99 ILO / M. Crozet / cn1399
h. 101 UNESCO / Jasmina Sopova / 10035134

www.itu.int/wsis/

|

|

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

Telp. 3855807

www.depkominfo.go.id